



Arsip Nasional Republik Indonesia



GUIDE ARSIP PERJUANGAN PEMBEBASAN IRIAN BARAT 1949 - 1969



**Direktorat Pengolahan
Arsip Nasional Republik Indonesia
Jakarta, 2016**

KATA PENGANTAR

Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengamanatkan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk melaksanakan pengelolaan arsip statis berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, kemasyarakatan dan perseorangan. Pengelolaan arsip statis bertujuan menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Arsip statis yang dikelola oleh ANRI merupakan memori kolektif, identitas bangsa, bahan pengembangan ilmu pengetahuan, dan sumber informasi publik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pengolahan arsip statis, maka khazanah arsip statis yang tersimpan di ANRI harus diolah dengan benar berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan sehingga arsip statis dapat ditemukan dengan cepat, tepat dan lengkap.

Pada tahun anggaran 2016 ini, salah satu program kerja Sub Bidang Pengolahan Arsip Pengolahan I yang berada di bawah Direktorat Pengolahan adalah menyusun *Guide* Arsip Perjuangan Pembebasan Irian Barat 1949-1969. *Guide* arsip ini merupakan sarana bantu penemuan kembali arsip statis bertema Perjuangan Pembebasan Irian Barat dengan kurun waktu 1949-1969 yang arsipnya tersimpan dan dapat diakses di ANRI.

Seperti kata pepatah, “tiada gading yang tak retak”, maka *guide* arsip ini tentunya belum sempurna dan masih ada kekurangan. Namun demikian *guide* arsip ini sudah dapat digunakan sebagai *finding aid* untuk mengakses dan menemukan arsip statis mengenai Pembebasan Irian Barat 1949-1969 yang tersimpan di ANRI dalam rangka pelayanan arsip statis kepada pengguna arsip (*user*).

Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan ANRI, anggota tim, Pusat Sejarah TNI dan semua pihak yang telah membantu penyusunan *guide* arsip ini hingga selesai. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa membalas amal baik yang telah Bapak/Ibu/Saudara berikan. Amin.

Jakarta, Desember 2016
Direktur Pengolahan

Azmi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Arsip Perjuangan Pembebasan Irian Barat 1949-1969	4
C. Penyusunan <i>Guide</i> Arsip Perjuangan Pembebasan Irian Barat 1949-1969.....	5
D. Petunjuk Penggunaan <i>Guide</i> Arsip Perjuangan Pembebasan Irian Barat 1949-1969	7
II. DESKRIPSI INFORMASI ARSIP.....	9
A. Diplomasi Politik	
1. Abstrak	9
2. Arsip Tekstual	10
3. Arsip Foto.....	23
4. Arsip Film	24
B. Konfrontasi Politik dan Ekonomi	
1. Abstrak	26
2. Arsip Tekstual	27
3. Arsip Foto.....	40
4. Arsip Film	42
C. Konfrontasi Militer	
1. Abstrak	43
2. Arsip Tekstual	44
3. Arsip Foto.....	50
4. Arsip Film	56
D. Konsolidasi dan Penentuan Pendapat Rakyat	
1. Abstrak	82
2. Arsip Tekstual	83
3. Arsip Foto.....	98
4. Arsip Film	100

III. PENUTUP	112
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN	
1. Indeks Nama.....	114
2. Indeks Tempat	121
3. Indeks Istilah dan Peristiwa.....	125
4. Daftar Singkatan.....	127

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung pada 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949 menyisakan satu persoalan terkait status Irian Barat. Delegasi Belanda menginginkan Irian Barat mendapatkan status khusus, karena menganggap tidak mempunyai hubungan dengan wilayah Indonesia lainnya. Sementara Delegasi Indonesia berpendapat bahwa Irian Barat adalah bagian dari Indonesia Timur yang termasuk dalam wilayah Republik Indonesia Serikat (RIS) dan selama ini telah terjalin hubungan etnologis, ekonomi, dan agama (Bone, 1952:57). Untuk menghindari kegagalan KMB, disepakati bahwa masalah Irian Barat akan diselesaikan dengan perundingan oleh Kerajaan Belanda dan RIS dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan, yaitu pada 27 Desember 1949.

Pasca penyerahan kedaulatan, dilakukan langkah awal untuk menyelesaikan masalah Irian Barat yaitu melalui jalur diplomasi politik. Salah satu bentuknya yaitu perundingan bilateral dengan Belanda dalam bentuk Konferensi Menteri-Menteri Uni Indonesia-Belanda. Konferensi ini berlangsung pada Maret 1950 di Jakarta dan 4 Desember 1950 di Den Haag. Hasilnya adalah kesepakatan untuk membentuk Komisi Gabungan yang bertugas untuk mengumpulkan fakta tentang Irian Barat dan melaporkannya kepada Uni. Akan tetapi, hasil komisi tersebut selalu mempunyai tafsiran berbeda tentang hak atas Irian Barat sehingga perundingan menemui jalan buntu. (Djamhari, 1995: 8)

Kegagalan perundingan dengan Belanda membuat Indonesia menggunakan upaya lain dalam bidang diplomasi politik. Diantaranya dengan mencari dukungan dalam forum internasional seperti Konferensi Asia-Afrika (KAA), Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok (KTT GNB). Melalui KAA, Indonesia berhasil memperoleh dukungan dengan memasukan masalah Irian Barat ke dalam komunike akhir KAA. Sementara perjuangan melalui PBB dilakukan pada Sidang Umum PBB ke IX tahun 1954 hingga Sidang Umum PBB ke XII tahun 1957. Akan tetapi setiap resolusi yang diusulkan oleh Indonesia selalu mengalami kegagalan.

Perjuangan melalui diplomasi politik tersebut ternyata belum berhasil merubah status Irian Barat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan konfrontasi politik dan ekonomi. Bentuk dari konfrontasi politik yaitu pemutusan hubungan Uni Indonesia-Belanda pada 15 Februari 1956, pembatalan persetujuan KMB pada 2 Maret 1956 dan membentuk Provinsi Otonomi Irian Barat pada 16 Agustus 1956. Sementara itu, bentuk dari konfrontasi ekonomi yaitu melakukan pemogokan dan menasionalisasi perusahaan milik Belanda seperti maskapai penerbangan, maskapai pelayaran, bank, pabrik gula, dan perusahaan gas. Konfrontasi politik dan ekonomi mencapai puncaknya pada 17 Agustus 1960 ketika Pemerintah Indonesia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Kerajaan Belanda (Cholil, 1971: 15-23).

Perjuangan melalui konfrontasi politik dan ekonomi ternyata tetap tidak mengubah sikap Belanda atas Irian Barat. Belanda bahkan semakin memperkeras sikapnya dengan mengirim kapal induk Karel Doorman ke Irian Barat, membentuk Komite Nasional Papua dan Negara Papua. Menghadapi sikap Belanda tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian melakukan upaya konfrontasi militer. Upaya ini diawali dengan misi militer oleh Menteri Luar Negeri Subandrio ke Uni Soviet yang berhasil menjalin kerja sama pembelian senjata pada Januari 1961. Selanjutnya, pada Desember 1961 diadakan sidang Kabinet Inti bersama Gabungan Kepala-kepala Staf (GKS) yang menghasilkan keputusan menghidupkan kembali Dewan Pertahanan Nasional. Dewan ini bertugas untuk merumuskan cara mengintegrasikan seluruh potensi nasional dalam pembebasan Irian barat (Abdullah, 2012: 422-423).

Upaya konfrontasi militer semakin meningkat ketika dibentuk Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat (KOTI Pemirbar) pada 14 Desember 1961 dengan Presiden Sukarno sebagai panglima besarnya. KOTI Pemirbar selanjutnya merumuskan Tri Komando Rakyat (Trikor) yang diumumkan pada 19 Desember 1961 oleh Presiden Sukarno. Isi lengkap Trikor yaitu: 1) Gagalkan pembentukan Negara Boneka papua buatan Belanda kolonialis; 2) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia; dan 3) Bersiap untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa (Ridhani, 2009: 72-73)

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Trikora dibentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada 2 Januari 1962 dengan Brigadir Jenderal Suharto sebagai Panglima Mandala. Presiden Sukarno kemudian memberikan instruksi kepada Panglima Mandala untuk menyelenggarakan operasi militer dengan tujuan mengembalikan wilayah Irian Barat. Operasi militer tersebut rencananya dilakukan dalam 3 fase yaitu infiltrasi (penyusupan pasukan), eksploitasi (serangan terbuka), dan konsolidasi (menegakkan kekuasaan secara penuh di seluruh Irian Barat).

Akan tetapi, sebelum Komando Mandala menyelesaikan ketiga fase tersebut, terjadi sebuah insiden di Laut Aru yang menewaskan Komodor Yos Sudarso beserta awak kapalnya pada 15 Januari 1962. Hal ini menyebabkan ketegangan Indonesia dan Belanda semakin memuncak. Menanggapi situasi tersebut, Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy menunjuk Jaksa Agung Robert F. Kennedy untuk mengadakan pertemuan kedua negara. Kemudian atas prakarsa seorang diplomat Amerika Serikat bernama Ellsworth Bunker diusulkan sebuah penyelesaian damai yang disebut Rencana Bunker. Tindak lanjut dari Rencana Bunker adalah pelaksanaan Persetujuan New York pada 15 Agustus 1962. Persetujuan ini memerintahkan Belanda untuk menyerahkan pemerintahan di Irian Barat kepada penguasa sementara PBB-UNTEA (*United Nations Temporary Executive Authority*) pada 1 Oktober 1962, dan selanjutnya UNTEA harus menyerahkan kepada Indonesia pada 1 Mei 1963 dengan ketentuan Indonesia harus mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) sebelum akhir 1969 (Abdullah, 2012: 425-427).

Pasca perundingan New York, perjuangan pembebasan Irian Barat memasuki tahapan baru yaitu konsolidasi. Dalam konteks ini, konsolidasi diartikan sebagai upaya memperkuat pengaruh dan posisi Indonesia di Irian Barat dalam menghadapi Pepera. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain dengan memperkuat birokrasi, memperbaiki perekonomian dan melakukan pembangunan di Irian Barat. Pepera dimulai pada 14 Juli 1969 di Merauke dan berakhir pada 4 Agustus 1969 di Jayapura. Dewan Musyawarah Pepera dengan suara bulat memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Indonesia. Hasil Pepera kemudian dibawa ke New York untuk dilaporkan dalam sidang umum PBB ke-24. Pada akhirnya seluruh hasil Pepera diterima dalam sidang umum PBB pada 19 November 1969 (Departemen Penerangan RI, 1967: 31-47).

B. Gambaran Arsip Perjuangan Pembebasan Irian Barat 1949-1969

Materi *guide* arsip ini merupakan hasil penelusuran arsip terkait dengan perjuangan pembebasan Irian Barat 1949-1969 dalam daftar dan inventaris arsip yang tersedia pada unit layanan arsip. Hasil penelusuran telah mengidentifikasi jenis arsip yang memiliki informasi tentang perjuangan pembebasan Irian Barat 1949-1969 yaitu arsip tekstual/arsip kertas, arsip foto, dan arsip film.

Arsip tekstual yang memiliki informasi tentang perjuangan pembebasan Irian Barat 1949-1969 berjumlah 419 nomor arsip yang terdapat dalam khazanah arsip Sekretariat Negara yang tersusun dalam Inventaris Arsip Kabinet Presiden Republik Indonesia Serikat 1949-1950, Inventaris Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri 1950-1959, Inventaris Arsip Kabinet Presiden RI 1950-1959, Daftar Arsip Pidato Presiden RI 1958-1967 (Sukarno), Inventaris Arsip Delegasi Indonesia 1947-1951, Daftar Arsip Sekretariat Negara RI: Seri Produk Hukum 1949-2005. Informasi tentang perjuangan pembebasan Irian Barat 1949-1969 juga terdapat dalam khazanah arsip perseorangan yang tersusun dalam Inventaris Arsip Lambertus Nicodemus Palar 1928-1981, Inventaris Arsip Abdul Wahab Soerdjoaningrat 1946-1973, dan Inventaris Arsip Roeslan Abdul Gani 1959-1976.

Informasi perjuangan pembebasan Irian Barat 1949-1969 berupa arsip foto berjumlah 118 nomor arsip terdapat dalam khazanah arsip Kementerian Penerangan (Kempen), yang tersusun dalam Daftar Arsip Kempen Aceh 1947-1965, Sumatera Utara 1950-1955, Sumatera Selatan 1950-1967, Jawa Tengah 1950-1965, Irian Barat 1957-1964, DI Yogyakarta 1950-1965. Sementara untuk arsip film berjumlah 41 nomor arsip terdapat dalam khazanah arsip Perusahaan Film Negara (PFN) yang tersusun dalam Daftar Arsip Pusat Produksi Film Negara (PPFN). Isi informasi dalam arsip ini mengenai usaha-usaha untuk membebaskan Irian Barat yang dilakukan pemerintah Indonesia mulai dari diplomasi politik, konfrontasi politik, konfrontasi ekonomi, konfrontasi militer hingga konsolidasi dan Pepera.

Selain terdapat dalam khazanah arsip statis yang terdapat di ANRI, arsip mengenai konfrontasi militer juga tersimpan di Pusat Sejarah Tentara Nasional Indonesia, antara lain mengenai Staf Gabungan Mandala dan perencanaan operasi militer. Di Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain mengenai pelaksanaan Trikora dan pembangunan di Irian Barat.

C. Penyusunan *Guide* Arsip Perjuangan Pembebasan Irian Barat 1949-1969

Penyusunan *Guide* Arsip Perjuangan Pembebasan Irian Barat 1949-1969 merupakan kegiatan Unit Sub Direktorat Pengolahan Arsip I, Direktorat Pengolahan pada tahun anggaran 2016, yang dilakukan oleh tim kerja dengan keanggotaan sebagai berikut: Azmi (Penanggung Jawab Kegiatan), Retno Wulandari (Penanggung Jawab Pelaksana Teknis), Widhi Setyo Putro (Koordinator), Yudhi Risti Purnomo (Sekretaris), Bakat Untoro (Anggota), Lola Palmita (Anggota), Suwono (Anggota), Samsudin (Anggota), Ramadhona Aswin (Anggota), Shinta Agustin (Anggota), dan Hasna Fuadilla Hidayati (Anggota).

Proses penyusunan *guide* arsip ini dilakukan mengacu pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis dan SOP-AP Pengolahan, dengan tahapan kerja sebagai berikut:

- 1) Melakukan identifikasi informasi arsip pada daftar arsip dan inventaris arsip yang memiliki kaitan dengan usaha perjuangan pembebasan Irian Barat. Identifikasi meliputi pencipta arsip (*provenance*), periode arsip, dan jenis media arsip.
- 2) Menyusun rencana teknis yang berisi rincian waktu, tahapan kerja, sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan biaya.
- 3) Melakukan penelusuran sumber arsip melalui daftar dan inventaris arsip yang tersedia di ruang layanan arsip sebagai bahan penyusunan *guide* arsip. Pada tahap ini juga dilakukan pengumpulan sumber sekunder di Museum Sejarah TNI, Perpustakaan Nasional di Jakarta, Museum Mandala (Pembebasan Irian Barat) di Makassar, dan publikasi lainnya melalui jaringan internet. Maksud dan tujuan melakukan penelusuran referensi ini adalah untuk memberikan gambaran secara lengkap tentang sejarah perjuangan pembebasan Irian Barat berdasarkan sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya serta dipertanggungjawabkan keabsahannya.
- 4) Melakukan penulisan *guide* arsip, yang dilakukan setelah semua data dan informasi terkumpul dengan skema penulisan sebagai berikut:
 - a. Judul yaitu *Guide* Arsip Perjuangan Pembebasan Irian Barat 1949-1969
 - b. Kata pengantar;

- c. Daftar isi;
- d. Pendahuluan, meliputi latar belakang, gambaran arsip perjuangan pembebasan Irian Barat, penyusunan *guide* arsip, dan petunjuk penggunaan *guide* arsip;

Latar belakang menceritakan secara umum permasalahan Irian Barat yang dimulai sejak 1949 hingga 1969 beserta usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk merebut Irian Barat.

Gambaran arsip menjelaskan judul *finding aids* dan media apa saja yang memiliki informasi mengenai perjuangan pembebasan Irian Barat. Dijelaskan pula mengenai jumlah nomor arsip yang diuraikan dalam *guide* arsip ini.

Penyusunan *guide* arsip menjelaskan dasar pengerjaan, tim penyusun, dan tahapan penyusunan dari *Guide* Arsip Perjuangan Pembebasan Irian Barat. Petunjuk penggunaan *guide* arsip menjelaskan bagaimana cara mengakses arsip dengan menggunakan *guide* arsip ini.

- e. Deskripsi informasi arsip, meliputi deskripsi arsip dalam daftar dan inventaris arsip yang terkait dengan perjuangan pembebasan Irian Barat. Informasi dalam *guide* arsip ini dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok yang didasarkan pada bentuk usaha dalam perjuangan pembebasan Irian Barat. Usaha-usaha tersebut yaitu Diplomasi Politik, Konfrontasi Politik-Ekonomi, Konfrontasi Militer, Konsolidasi dan Penentuan Pendapat Rakyat. Informasi selanjutnya dikelompokkan berdasarkan jenis arsip, yaitu arsip tekstual, foto, dan arsip film;
- f. Indeks, penyusunan indeks terdiri indeks nama, tempat, dan istilah yang terdapat di dalam deskripsi informasi arsip;
- g. Daftar singkatan, penulisan daftar singkatan dikutip dari deskripsi informasi arsip pada *guide* arsip ini.

- 5) Melakukan verifikasi fisik dan informasi arsip statis di depot, yaitu dengan cara mencocokkan informasi yang tertuang di deskripsi informasi dengan fisik arsip yang tersimpan di depot. Selain itu verifikasi juga dilakukan untuk memastikan bahwa deskripsi informasi sudah sesuai dengan kelompoknya.

- 6) Melakukan penilaian dan penelaahan terhadap isi materi dan redaksi *guide* arsip untuk mendapatkan masukan dan koreksi dari Direktur Pengolahan selaku penanggung jawab kegiatan. Draf *guide* arsip yang telah disempurnakan kemudian ditandatangani oleh Direktur Pengolahan sebagai tanda pengesahan.
- 7) Melakukan publikasi dan distribusi. *Guide* Arsip Perjuangan Pembebasan Irian Barat 1949-1969 kemudian dicetak dan diperbanyak untuk selanjutnya didistribusikan ke Subdit Layanan Arsip dan Subdit Penyimpanan Arsip.

D. Petunjuk Penggunaan *Guide* Arsip Perjuangan Pembebasan Irian Barat 1949-1969

Untuk dapat mengakses arsip dengan menggunakan *guide* arsip ini, pengguna cukup mencatat nama daftar atau inventaris arsip beserta nomor arsipnya di formulir peminjaman arsip yang tersedia di ruang baca. Untuk arsip tekstual dan foto, nomor arsip terdapat pada akhir setiap uraian informasi.

Contoh untuk arsip tekstual:

Sekretariat Negara: Kabinet Perdana Menteri 1950-1959

Surat dari Ketua Panitia Rakyat Balangan kepada Perdana Menteri mengenai resolusi rapat raksasa Panitia Pembela Irian Barat di Raringin. 24 - 25 Desember 1951, asli, 2 lembar (No.1943)

Pengguna hanya menuliskan **Sekretariat Negara: Kabinet Perdana Menteri 1950-1959, No. 19431.**

Contoh untuk arsip foto:

Kementerian Penerangan Wilayah Irian Barat Tahun 1957-1964

Pidato penguasa Dr. Djalal Abdoh ketika penyerahan wilayah Irian Barat dari UNTEA ke RI di Kotabaru. (No. 63-4441)

Pengguna hanya menuliskan **Kementerian Penerangan Wilayah Irian Barat Tahun 1957-1964 , (No. 63-4441)**

Khusus untuk arsip film, selain menulis nama daftar atau inventaris arsip, pengguna juga perlu mencantumkan judul film dan nomor peminjaman.

Contoh untuk arsip film:

Daftar Arsip PPFN: Kelompok Film Newsreels Gelora Indonesia

Judul : Gelora Indonesia
Nomor : 492
Format : Roll Film 35 mm
Durasi : 09.53 menit
Warna : Hitam Putih
Narasi : Bahasa Indonesia
Produksi : PPFN
Tahun Produksi : 1962
No. Peminjaman : DVD 415-2010
Sinopsis :

Wampa Koordinator Irian Barat, Menteri Luar negeri Soebandrio tiba di Bandara Kemayoran setelah melakukan diplomasi di PBB mengenai wilayah Irian Barat. Masalah Irian barat segera berakhir dan PBB siap membantu.

Pengguna hanya menuliskan **PPFN: Gelora Indonesia, No: DVD 415-2010**

Untuk memudahkan penemuan informasi dalam *guide* arsip ini, pengguna juga dapat melihat indeks yang terdiri dari indeks nama (orang dan organisasi), wilayah dan istilah. Indeks mengacu pada nomor *guide* arsip dalam uraian deskripsi informasi arsip.

II. DESKRIPSI INFORMASI ARSIP

A. Diplomasi Politik

1. Abstrak



Gambar 1

Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta sedang memberikan kata sambutan pada acara pembukaan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, 23 Agustus 1949
Sumber: IPPHOS 1945 – 1950 (No. 1357)

Diplomasi adalah proses politik damai antar negara dengan tujuan membentuk sebuah struktur dan mengatur hubungan sistem internasional agar mengakomodasi kepentingan suatu negara (Diamond, 1996: 26). Dalam perjuangan pembebasan Irian Barat, langkah awal yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu dengan menggunakan diplomasi politik. Bentuknya antara lain melakukan perundingan bilateral dengan Belanda dan mencari dukungan politik dalam pertemuan-pertemuan internasional seperti KAA, GNB dan PBB.

Bentuk-bentuk perjuangan pembebasan Irian Barat melalui diplomasi politik terekam dalam setiap deskripsi arsip yang ditampilkan pada bagian ini. Terdapat 119 nomor arsip dari 13 daftar dan inventaris arsip tekstual, 8 nomor arsip dari 1 inventaris arsip foto, 2 nomor arsip dari 1 daftar arsip film yang memiliki informasi

mengenai perjuangan melalui diplomasi politik untuk merebut Irian Barat. Informasi tersebut antara lain mengenai jalannya perundingan dengan Belanda di KMB, Konferensi Menteri-Menteri Uni Indonesia-Belanda dan Konferensi Irian terdapat dalam Inventaris Arsip Delegasi Indonesia 1947-1951 (arsip tekstual) dan Inventaris arsip *Indonesian Press Photo Service* (IPPHOS) 1945-1950 (arsip foto).

Sementara itu, informasi mengenai pengiriman delegasi Indonesia dan jalannya Sidang Umum PBB terdapat dalam Inventaris Arsip Kabinet Perdana Menteri 1950-1959, Inventaris Arsip Kabinet Presiden RI 1950-1959, Daftar Arsip Sekretariat Negara RI: Seri Produk Hukum 1949-2005, Inventaris Arsip Lambertus Nicodemus Palar 1928-1981, Inventaris Arsip Roeslan Abdul Gani 1950-1976 (arsip tekstual) dan Daftar Arsip PPFN: Kelompok Film Newsreels Gelora Indonesia (arsip film). Informasi mengenai pidato Presiden Sukarno pada Sidang Umum PBB XV dan KTT Non Blok terdapat dalam Daftar Arsip Pidato Presiden RI 1958-1967 dan Inventaris Arsip Komando Operasi Tertinggi (KOTI) 1963-1967 (arsip tekstual). Berikut ini adalah deskripsi arsip dalam beberapa khazanah arsip statis di ANRI yang memuat informasi arsip terkait dengan perjuangan pembebasan Irian Barat melalui diplomasi politik:

2. Arsip Tekstual

a. Inventaris Arsip Delegasi Indonesia 1947-1951

- 1) Latumenten kepada Sekretariat Delegasi Indonesia: Telegram, TT +1949 tentang pembukaan KMB oleh Wakil Presiden Hatta. Asli, 1 lembar. (No.1186)
- 2) Moh. Hatta kepada Ketua Seksi-seksi: Surat, TT + 1949 tentang kesulitan pada KMB agar seksi-seksi memberitahukan tentang pendirian kita, BFO dan Belanda. Pertinggal, 1 lembar. (No.1187)
- 3) Delegasi Indonesia: Daftar, TT +1949 tentang anggota-anggota, penasehat, ahli delegasi Indonesia dalam *Round Table Conference*. Salinan, 1 sampul. (No.1188)
- 4) Delegasi Indonesia kepada Mr. Moh. Roem: Surat, 26 Juli 1949 tentang penyelesaian surat UNCI sehubungan kepergian Delegasi Indonesia ke KMB; disertai lampiran. Pertinggal, 1 sampul. (No.1190)

- 5) Delegasi Indonesia di S'Gravenhage kepada Delegasi Indonesia Jakarta: Telegram, 21 Agustus 1949 tentang anggota-anggota panitia dalam KMB. Asli, 1 lembar. (No.1194)
- 6) Delegasi Indonesia di S'Gravenhage kepada Delegasi Indonesia Jakarta; Telegram, 3 September 1949 tentang perundingan masih tetap pertemuan informal dan pembentukan panitia-panitia. Salinan, 3 lembar. (No.1197)
- 7) Badan Eksekutif Kab. Bogor: Resolusi, 12 September 1949 tentang desakan kepada Pemerintah RI untuk mempertahankan hasil perjuangan, tidak memberikan konsesi kepada Belanda. Salinan, 1 lembar. (No.1198)
- 8) C.H Salawati kepada Delegasi Indonesia: Laporan, 14 Oktober 1949 tentang rapat rahasia di rumah Raja Gowa, oleh dua orang Belanda dan Raja lainnya di Sulawesi Selatan, yang akan mengadakan pembunuhan dan penculikan terhadap pemimpin nasional, rakyat pemuka, polisi, dan militer apabila KMB berhasil. Salinan, 1 lembar. (No.1209)
- 9) Delegasi Indonesia: Agenda surat-surat tentang panitia KMB tahun 1949. Asli, 1 sampul. (No.1213)
- 10) Delegasi Indonesia kepada Sekjen RTC (*Round Table Conference*): Surat 6 Oktober 1949 tentang soal-soal yang berhubungan dengan Nieuw Guinea; disertai lampiran. Stensilan, 1 sampul. (No.1243)
- 11) Sekretaris Jenderal Uni Indonesia-Nederland: Surat Keputusan, 10 Januari 1951 tentang uang harian kepada anggota-anggota Komisi Irian. Asli, 2 lembar. (No.1304)
- 12) Interm Report misi perundingan Prof. Dr. Soepomo dalam rangka perundingan Uni Indonesia-Belanda. Januari 1950, stensilan, 1 sampul. (No.1357)
- 13) Sekjen Uni Indonesia-Nederland kepada Soepomo: Surat, 27 Maret 1950 tentang Sekretariat Uni telah menunjuk Sdr. Moh. Jahja untuk menghadiri rapat yang merundingkan soal Irian. Perteinggal, 1 lembar. (No.1495)

- 14) Delegasi Indonesia: Laporan singkat pandangan Konferensi Menteri Nederland-Indonesia Uni (*welkgroep II*) mengenai Irian, 28 Maret 1950 di Gedung Dewan Menteri. Stensilan, 4 lembar. (No.1496)
- 15) Ketua Delegasi Indonesia dengan Ketua Delegasi Nederland: Surat-menyerat, 1 April 1950 tentang misi negara RIS ke Irian (Nieuw Guinea). Asli, 4 lembar. (No.1497)
- 16) Delegasi Indonesia: Keputusan-keputusan Konferensi Menteri-menteri Uni Indonesia-Nederland yang ke I mengenai Irian (Nieuw Guinea). 1 April 1950, asli, 1 sampul. (No.1498)
- 17) Telegram Unie Sec. Den Haag kepada Sekretaris Delegasi Indonesia (Uni Indonesia-Nederland) tentang Irian. April-Agustus 1950, asli, 1 sampul. (No.1500)
- 18) Delegasi Indonesia: Naskah materi pembicaraan Konferensi Irian (*Nieuw Guinea Conferensie*) 4-27 Desember 1950 di Treveszaal's-Gooveuhage. Stensilan, 1 sampul. (No.1505)

b. Inventaris Arsip Kabinet Perdana Menteri RI Jogjakarta 1949-1950

- 19) Notulen Sidang Kabinet VII yang ke-1 s.d. 52 pada tanggal 25 Januari-15 Agustus 1950 disertai program politik. Januari-Agustus 1950, stensilan, 1 bundel. (No. 58)
- 20) Seri risalah rapat DPR RIS yang ke: 26, 27, 47, 48, 49, 50, 59, 61 disertai surat pengantar. Juli, Agustus 1950, asli, stensian, 1 bundel. (No. 119)

c. Inventaris Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri 1950-1959

- 21) Keputusan Perdana Menteri No.8/PM/1950 tentang pembentukan suatu panitia adhoc yang bertugas merencanakan tindakan-tindakan pemerintah dalam melaksanakan pasal 7 program Kabinet Natsir terkait Keresidenan Irian barat. 14 dan 18 Oktober 1950, asli, 2 lembar. (No. 1580)
- 22) Laporan Panitia Negara Khusus tentang peninjauan persetujuan-persetujuan seperti Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia-Nederland. 11 Mei 1951, asli, 1 sampul. (No.1593)

- 23) SK Presiden RI tentang pembentukan Panitia Negara untuk merancang perjanjian-perjanjian internasional biasa Indonesia dan Belanda untuk mengganti persetujuan KMB. 27 Oktober 1951, salinan, 1 lembar. (No.1596)
- 24) Berkas mengenai catatan lengkap upacara timbang terima pemerintah dari Kabinet Sukiman kepada Kabinet Wilopo pada tanggal 3 April 1952. 1 April 1952, asli, 1 sampul. (No. 1600)
- 25) Laporan mengenai keterangan pemerintah atas program Kabinet Ali Sastroamidjojo. 25 Agustus 1953, fotokopi, 1 sampul. (No. 1633)
- 26) Berkas mengenai Susunan dan Program Kerja Kabinet Juanda. 9 April 1957-Juli 1959, asli, 1 sampul. (No. 1663)
- 27) Surat dari Kepala Penerangan Luar Negeri kepada Perdana Menteri mengenai turunan kawat Kepala *Information Service Indonesia* (ISI) Den Haag tentang Irian Barat. Nb. Bahasa Belanda. 19 dan 29 November 1951, asli, 4 lembar. (No.1940)
- 28) Berkas kawat sandi Kementerian Luar Negeri mengenai perundingan Irian Barat di Den Haag. 2 Desember 1951-26 Januari 1952, salinan, 1 sampul. (No.1941)
- 29) Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Direktur Kabinet Presiden mengenai Rancangan Keputusan Presiden RI tentang perpanjangan waktu perundingan soal Uni Indonesia-Belanda, KMB dan Irian Barat. 25 Februari 1953, pertinggal, 3 lembar. (No.1945)
- 30) Pidato Mr. Ali Sastroamidjojo di depan Panitia 4 Sidang Umum PBB mengenai sikap Indonesia terhadap laporan Belanda mengenai Irian dan keadaan sosial dan perkembangan daerah-daerah yang tidak berpemerintahan sendiri. 5 Maret 1954, pertinggal, 1 sampul. (No.1946)
- 31) Laporan Mr. Sudjarwo mengenai permasalahan Irian Barat di Sidang Umum IX PBB. 30 November 1954, fotokopi, 1 sampul. (No.1948)
- 32) Berkas Berita Antara dan *United Press* mengenai persoalan Irian Barat di Sidang Umum PBB. 10-11 Desember 1954, pertinggal dan salinan, 8 lembar. (No.1949)

- 33) Memo dari Kepala Direktorat PBB dan Organisasi-organisasi Internasional kepada Kementerian Luar Negeri mengenai sikap dan tindakan-tindakan Indonesia terhadap Belanda di konferensi-konferensi internasional, dimana Belanda mewakili Irian Barat (VIDE ECAFE). 14 dan 16 Januari 1958, 4 lembar, fotokopi. (No.1952)
- 34) Berkas mengenai perjuangan Irian Barat di forum internasional. 09-28 Agustus 1958, asli, 1 sampul. (No.1957)
- 35) Berkas mengenai pernyataan sikap Pemerintah Indonesia yang tidak setuju jika perundangan kewarganegaraan Belanda yang dibuat oleh Pemerintah Belanda juga berlaku untuk Irian Barat. 6 Agustus-3 Desember 1952, konsep dan pertinggal, 1 sampul. (No.2069)
- 36) Laporan mengenai kesimpulan Konferensi Genewa antara Menteri Luar Negeri dengan Kepala-Kepala Perwakilan RI di Eropa pada tanggal 5 dan 6 Desember 1956 tentang Irian Barat, Timur Tengah, Hongaria dan Eropa Timur. 11 Desember 1956, pertinggal, 1 sampul. (No.2276)
- 37) Surat-surat jawaban pemerintah atas pandangan DPR babak I mengenai masalah Irian Barat, dengan lampiran. 3 Januari-12 Maret 1951, asli, 1 sampul. (No.3635)
- 38) Berkas mengenai Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR Babak II tentang keterangan dan program Kabinet Ali Sastroamidjojo. 15 Agustus-10 September 1953, salinan, 1 sampul. (No. 3750)
- 39) Risalah perundingan DPR mengenai keterangan pemerintah terkait masalah Irian Barat. 28 Februari 1958, fotokopi, 2 lembar. (No.3780)
- 40) Naskah Keterangan Pemerintah tentang "Pembentukan dan Program Kabinet Kerja" yang diucapkan oleh Presiden Soekarno dalam rapat pleno terbuka DPR. 24 Juli 1959, fotokopi, 1 sampul. (No. 3792)

**d. Inventaris Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri 1950-1959
Jilid II**

- 41) Berkas mengenai putusan rapat Kabinet Sukiman ke-2 s/d 57 dan catatan rapat ke-75 Kabinet Sukiman (demisioner). 8 Mei 1951-17 Juni 1952, fotokopi, 1 sampul. (No. 777)

- 42) Berkas mengenai putusan-putusan rapat Kabinet Wilopo ke-64 s.d 113. 23 Desember 1952-4 Agustus 1953, pertinggal, 1 sampul. (No. 798)
- 43) Berkas keterangan pemerintah tentang program Kabinet Burhanuddin Harahap mengenai hubungan luar negeri dan pelaksanaan pemilu. 21 September-3 Oktober 1955, pertinggal, 1 sampul. (No. 831)
- 44) Surat-surat dari Komisariss Belanda di Indonesia dan Menteri Keuangan tentang pembayaran antara Indonesia dan Irian untuk dibicarakan dalam rapat Dewan Menteri. Nb: arsip ada yang berbahasa Belanda. 12 Mei 1950-29 April 1952, salinan, 1 sampul. (No.1139)
- 45) Kawat sandi dari Den Haag kepada Menteri Luar Negeri mengenai perundingan tentang Irian Barat. 7 Januari 1952, asli, 2 lembar. (No.1145)
- 46) Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Menteri Penerangan mengenai usul Kementerian PP&K terkait nota rahasia soal Australia-Irian Barat. 12 September 1952, tembusan, 5 lembar. (No.1147)
- 47) Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai laporan rapat tertutup *Hoge Commissariaat* Belanda tentang masalah dalam negeri, Irian Barat, dll. 28 Januari 1953, asli, 3 lembar. (No.1148)
- 48) Surat-surat mengenai pendapat tentang politik bebas Indonesia menyangkut Irian Barat. 28 Januari-8 Juli 1953, asli, 8 lembar. (No.1149)
- 49) Laporan dari M. Yamin mengenai hasil-hasil pekerjaan Missi-Supomo 1952 dan sengketa Irian Barat. 29 Juni dan 3 Juli 1954, fotokopi, 1 sampul. (No.1151)
- 50) Berkas mengenai perundingan tentang Irian Barat dalam sidang PBB. 11 Desember 1954-19 November 1957, salinan, pertinggal, 1 sampul. (No.1155)
- 51) Pertanyaan anggota DPR tentang masalah Irian Barat di PBB. 21 September 1956-24 Oktober 1957, asli, salinan, 1 sampul. (No.1159)
- 52) Memo dari Kementerian Luar Negeri kepada Perdana Menteri mengenai sikap Belanda yang seperti mewakili Irian Barat dalam konferensi-konferensi internasional. 14 Januari 1958, asli, 7 lembar. (No.1164)

- 53) Berkas mengenai jawaban pemerintah tentang perjuangan Irian Barat dalam rapat pleno DPR. 10 dan 11 Februari 1958, fotokopi, 1 sampul. (No.1165)
- 54) Berkas mengenai keikutsertaan RI dalam Sidang Umum PBB di Paris dan New York. 25 Mei 1951-17 September 1957, asli, 1 sampul. (No. 1174)
- 55) Surat-surat mengenai jawaban pemerintah dalam Pemandangan Umum DPR RI babak I dan II mengenai Program dan Keterangan Kabinet Wilopo dan politik luar negeri Indonesia. 27 Mei-17 Oktober 1952, asli, 1 sampul. (No. 2273)
- 56) Surat-surat mengenai jawaban pemerintah tentang Program Kabinet Ali Sastroamidjojo. 10 Agustus 1953-17 Mei 1956, asli, tembusan, 1 sampul. (No. 2287)
- 57) Berkas Jawaban pemerintah atas pandangan DPR babak I dan II mengenai keterangan pemerintah tentang Program Kabinet. 22 Oktober 1955-31 Mei 1957, asli, pertinggal, tembusan, 1 sampul. (No. 2311)

e. Inventaris Arsip Kabinet Presiden RI 1950-1959

- 58) Kabinet Presiden RI: Surat-surat tanggal 4 Agustus 1951, 16 Februari 1955 tentang pengiriman uang untuk dana Irian. Asli, 2 lembar. (No.253)
- 59) Kabinet Presiden RI: Surat-surat tanggal 1951-1956 tentang perundingan Indonesia-Belanda. Asli, 1 sampul. (No. 425)
- 60) Kementerian Luar Negeri: Telegram tanggal 27 Agustus-18 Desember 1951 tentang perundingan Uni Indonesia Nederland, disertai surat pengantar. Turunan, 7 lembar. (No. 442)
- 61) Kabinet PM kepada Presiden RI: Surat tanggal 17 Juni 1952 tentang misi Supomo dalam perundingan RI-Belanda. Asli, 1 sampul. (No. 460)
- 62) Kabinet Perdana Menteri: Laporan Pemerintah Belanda 16 Februari 1953 tentang Irian yang dimajukan Pemerintah Belanda ke PBB, disertai surat. NB: arsip sedikit rusak. Stensilan, 1 sampul. (No.479)

- 63) *Missi Goodwill Indonesia*: Laporan-laporan tanggal 30 April 1954, 30 November 1955 ke Timur Tengah dan Australia, disertai pengantar. Asli, 1 sampul. (No. 502)
- 64) Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Luar Negeri: Surat tanggal 8 November 1956 tentang pengiriman delegasi Indonesia ke sidang Majelis Umum PBB ke-11 tahun 1956 di New York, dengan lampiran. Tembusan, 1 sampul. (No 563)
- 65) Kepala Perutusan Tetap RI di PBB kepada Presiden RI: Surat tanggal 14 Juni 1957 tentang memorandum Irian Barat di PBB, dengan lampiran. 14 Juni 1957, asli, 5 lembar. (No.576)
- 66) Kepala Kantor Urusan Pegawai: Surat Edaran tanggal 25 April 1951 tentang berakhirnya ikatan dinas terbatas yang pada waktu penyerahan kedaulatan berdiam di Irian. Stensilan, 1 lembar. (No.1055)
- 67) Perdana Menteri RI: Surat Keputusan No.9/P.M/1950, tanggal 14 Oktober 1950 tentang pembentukan suatu panitia teknis yang berkewajiban menyiapkan segala usaha Pemerintah yang akan dilaksanakan berhubung dengan hasil-hasil perundingan mengenai masalah kedudukan kenegaraan Karesidenan Irian Barat. Salinan, 5 lembar. (No.1247)
- 68) Sekretaris Dewan Menteri kepada Kabinet Presiden RI: Laporan, tanggal 31 Oktober 1950 tentang susunan jawaban pemerintah dan perundangan umum babakan II DPR atas program Kabinet Natsir, dengan lampiran. Asli, 1 sampul. (No. 1250)
- 69) Putusan-putusan rapat Kabinet Sukiman tahun 1951-1952. 28 Februari 1951-27 Maret 1952, asli, 1 sampul. (No. 1261)
- 70) Kabinet Perdana Menteri kepada Presiden: Surat-surat tentang putusan-putusan rapat Kabinet Wilopo, dengan lampiran. 8 april 1952-16 November 1954, asli, 1 sampul. (No. 1312)
- 71) Sekretaris Dewan Menteri: Risalah sementara rapat tanggal 7 Oktober 1955 tentang program Kabinet Burhanuddin Harahap. Stensilan, 1 sampul. (No. 1396)

- 72) Putusan-putusan rapat Kabinet Juanda Bulan Agustus dan September. 12-22 September 1958, asli, 10 lembar. (No. 1461)
- 73) Delegasi Indonesia di New York kepada Presiden RI: telegram tanggal 24 September-11 Desember 1954 tentang masalah Irian Barat. asli, 10 lembar. (No. 1920)
- 74) BPP Legiun Veteran RI kepada Presiden Naser, PM Nehru, Worlvet Paris: Telegram tanggal 12-13 Desember 1957 tentang permohonan untuk menutup wilayah yang dilalui Belanda dalam usaha menjajah dan agresi ke Indonesia. Tembusan, 4 lembar. (No. 2112)
- 75) Kabinet Presiden: Surat 19-30 November 1957 tentang jawaban Presiden kepada Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru mengenai Irian Barat, dengan lampiran. NB: dalam bahasa Inggris. Salinan, 8 lembar. (No.2118)

f. Inventaris Arsip Kabinet Presiden Republik Indonesia Serikat 1949-1950

- 76) Berkas Panitia Negara tetap untuk menyelesaikan masalah kedudukan kenegaraan Karesidenan Irian (Nieuw Guinea), 1 Januari-1 November 1950. Stensilan, 1 sampul. (No.151)
- 77) Presiden Republik Indonesia Serikat: Keputusan tanggal 10 Februari 1950 tentang pengangkatan anggota-anggota panitia meninjau soal pegawai negeri yang berasal dari Irian. Salinan, 1 lembar. (No.355)

g. Daftar Arsip Sekretariat Negara RI: Seri Produk Hukum 1949-2005

- 78) Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 59 tahun 1950 tentang Pengangkatan Mr. A.K. Pringgodigdo dan Mohammad Jahya masing-masing diangkat menjadi Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Uni Indonesia-Belanda. 9 Februari 1950, asli, 1 lembar. (No. 4611)
- 79) Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 145 Tahun 1950 tentang Pembentukan Panitia Negara Tetap dengan nama "Panitia Irian" yang bertugas untuk menyiapkan segala sesuatu yang dipandang penting untuk atau bertalian dengan pelaksanaan Program Politik Pemerintah Republik Indonesia Serikat mengenai status Karesidenan Irian (Nieuw

- Guinea) dan merundingkan dengan Pemerintah Kerajaan Nederland dan para wakil pemerintah itu di Indonesia dan Irian segala sesuatu yang bersangkutan dengan penyelesaian soal Irian tersebut. 6 April 1950, asli, 2 lembar. (No. 4696)
- 80) Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Waktu Perundingan Mengenai Uni Indonesia Belanda, Persetujuan KMB, serta Irian Barat bagi Perutusan Pemerintah Republik Indonesia di Nederland. 10 Maret 1953, asli, 1 lembar. (No.5303)
- 81) Keputusan Presiden Nomor 184 Tahun 1954 tentang Pengiriman Delegasi Untuk Menghadiri Sidang Biasa ke-IX Dari Persidangan umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. 22 September 1954, asli, 4 lembar. (No. 5640)
- 82) Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 1956 tentang Pengiriman Delegasi Indonesia Untuk Sidang Biasa Ke-XI Persidangan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Di New York. 9 November 1956, asli, 6 lembar. (No. 5908)
- 83) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1957 tentang Penambahan Anggota-Anggota Penasehat Delegasi Republik Indonesia Ke Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa Ke XI di New York. 14 Febrauri 1957, asli, 3 lembar. (No. 5949)
- 84) Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 1957 tentang Penetapan Mr. Ali Sastroamidjojo Pejabat Perwakilan Luar Negeri Kelas I (F/VII, P.G.P.N.1955) Sebagai Duta Besar Istimewa dengan tugas Berusaha menambah pengertian di negara-negara Amerika Selatan tentang perjuangan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dan berusaha memelihara dan memperkokoh solidariteit negara Asia dan Afrika. 17 Juni 1957, asli, 2 lembar. (No. 6081)
- 85) Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1957 tentang Pengiriman Delegasi Pemerintah Republik Indonesia untuk Menghadiri Sidang Biasa Ke-XII dari Persidangan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. TT, asli, 5 lembar. (No. 6122)

- 86) Keputusan Presiden Nomor 205 Tahun 1957 tentang Pemanggilan Ketua Delegasi Pemerintah Indonesia Beserta Sekretaris Pribadinya yaitu Dr. Subandrio dan Mohd. Chusin untuk Memberikan Laporan dari Hasil Perundingan Politik di PBB Berhubung Dimasukkannya Soal Irian Barat ke dalam Agenda Sidang Umum PBB yang Ke-XII Tahun 1957 kepada Pemerintah Republik Indonesia. 12 November 1957, asli, 2 lembar. (No. 6148)

h. Inventaris Arsip Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

- 87) Berkas Panitia Konferensi Meja Bundar tanggal 26 Agustus-6 September 1949. 26 Agustus-6 September 1949, stensilan, 1 sampul. (No. 1131)
- 88) Laporan tanggal 10 September 1949 tentang pembicaraan-pembicaraan dalam KMB sampai tanggal 9 September 1949. 10 September 1949, pertinggal, 5 lembar. (No. 1133)

i. Daftar Arsip Pidato Presiden RI 1958-1967

- 89) Pidato Presiden pada pembukaan Konferensi Dewan Solidaritas Asia Afrika di Bandung. 10 April 1961, stensilan, 6 lembar. (No.294)
- 90) Pidato Presiden di hadapan Dewan Permasalahan Dunia di Los Angeles. 21 April 1961, stensilan, 1 sampul. (No.298)
- 91) Pidato Presiden di hadapan Sidang KTT Non Blok di Beograd. 01 September 1961, stensilan, 1 sampul. (No.333)

j. Inventaris Arsip Komando Operasi Tertinggi (KOTI) 1963-1967

- 92) Pidato Presiden Soekarno dalam Sidang Majelis umum PBB ke XV. 30 September 1960, fotokopi, 1 sampul. (No. 2)
- 93) Laporan perincian pidato Presiden Soekarno dalam sidang ke-15 Majelis Umum PBB di New York. 30 September 1960, salinan, 6 lembar. (No. 80)
- 94) Berkas mengenai pidato Presiden Soekarno di hadapan sidang KTT Non Blok di Beograd, 1 September 1961. (Terdapat pula hasil-hasil dari KTT Non Blok). 13 September 1961, kopi, 1 sampul. (No. 86)

- 95) Keputusan sidang-sidang DPA mengenai Pembebasan Irian Barat 1962. 31 Desember 1962, salinan, 1 sampul. (No. 90)

k. Inventaris Arsip Lambertus Nicodemus Palar 1928-1981

- 96) *Representative RI on United Nations*: Pidato (1952) tentang masalah Irian Barat. Stensilan, 1 sampul. (No.115)
- 97) L. N. Palar: Draft tanggapan dan analisis terhadap Delegasi Nederland mengenai resolusi 9 Oktober 1961 dan memorandum mengenai Irian Barat. Konsep, 1 sampul. (No.151)
- 98) *Secretary of States for External Affairs* Canada kepada L.N. Palar, Perwakilan Tetap RI di PBB: Surat, 23 Oktober 1961 tentang memorandum mengenai West New Guinea (Irian Barat). Asli, 1 lembar. (No.153)
- 99) L.N. Palar: Memorandum, (1961) tentang Irian Barat. Stensilan, 1 sampul. (No.159)
- 100) L.N. Palar: Memorandum, Oktober 1961 tentang West Irian. Konsep, 5 lembar. (No.161)
- 101) Wakil Tetap Republik Indonesia di PBB: Komentar-komentar Delegasi Belanda mengenai Irian Barat. (1961) bahasa Inggris. Stensilan, 5 lembar. (No.162)
- 102) L.N. Palar: Memorandum, (1961) tentang *West Irian and Indonesian nationhood*. Stensilan, 8 lembar. (No.163)
- 103) *The Atlantic*: Laporan, 21 Juni 1963 tentang West New Guinea. Stensilan, 1 lembar. (No.164)
- 104) *Permanent Refresentative Mission RI to the United Nations*: Statement, 06 November 1963 tentang perjanjian antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda mengenai West Guinea, dalam *Plenary Meeting*. Stensilan, 1 sampul. (No.206)
- 105) *Permanent Representative Mission RI to the United Nations*: Statement L.N. Palar di *United Nations* pada tahun 1963 dalam debat umum session ke-18, *General Assembly*, mengenai Malaysia, China, dan Irian Barat. Stensilan, 2 bundel. (No.211)

- 106) L.N. Palar: Laporan, 21 Desember 1954 tentang tugas yang dibebankan oleh L.N. Palar dalam soal Irian Barat di PBB. Peninggal, 10 lembar. (No.299)
- 107) Perwakilan Tetap Indonesia di PBB kepada Kedubes RI di India: Surat, 10 Agustus 1955 tentang penjelasan atas memorandum mengenai Irian Barat. Stensilan, 1 sampul. (No.302)

I. Inventaris Arsip Abdul Wahab Soerdjoaningrat 1946-1973

- 108) Kabinet Perdana Menteri: Surat disertai lampiran tentang putusan-putusan rapat Dewan Menteri ke-1 s.d. ke-47. 21 Maret 1951, pertinggal, 1 sampul. (No. 19)
- 109) Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden: Surat-surat tentang putusan Rapat Istimewa Kabinet Sukiman dari tanggal 15 Agustus 1951-19 Februari 1952. 21 Agustus 1951-19 Februari 1952, tembusan, 1 sampul. (No. 21) (Informasi tambahan: terkait Irian Barat terdapat pada putusan rapat tanggal 18 Desember 1951 mengenai pengiriman senjata api oleh Belanda ke Irian Barat)
- 110) Kabinet Perdana Menteri: Surat-surat disertai lampiran tentang putusan-putusan rapat ke-1 s.d. ke-78 Kabinet Sukiman (demosioner) tanggal 30 April 1951-16 Maret 1952. 2 Mei 1951-27 Maret 1952, tembusan, 1 sampul. (No. 22)
- 111) Surat-surat tentang putusan-putusan rapat ke-1 s.d. ke-113 Kabinet Wilopo tanggal 3 April 1952-22 Juli 1953. 7 April 1952-4 Agustus 1953, tembusan, 1 sampul. (No. 25)
- 112) Kumpulan surat disertai lampiran tentang putusan rapat ke-1 s.d. ke-80 Kabinet Ali Sastroamijoyo tanggal 12 Agustus 1953-29 November 1954. 8 September 1953-3 November 1954, pertinggal, 1 sampul. (No. 28)
- 113) Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden: Laporan-laporan putusan rapat ke-65 s.d. ke-68 dan ke-81 s.d. ke-125 Kabinet Ali Sastroamijoyo I. 9 Agustus 1954-22 Juli 1955, pertinggal, 1 sampul. (No. 33)

- 114) Surat-surat tentang putusan-putusan rapat ke-2 s.d. ke-63 Kabinet Ali Sastroamijoyo II tanggal 27 Maret 1956-28 Maret 1957. 21 April 1956-2 April 1957, pertinggal, 1 sampul. (No. 38)
- 115) Sekretaris Dewan Menteri: Surat-surat disertai lampiran tentang putusan-putusan rapat ke-1 s.d. ke-60 Kabinet Juanda. 4 Mei-26 Desember 1957, pertinggal, 1 sampul. (No. 41)
- 116) Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Luar Negeri: Surat-surat disertai lampiran tentang perjuangan pengembalian Irian Barat ke dalam kekuasaan RI dengan jalan damai. 22 Agustus 1957-11 Januari 1958, pertinggal, 1 sampul. (No.42)
- 117) Sekretaris Dewan Menteri: Surat-surat disertai lampiran tentang putusan-putusan rapat ke-61 s.d. ke-140 Kabinet Juanda tanggal 29 November 1957-17 Oktober 1958. 12 Desember 1957-6 November 1958, pertinggal, 1 sampul. (No. 44)
- 118) Sekretaris Dewan Menteri: Surat-surat disertai lampiran tentang putusan-putusan dalam Sidang Pleno ke 1-19 Kabinet Kerja tanggal 13 Juli 1959-27 Oktober 1960 di Bogor. 31 Juli 1959-31 Oktober 1960, pertinggal, 1 sampul. (No. 54)

m. Inventaris Arsip Roeslan Abdul Gani 1950-1976

- 119) Seksi Riset Direktorat V Jawatan Penerangan Kementerian Penerangan: Laporan tanggal 24 Agustus 1957 tentang status Irian Barat dalam perdebatan di PBB. Salinan, 4 lembar. (No.11)

3. Arsip Foto

a. Inventaris Foto *Indonesian Press Photo Service (IPPHOS) 1945-1950*

- *Delegasi RI di KMB Den Haag.*

- 120) Pertemuan yang diadakan oleh delegasi RI untuk merumuskan suatu persoalan yang dibawa ke KMB, 23 Agustus 1949. (No 1353).
- 121) Wakil Presiden Moh. Hatta memberikan sambutan di depan pejabat negara yang hadir, 23 Agustus 1949. (No 1354).

- 122) Wakil Presiden Moh. Hatta sebagai ketua delegasi Republik Indonesia sedang memberikan sambutannya pada saat pembukaan Konferensi Meja Bundar (KMB). 23 Agustus 1949. (No.1355).
- 123) Suasana di Ridderzaal, Den Haag pada saat Konferensi Meja Bundar yang membicarakan tentang masalah Ketatanegaraan Indonesia, 23 Agustus 1949. (No.1356).
- 124) Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta sedang memberikan kata sambutan pada acara pembukaan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, 23 Agustus 1949. (No.1357).
- 125) Suasana saat berlangsungnya Konferensi Meja Bundar di Den Haag, 23 Agustus 1949. (No.1359).

- ***Kunjungan Panitia Irian Barat, 16 Juli 1950.***

- 126) Para anggota Panitia Irian Barat menyampaikan bingkisan tanda setia rakyat Irian Barat kepada Presiden Soekarno [di Istana Merdeka Jakarta]. (No. IPPHOS/1764 - No. Album: 31.10-1).
- 127) Presiden Soekarno sedang melakukan pembicaraan dengan para anggota Panitia Irian Barat di Istana Merdeka Jakarta. (No. IPPHOS/1765 - No. Album: 31.10-2).

4. Arsip Film

a. Daftar Arsip PPFN: Kelompok Film Newsreels Gelora Indonesia

- 128) Judul : Gelora Indonesia
 Nomor : 492
 Format : Roll Film 35 mm
 Durasi : 09.53 menit
 Warna : Hitam Putih
 Narasi : Bahasa Indonesia
 Produksi : PPFN
 Tahun Produksi : 1962
 No. Peminjaman : DVD 415-2010
 Sinopsis :

Wampa Koordinator Irian Barat, Menteri Luar negeri Soebrandrio tiba di Bandara Kemayoran setelah melakukan diplomasi di PBB mengenai wilayah Irian Barat. Masalah Irian barat segera berakhir dan PBB siap membantu.

- 129) Judul : Resolusi Irian Barat Di PBB
Nomor Reel : 1
Format : Roll Film 35 mm
Durasi : 11.09 menit
Warna : Hitam Putih
Narasi : Bahasa Inggris
Produksi : PFN
No. Peminjaman : DVD 224-2010

Sambutan wakil dari Indonesia yang pada prinsip menyatakan Irian Barat adalah bagian dari wilayah negara RI. Sambutan wakil dari Nederland. Pemungutan suara atas Resolusi Irian Barat. Indonesia memenangkan suara. Sambutan dari Ketua Sidang.

B. Konfrontasi Politik dan Ekonomi

1. Abstrak



Gambar 2

Rakyat Tebing Tinggi dan para pelajar dengan bendera merah putih menuntut sebelum matahari terbit Irian Barat harus sudah dipangkuan RI.

Sumber: Kementerian Penerangan Wilayah Sumatera Utara 1950-1955
(No. 501217 AA 12)

Konfrontasi dalam konteks hubungan internasional bisa diartikan sebagai kondisi bermusuhan antara dua negara atau lebih, karena tidak terakomodasinya perbedaan kepentingan di antara negara-negara tersebut. Dalam perjuangan pembebasan Irian Barat, Indonesia menjalankan cara konfrontasi politik, ekonomi, dan militer setelah cara diplomasi politik dianggap belum berhasil. Bentuk konfrontasi politik antara lain pemutusan hubungan Uni Indonesia-Belanda, pembatalan persetujuan KMB, pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan pemutusan hubungan diplomatik dengan pemerintah Kerajaan Belanda. Sedangkan bentuk dari konfrontasi ekonomi antara lain pemogokan dan nasionalisasi perusahaan milik Belanda.

Perjuangan pembebasan Irian Barat melalui konfrontasi politik dan ekonomi terekam dalam setiap deskripsi arsip yang ditampilkan pada bagian ini. Terdapat 122

nomor arsip dari 9 daftar dan inventaris arsip tekstual, 27 nomor arsip dari 4 daftar dan inventaris arsip foto, 1 nomor arsip dari daftar arsip film yang memiliki informasi mengenai perjuangan melalui konfrontasi politik dan ekonomi untuk merebut Irian Barat.

Informasi tersebut antara lain mengenai resolusi menuntut pembatalan perjanjian KMB dan pengembalian Irian Barat, usaha nasionalisasi perusahaan kereta api, tambang minyak, perusahaan listrik dan gas, banyak terdapat dalam Inventaris Arsip Sekretariat Negara: Kabinet Perdana Menteri 1950-1959 (arsip tekstual), Daftar Arsip Foto Kempen Sumatera Utara 1950-1955 dan Jawa Barat 1956 (arsip foto). Informasi mengenai laporan Delegasi Indonesia pada Konferensi Pembubaran Uni Indonesia-Belanda terdapat dalam Inventaris Arsip Kabinet Presiden RI 1950-1959 (arsip tekstual). Informasi mengenai undang-undang tentang pembatalan hubungan Indonesia-Belanda berdasarkan KMB, pembentukan Provinsi Irian Barat, dan nasionalisasi banyak terdapat dalam Daftar Arsip Sekretariat Negara RI: Seri Produk Hukum 1949-2005 (arsip tekstual). Berikut ini adalah deskripsi arsip dalam beberapa khazanah arsip statis di ANRI yang memuat informasi arsip terkait dengan perjuangan pembebasan Irian Barat melalui konfrontasi politik dan ekonomi:

2. Arsip Tekstual

a. Inventaris Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri 1950-1959

- 130) Resolusi dari Pimpinan Rapat Raksasa 1 Mei 1953 di Madiun dan Banyumas mengenai tuntutan pembatalan perjanjian KMB. 1 Mei 1953, asli, 2 lembar. (No. 1629)
- 131) Pengumuman Pemerintah mengenai Pembubaran Uni Indonesia-Belanda dan Pembatalan Persetujuan dalam KMB. 13-18 Februari 1956, asli, 1 sampul. (No. 1648)
- 132) Mosi Serikat Buruh Listrik dan Gas Indonesia terkait nasionalisasi perusahaan listrik dan gas wilayah Gresik. 1952-1953, asli, 1 sampul. (No. 1825)
- 133) Berkas mengenai pernyataan Partai Pantja Sila tentang oposisi Kabinet Ali dan plakat tentang Perjuangan Irian Barat. 19 November-29 Desember 1954, asli, 1 sampul. (No. 1887)

- 134) Pernyataan Partai Murba mengenai Irian Barat. 17 November 1951, asli, 3 lembar. (No. 1937)
- 135) Surat dari Kepala Bagian Politik/Keamanan Kabinet Perdana Menteri kepada Menteri Urusan Umum mengenai pernyataan bersama para mahasiswa dan pemuda pelajar Indonesia Surabaya terkait Irian Barat. 5 Januari dan 13 Desember 1951, asli, 2 lembar. (No. 1938)
- 136) Surat-surat dari Badan Perjuangan Irian Barat dan Ketua DPRD sementara Provinsi Jawa Barat mengenai tuntutan kembalinya Irian Barat. 19-28 November 1951, asli, 3 lembar. (No.1939)
- 137) Surat dari Pimpinan Masjumi-GPII cabang Negara kepada Perdana Menteri mengenai resolusi tentang Irian Barat. 18 Desember 1951, asli, 2 lembar. (No.1942)
- 138) Surat dari Ketua Panitia Rakyat Balangan kepada Perdana Menteri mengenai resolusi rapat raksasa Panitia Pembela Irian Barat di Raringin. 24-25 Desember 1951, asli, 2 lembar. (No.1943)
- 139) Surat dari Kepala Bagian Politik/Keamanan kepada Menteri Urusan Umum mengenai penyampaian salinan pernyataan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Percetakan Indonesia Cabang Surabaya tentang Irian Barat. 5 Januari 1952, asli, 3 lembar. (No.1944)
- 140) Berkas mengenai pernyataan berbagai organisasi politik dan sosial tentang penghapusan Uni-Indonesia Belanda dan tuntutan pengembalian Irian Barat. 12 Juli-30 September 1954, asli, 1 sampul. (No.1947)
- 141) Berkas mengenai tuntutan kembalinya Irian Barat ke Wilayah RI. 22 Nopember 1956, asli, 1 sampul. (No. 1950)
- 142) Berkas pernyataan DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang pembebasan Irian Barat. 14 Desember 1957, asli, fotokopi, 1 sampul. (No. 1951)
- 143) Berkas mengenai pengiriman kawat untuk Kuasa Usaha di Den Haag mengenai pembatalan Uni Indonesia-Belanda dan KMB. 7-21 November 1953, asli, 1 sampul. (No.2133)
- 144) Berkas mengenai pengambilalihan dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. 8 Agustus 1950-10 Agustus 1959, pertinggal, 1 sampul. (No. 2571)

- 145) Berkas mengenai nasionalisasi tambang minyak Sumatera Utara. 12 September 1952-18 Desember 1953, asli, 1 sampul. (No. 2596)
- 146) Berkas nasionalisasi Perusahaan Kereta Api Partikelir di Jawa dan Madura. 5 Maret 1953-22 November 1956, salinan, 1 sampul. (No. 2995)
- 147) Surat dari Sekretaris Djenderal Kementerian Perhubungan kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai jawaban pemerintah soal nasionalisasi perhubungan yang vital, beserta lampiran. 1 September 1953, asli, 1 sampul. (No. 2997)
- 148) Surat dari Sekretaris Kabinet Perdana Menteri kepada Menteri Perhubungan tentang permintaan *Managing Director Pioneer Aviation Corporation* sehubungan dengan Nasionalisasi GIA. 21 April-5 Mei 1954, pertinggal, 1 sampul. (No. 3000)

b. Inventaris Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri 1950-1959

Jilid II

- 149) Surat dari anggota Perbum cabang Prabumulih kepada perusahaan minyak mengenai menyokong pemboikotan pengangkutan kekayaan alam Indonesia ke Irian Barat. 16 Januari 1953, kopi, 1 lembar. (No.799)
- 150) Berkas mengenai Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Negara Penasehat Penyelesaian Pembatalan KMB. 25 April 1956-6 Agustus 1957, asli, pertinggal, 1 sampul. (No. 835)
- 151) Keputusan Panitia *Ad Hoc* Kabinet Urusan Pelaksanaan Putusan-Putusan Musyawarah Nasional di bidang soal-soal khusus, antara lain tentang Dwitunggal, kepartaian dan Irian Barat. 31 Agustus-9 Oktober 1957, konsep, 1 sampul. (No. 853)
- 152) Surat dari Sekretaris Dewan Nasional kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai usul-usul dari Dewan Nasional 1957-1958 (mengadakan pekan perjuangan Irian Barat). 21 Juli 1958, asli, 1 sampul. (No.869)
- 153) Berkas mengenai resolusi-resolusi dari partai dan serikat buruh tentang pembatalan uni Indonesia-Belanda dan masalah Irian Barat. 28 Mei-29 Nopember 1954, asli, 1 sampul. (No.1069)

- 154) Resolusi-resolusi mengenai dukungan terhadap perjuangan merebut Irian Barat. 20 Maret dan 12 April 1950, November 1950, asli, salinan, 1 sampul. (No.1138)
- 155) Resolusi dari organisasi sosial politik dan pemerintah daerah tentang tuntutan pembatalan hasil KMB terutama masalah Irian Barat. 9 November 1950-25 Mei 1956, asli, 1 sampul. (No.1140)
- 156) Risalah mengenai perkembangan Irian di Negeri Belanda (akhir Desember-Januari 1951). 31 Januari 1951, fotokopi, 8 lembar. (No.1141)
- 157) Surat dari Kabinet Perdana Menteri kepada Menteri Luar Negeri mengenai kawat dari Ketua Pusat Badan Perjuangan Irian tentang Pemerintah Belanda kemungkinan membiarkan musnahnya penduduk Irian. 25 September 1951, pertinggal, 2 lembar. (No.1142)
- 158) Surat dari Kepala Bagian Politik/Keamanan kepada Kepala Kepolisian Indonesia mengenai salinan hasil sensor surat-surat mengenai Irian. 25 September 1951, pertinggal, 4 lembar. (No.1143)
- 159) Surat dari Waperdam kepada Menteri Urusan Umum mengenai Kantor Panitia Irian Barat dan Badan Perjuangan Irian. 5 Desember 1951, tembusan, 1 sampul. (No.1144)
- 160) Laporan mengenai penyerbuan dan penahanan penduduk Pulau Gebe/Joi oleh pemerintah Belanda di Irian Barat. 25 Maret 1952-16 Maret 1954, tembusan, 1 sampul. (No.1146)
- 161) Berkas mengenai pengangkatan anggota-anggota Badan Pengurus Biro Irian. 14 Desember 1953-13 Maret 1954, tembusan, 1 sampul. (No. 1150)
- 162) Berkas mengenai izin demonstrasi untuk menuntut Irian Barat. 25-30 November 1954, pertinggal, 1 sampul. (No.1153)
- 163) Surat dari Ketua Pusat Badan Perjuangan Irian kepada Perdana Menteri mengenai pertemuan dengan Komisaris Belanda di Makassar. 04 Desember 1954, asli, 4 lembar. (No.1154)
- 164) Surat dari Sekretaris Umum Pusat Badan Perjuangan Irian kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai kasus J. Torey dkk, anggota Biro Irian yang ditahan serta hidup dalam kesulitan. 21 Januari-11 Februari 1955, asli, 6 lembar. (No.1157)

- 165) Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai berita surat kabar "*Tindjauan*" tentang demonstrasi orang-orang asli Irian yang diorganisir Belanda untuk menentang masuknya Irian Barat ke RI. 15 April-12 Mei 1955, asli, 5 lembar. (No.1158)
- 166) Berkas mengenai putusan-putusan rapat Kabinet Juanda tentang Irian Barat. 1 Oktober-2 Desember 1957, fotokopi, 1 sampul. (No.1160)
- 167) Surat dari Ketua Dewan Nasional kepada Perdana Menteri mengenai usul terkait perjuangan Irian Barat. 18-30 November 1957, salinan, 8 lembar. (No.1161)
- 168) Surat dari Ketua GTRIB dan Ketua Front Buruh-Tani-Pemuda & Militer mengenai saran terhadap perjuangan Irian Barat. 7 Desember 1957 dan 7 Januari 1958, asli, 4 lembar. (No.1163)
- 169) Surat dari Ketua Perwakilan Objek Ramusja kepada Perdana Menteri mengenai bantuan dari pampasan Jepang untuk perjuangan Irian Barat. 25 Januari 1959, asli, 4 lembar. (No.1167)
- 170) Laporan bulanan dana perjuangan Irian Barat. 15 April-3 September 1959, asli, 1 sampul. (No.1168)
- 171) Surat dari Perdana Menteri kepada Kementerian Luar Negeri mengenai Resolusi Badan Perjuangan Irian Barat Provinsi Sumatera Utara mengenai perjuangan Bangsa Tunisia. 21 Oktober 1952, pertinggal, 4 lembar. (No.1200)
- 172) Surat-surat mengenai penyelesaian pembatalan persetujuan KMB. 3 Mei 1956-12 Desember 1957, asli, 1 sampul. (No. 1229)
- 173) Berkas mengenai nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas seluruh Indonesia 16 Maret 1954-4 Juni 1955, asli, pertinggal, salinan, 1 sampul. (No. 1406)
- 174) Surat-surat mengenai pengoperan perusahaan Belanda di bawah penguasaan pemerintah RI. 11 Desember 1957-4 Juni 1958, asli, salinan, pertinggal. 1 sampul. (No.1439)
- 175) Surat mengenai nasionalisasi Perusahaan Perkebunan Kemuning. 22 September 1952, asli, 3 lembar. (No. 1492)

- 176) Berkas mengenai nasionalisasi *NV Bataviasche Verkeers Maatschappij*. 8 April 1952-1 Februari 1954, asli, 1 sampul. (No. 1661)
- 177) Berkas mengenai nasionalisasi kapal-kapal asing. 3 April-21 Juni 1954, pertinggal, 1 sampul. (No. 1674)
- 178) Berkas dari Sarekat Buruh Kereta Api (SBKA) mengenai resolusi kongres yang berisi tentang nasionalisasi perusahaan kereta api partikelir dan tentang pentraktor, penangkapan dan penembakan kaum tani di Sumatera Timur. 1-10 September 1953, asli, 7 lembar. (No. 1770)
- 179) Surat-surat mengenai pemogokan pegawai pabrik di Pasirwaringin, pabrik di Cirebon, S.V.P.M. Sungai Gerong, Perusahaan Philips Surabaya, perusahaan tembakau, pabrik cabang Pesantren Kediri, Sarbupri dan Perbupri, Sarekat Buruh Fortho Pusat Surabaya, guru-guru sekolah negeri, pemogokan umum kaum buruh, pekerjaan umum, daerah otonom dan kehutanan di seluruh daerah Jawa Barat (terdapat arsip Berbahasa Inggris dan Bahasa Belanda). 8 Juni 1950-20 Oktober 1954, asli, tembusan, fotokopi, 1 sampul. (No. 1722)
- 180) Surat-surat mengenai pemogokan buruh kereta api seluruh Jawa pada 28-29 Juli 1956. 31 Juli-1 Agustus 1956, salinan, 1 sampul. (No. 1802)
- 181) Berkas mengenai pengundangan UU No. 71 tahun 1957 dan No 10 Tahun 1954 tentang Nasionalisasi *Bataviasche Verkeers Maatschappij NV* (BVM). 4 Mei 1954-8 Februari 1958, tembusan, konsep, salinan, 1 sampul. (No. 1985)
- 182) Berkas mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Protokol pembubaran Uni Indonesia Belanda. 26 Agustus 1954, asli, 1 sampul. (No.2069)
- 183) Berkas mengenai RUU tentang pembentukan daerah otonom propinsi Irian Barat. 16 Juli 1956, tembusan, 1 sampul. (No.2093)
- 184) Seri PP tentang penentuan perusahaan-perusahaan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi. 6 Juli 1953-7 Desember 1959, pertinggal, 1 sampul. (No.2137)
- 185) Berkas mengenai RPP pembentukan daerah Provinsi Irian Barat. 17-20 Juli 1954, kopi, 1 sampul. (No.2204)

- 186) Surat-surat mengenai pertanyaan dari anggota DPR Samanhadi Sastrowidjojo dan jawaban tentang perusahaan Belanda di Indonesia yang diambil alih (nasionalisasi). 8 November 1954-7 Januari 1959, asli, tembusan, 1 sampul. (No.2307)
- 187) Berkas mengenai Risalah perundingan sidang Ke III tentang jawaban atas pemandangan umum mengenai RUU penetapan UU Darurat No.10 1954 tentang Nasionalisasi *Bataviasche Verkeers Maatschappij NV*. 13-16 September 1957, salinan, 1 sampul. (No. 2464)
- 188) Berkas mengenai perwakilan Irian Barat dalam Konstituante. 16 April 1958-7 Pebruari 1959, salinan, 6 lembar. (No. 2469)

c. Inventaris Arsip Kabinet Presiden RI 1950-1959

- 189) Kabinet Presiden RI: Pidato Sunario, Ketua Delegasi Indonesia dalam Konferensi di Den Haag tanggal 29 Juni 1954 tentang pembubaran Uni Indonesia Nederland. Stensilan, 1 sampul. (No. 505)
- 190) DPRD Kabupaten Pati kepada Presiden RI: Resolusi tanggal 12 November 1957 tentang dukungan atas tuntutan Delegasi Indonesia di PBB. Asli, 1 lembar. (No. 583)
- 191) Organisasi masa dan politik: Resolusi-resolusi tanggal 8 April 1951-1 Mei 1950 tentang sikap politik terhadap masalah keamanan, kabinet, politik, pendidikan, kesehatan, UU Perkawinan, hak demokrasi, masalah tanah, dan Irian Barat. Tembusan, 2 sampul. (No.771)
- 192) Dewan Nasional Kongres Rakyat Seluruh Indonesia: Keputusan-keputusan sidang III tanggal 9-10 November 1957 tentang konsepsi Panitia Revisi Keorganisasian Kongres Rakyat dan Perjuangan Pembebasan Irian Barat, dengan lampiran. 9-11 November 1957, salinan, 4 lembar. (No.821)
- 193) Organisasi massa: Surat-surat pernyataan tanggal 26 Oktober 1950-10 Agustus 1959 tentang nasionalisasi perusahaan asing. Tembusan, 1 sampul. (No. 1528)
- 194) Panitia Peringatan Hari 1 Mei 1958 Ngunut kepada Menteri Pertanian: Resolusi, 1 Mei 1958 tentang sikapnya dalam menghadapi masalah

- Pabrik Gula Kunir, intervensi Belanda di Irian Barat dan percobaan bom nuklir di Kepulauan Eniwetok. Stensilan, 7 lembar. (No.1689)
- 195) DPRDS-DPRDS, Ormas, Orpol: Resolusi-resolusi tanggal 10 Januari 1951-10 Mei 1958 tentang tuntutan pengembalian Irian Barat ke wilayah RI. Asli, tembusan, 3 sampul. (No.1719)
- 196) Organisasi Massa: Surat-surat pernyataan, 1 Maret 1951-15 Desember 1957 tentang tuntutan pembatalan KMB. Asli, 1 sampul. (No. 1729)
- 197) Warimin: Surat tanggal 16 Maret 1951 tentang dukungan agar Singapura, Kaltim, dan Irian masuk wilayah Indonesia, dengan lampiran. Asli, 2 lembar. (No.1733)
- 198) Persatuan Rakyat Cendrawasih Ternate Maluku Utara: Mosi tanggal 1-4 Agustus 1955 tentang sikap atas sengketa alam Papua oleh Pemerintah Belanda dan Indonesia, dengan lampiran. Asli, 4 lembar. (No. 1971)
- 199) Perdana Menteri Republik Indonesia: Pengumuman Pemerintah tanggal 18 Februari 1956 tentang pengibaran bendera kebangsaan sehubungan dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda dan pembubaran persetujuan KMB. Stensilan, 3 lembar. (No. 1997)
- 200) Sosial Demokrat Internasional kepada Presiden RI: Surat tanggal 6 September 1956 tentang masalah KMB. Asli, 2 lembar. (No. 2015)
- 201) Sekretaris Dewan Menteri: Pengumuman No. 68/1957 tanggal 17 Desember 1957 tentang masalah yang bertalian dengan aksi pembebasan Irian Barat, dengan lampiran. Salinan, 2 lembar. (No. 2114)
- 202) Delegasi Indonesia: Laporan tentang perundingan-perundingan antara utusan RI dan Kerajaan Nederland mengenai misi militer Nederland di Indonesia, tanggal 26 Maret-21 April 1953. Stensilan, 1 jilid. (No. 2502)

d. Daftar Arsip Pidato Presiden RI 1958-1967

- 203) Pidato Presiden pada waktu pelantikan Pengurus Besar Front Nasional di Istana Negara. 8 September 1960, stensilan, 1 sampul. (No.213)
- 204) Pidato Presiden pada Sidang Pleno Pengurus Besar Front Nasional II di Istana Merdeka Jakarta. 10 Maret 1961, stensilan, 1 sampul. (No.278)

205) Pidato Presiden pada upacara penyerahan hasil pelelangan perhiasan untuk Fonds Pembebasan Irian Barat di Istana Merdeka Jakarta. 27 Maret 1962, stensilan, 1 sampul. (No.379)

e. Daftar Arsip Sekretariat Negara RI: Seri Produk Hukum 1949-2005

206) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956 tentang Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland Berdasarkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar. 3 Mei 1956, asli, 2 lembar. (No. 188)

207) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Irian Barat. 16 Agustus 1956, asli, 6 lembar. (No. 190)

208) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 76) sebagai Undang-Undang. 17 Juni 1958, asli, 1 sampul. (No. 264)

209) Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda di Indonesia. 27 Desember 1958, asli, 1 sampul. (No. 286)

210) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961 tentang Persetujuan Atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 mengenai Hukum Laut. 6 September 1961, asli, 3 lembar. (No. 344)

211) Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat. 9 Agustus 1957, asli, 2 lembar. (No. 1204)

212) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960 tentang Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda. 9 Februari 1960, asli, 4 lembar. (No. 1250)

213) Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1954 tentang Nasionalisasi *Bataviasche Verkeers Maatschappij* (B.V.M.) NV. 28 Mei 1954, salinan, 3 lembar. (No. 1153)

214) Berkas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Dagang yang Besar Milik Belanda beserta Cabang-

- cabangnya dan Anak-anak Perusahaannya yang dikenakan Nasionalisasi. 24 Juni-4 Juli 1959, tembus, copy, 1 sampul. (No. 1811)
- 215) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan-perusahaan Pharmasi Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi. 16 Januari 1960, asli, 3 lembar. (No. 1817)
- 216) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Pemborongan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi. 16 Januari 1960, asli, 3 lembar. (No. 1818)
- 217) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Asuransi Kerugian Milik Belanda di Indonesia yang Dikenakan Nasionalisasi. 16 Januari 1960, asli, 3 lembar. (No. 1819)
- 218) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Bank di Indonesia Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi. 23 Maret 1960, asli, 3 lembar. (No. 1829)
- 219) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi. 22 Agustus 1960, asli, 4 lembar. (No. 1845)
- 220) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Dagang Milik Belanda Beserta Cabang-cabangnya yang Dikenakan Nasionalisasi. 22 Agustus 1960, asli, 5 lembar. (No. 1846)
- 221) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan di Indonesia Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi. 30 Agustus 1960, asli, 3 lembar. (No. 1849)
- 222) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1960 tentang Nasionalisasi Perusahaan NV KPM di Indonesia. 24 September 1960, asli, 3 lembar. (No. 1850)
- 223) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1960 tentang Nasionalisasi NV "*Semarangsche Stoomboot En Prauwen Veer* (SSPV)" dan NV "*Semarang Veer*". 30 September 1960, asli, 3 lembar. (No. 1851)
- 224) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1960 tentang Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 35) tentang Penentuan Perusahaan Bank di Indonesia Milik

- Belanda yang dikenakan Nasionalisasi. 29 November 1960, asli, 2 lembar. (No. 1860)
- 225) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Pertanggungjawaban Jiwa Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi. 30 November 1960, asli, 3 lembar. (No. 1864)
- 226) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1960 tentang Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 4) tentang Penentuan Perusahaan-perusahaan Farmasi Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi. 19 Desember 1960, asli, 2 lembar. (No. 1866)
- 227) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1960 tentang Nasionalisasi Milik Perusahaan *Royal Interocean Lines* (RIL). 23 Desember 1960, asli, 3 lembar. (No. 1868)
- 228) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penentuan Perusahaan Dagang Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi. 5 Januari 1961, asli, 1 lembar. (No. 1871)
- 229) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1961 tentang Penentuan Perusahaan-Perusahaan Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi. 5 Januari 1961, asli, 3 lembar. (No. 1872)
- 230) Peraturan Pemerintah Nomor 235 Tahun 1961 tentang Penentuan Perusahaan-Perusahaan Farmasi Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi. 20 November 1961, asli, 3 lembar. (No. 2102)
- 231) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1962 tentang Nasionalisasi Milik Perusahaan *Stoomvaart Maatschappij Nederland* (S.M.N.) di Indonesia. 9 Februari 1962, asli, 3 lembar. (No. 2113 A dan B)
- 232) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1959 tentang Front Nasional. 31 Desember 1959, asli, 6 lembar. (No. 4429)
- 233) Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1953 tentang Pembentukan Perutusan Indonesia Untuk Perundingan Dengan Perutusan Kerajaan Nederland tentang Persetujuan Misi Militer Belanda Di Indonesia. 26 Maret 1953, asli, 2 lembar. (No. 5306)

- 234) Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1954 tentang Pengiriman Delegasi Indonesia ke Negeri Belanda Untuk Mengadakan Pembicaraan tentang Pembubaran Uni Indonesia Nederland. 19 Juni 1954, asli, 3 lembar. (No. 5583)

f. Inventaris Arsip Komando Operasi Tertinggi (KOTI) 1963-1967

- 235) Berkas mengenai Peraturan-Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda di Indonesia (Nasionalisasi Perusahaan Belanda). 1958-1959, salinan, 1 sampul. (No. 131)
- 236) Piagam BKS-PM-Wanita mengenai pembebasan Irian Barat. 22 Desember 1957, asli, 2 lembar. (No. 185)
- 237) Surat-surat Keputusan dan Peraturan tentang Pembebasan Irian Barat. 3 Januari-24 Maret 1958, asli, 1 sampul. (No. 186)
- 238) Laporan kegiatan kerja bagian Khusus PBFN mengenai pembebasan Irian Barat. 8 Januari 1962, kopi, 1 lembar. (No. 192)
- 239) Pokok ceramah D.N. Aidit pada kursus kader FN untuk Brigade Pembangunan Irian Barat. 8 Oktober 1962, kopi, 5 lembar. (No. 201)
- 240) Kumpulan Pre-Advis mengenai masalah ekonomi dan keuangan, pembebasan Irian Barat, usaha menambah pendapatan daerah, serta pembentukan Ikatan Daerah Otonom dari Moh. Ahjar, R. Soenjoto, Soeprapto, dan Chaerul Shaleh. 22 Februari 1955-30 September 1963, kopi, 1 sampul. (No. 269)
- 241) Pokok-pokok persoalan pesan tahun baru dari Politbiro CC PKI antara lain mengenai membebaskan Indonesia dari kekuasaan ekonomi Kolonial Belanda dan usaha merebut Irian Barat. 1957, kopi, 2 lembar. (No. 288)
- 242) Surat dari Sekretaris Komite PKI Jawa Barat mengenai resolusi-resolusi hasil putusan Konferensi PKI Jawa Barat tanggal 31 Maret dan 1 April 1962 tentang Trikomando Rakyat, sandang-pangan, dan keamanan, beserta lampiran. 7 April 1962, kopi, 4 lembar. (No. 364)
- 243) Laporan mengenai wawancara ketua CC PKI D.N. Aidit dengan Koresponden *Associated Press* antara lain tentang Irian Barat, ekonomi,

demokrasi, Malaysia, dan sebagainya. 27 Februari 1962 dan 9 Mei 1963, kopi, 1 sampul. (No. 391)

- 244) Piagam Kebulatan Tekad Buruh, Tani-BKS-PM mengenai kebulatan tekad untuk merebut Irian Barat dari tangan kolonialis Belanda. 19 November 1957, asli, 1 lembar. (No. 623)

g. Inventaris Arsip Lambertus Nicodemus Palar 1928-1981

- 245) Delson, Levin & Gordon, *Counsellors at Law*: Memorandum, Maret 1956 tentang penarikan dari Uni Indonesia-Belanda. Salinan, 1 sampul. (No. 126)
- 246) Konsulat Jenderal Indonesia di New York: Pidato Presiden Soekarno pada *General Assembly* ke-15, 30 September 1960, stensilan, 1 sampul. (No. 137)
- 247) Pemerintah Indonesia: Statement, (++1960) tentang klaim atas Irian Barat sebagai bagian dari kedaulatan Indonesia. Stensilan, 1 sampul. (No.143)
- 248) Kepala Staf Angkatan Bersenjata: Instruksi, 10 Desember 1957 tentang pengambilalihan dengan segera perusahaan Belanda di wilayah penguasa militer setempat, disertai lampiran. Stensilan, 1 sampul. (No. 315)

h. Inventaris Arsip Marzuki Arifin 1945-1984

- 249) Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Utara: Pernyataan Bangsa Tionghoa tentang kesediannya untuk membantu perjuangan Negara RI khususnya dalam pengambilan Irian Barat ke RI. 17 Desember 1957, Salinan, 1 sampul. (No.381)

i. Inventaris Arsip Roeslan Abdul Gani 1950-1976

- 250) DPD PNI Jawa Timur: Pernyataan tanggal 20 Desember 1961 tentang himbauan kepada warga Front Marhaenis untuk bekerja sama dengan rakyat merebut kembali Irian Barat. Stensilan, 1 lembar. (No.355)

- 251) Kabinet Presiden: Undang-undang No. 15/1956 dan UU Darurat no. 20/1957 tentang otonomi Propinsi Irian Barat dengan penjelasannya. Stensilan, 5 lembar. (No. 1856)

3. Arsip Foto

a. Daftar Arsip Foto Kementerian Penerangan Sumatera Utara 1950-1955

- 252) Pandu dari berbagai golongan ikut pawai dalam rangka pembebasan Irian Barat. (No. 501217 AA 2)
- 253) Bekas para pejuang 1946-1947 dari Tebing Tinggi ikut pawai untuk pembebasan Irian Barat. (No. 501217 AA 3)
- 254) Para pelajar ikut pawai pembebasan Irian Barat. (No. 501217 AA 5)
- 255) Seluruh rakyat Tebing Tinggi dari para bekas pejuang, tukang becak, buruh, dll ikut demonstrasi untuk pembebasan Irian Barat dan menuntut pembatalan KMB dan Uni Indonesia-Belanda. (No. 501217 AA 7)
- 256) Rakyat Tebing Tinggi tidak mengenal panas terik matahari dalam rangka pembebasan Irian Barat. (501217 AA 8)
- 257) Rakyat Tebing Tinggi menuntut Irian Barat. (501217 AA 10)
- 258) Para tukang becak pawai menuntut pembebasan Irian Barat. (501217 AA 11)
- 259) Rakyat Tebing Tinggi dan para pelajar dengan bendera merah putih menuntut sebelum matahari terbit Irian Barat harus sudah dipangkuan RI. (501217 AA 12)
- 260) Lagu perjuangan Irian Barat sedang dikumandangkan oleh Rakyat Tebing Tinggi. (501217 AA 15)
- 261) Bung Djoni alias Banteng Gemuk sedang berpidato pada pembebasan Irian Barat. (501217 AA 16)

b. Daftar Arsip Foto Kementerian Penerangan Sumatera Utara 1956-1965

- 262) Paduan suara ketika Rapat Samudera Pembebasan Irian Barat di Lapangan Merdeka Medan. (No. 571219 AA 1 dan No. 571219 AA 2)

- 263) Suasana Rapat Samudera Pembebasan Irian Barat di Lapangan Merdeka Medan pembatalan KMB dan Uni Indonesia-Belanda. (No. 571219 AA 4 s.d. 571219 AA 15)
- 264) Pidato KSAD A.H. Nasution ketika Rapat Samudera Pembebasan Irian Barat di Lapangan Merdeka. (No. 571219 AA 21 s.d. 571219 AA 24)
- 265) Pidato Gubernur Sumatera Utara St. Kumala Pontas ketika Rapat Samudera Pembebasan Irian Barat di Lapangan Merdeka Medan. (No. 571219 AA 19 dan 571219 AA 20)
- 266) Malam gembira “Gerak Pengumpul Sumbangan” untuk dana Perjuangan Irian Barat Daerah Swatantra Tk I di Gubernuran Medan. (No. 581227 AA 1-1 s.d. 581227 AA 1-42)
- 267) Malam pelantikan Front Nasional Pembebasan Irian Barat daerah Swatantra Tk.I Sumatera Utara oleh KSAD Letjen A.H. Nasution di Gubernuran Medan. (No. 580724 AA 1-1 s.d. 580724 AA 1-6)
- 268) Barisan Brigade Pembebasan Irian Barat daerah Provinsi Sumatera Utara ketika untuk menyampaikan kepada Gubernur di Medan. (No. 571216 AA 1 s.d. 571216 AA 12)
- 269) Suasana mengheningkan cipta 5 menit untuk perjuangan Irian Barat di Medan. (No. 571125 AA 1 s.d. 571125 AA 5)

c. Daftar Arsip Foto Kementerian Penerangan Jawa Barat 1956

- 270) Hadirin mengikuti penerangan pembatalan Perjanjian KMB di Sumedang. (No. JB5603/313)
- 271) Hadirin pada ceramah penerangan pembatalan Perjanjian KMB di Cianjur. (No. JB5603/317)
- 272) Hadirin pada rapat penerangan pembatalan Perjanjian KMB di Purwakarta. (No. JB5603/323)
- 273) Kepala Japenkab Sumedang A. Adiwidjaja memberikan penerangan soal pembatalan Perjanjian KMB kepada kaum pekerja. (No. JB5603/311)
- 274) Kepala Urda Japenpro Jawa Barat R. Reokomy memberikan penerangan pembatalan Perjanjian KMB di Ciamis. (No. JB5603/318 s.d. JB5603/319)

d. Daftar Arsip Foto Kementerian Penerangan Irian Barat 1957-1964

- 275) Aksi-aksi PABIB (Panitia Pembebasan Irian Barat) di Soa Sio. Para pemuda (Komando Pemuda Perbatasan Irian Barat) pada rapat umum Gel. I dari PABIB dengan membawa spanduk. (No. 571121 ZA 1-1)
- 276) Gubernur Irian Barat sebagai Ketua Umum PABIB tingkat propinsi saat rapat umum di Soa Sio. (No. 571121 ZA 1-3)
- 277) Suasana rapat umum PABIB Gel. I di Soa Sio. (No. 571121 ZA 1-4 s.d. 571121 ZA 1-6)
- 278) Sambutan/ pidato Ch. Bisay, anggota DPD Provinsi Irian Barat dan Ketua Partai Rakyat Tjendrawasih (PRT) saat rapat umum PABIB Gel. I di Soa Sio. (No. 571121 ZA 9 dan 571121 ZA 12)

4. Arsip Film

a. Daftar Arsip PPFN: Kelompok Film Dokumenter Politik

- 279) Judul : Misi Angkatan Perang Burma di Indonesia
- Nomor Reel : 01
- Format : Roll Film 35 mm
- Durasi : 09.34 menit
- Warna : Hitam Putih
- Narasi : Bahasa Indonesia
- Produksi : PFN
- Tahun Produksi : 1960
- No. Peminjaman : DVD-1188/2014
- Sinopsis :

Tanggal 15 Agustus 1960, Misi angkatan perang Burma, dipimpin Komodor Tang Pei tiba di lapangan terbang Kemayoran yang disambut Waksad Letnan Jenderal Gatot Subroto dan para atasan militer asing. Menghadiri upacara HUT Kemerdekaan, 17 Agustus di Istana Negara. Sambutan Presiden Soekarno, antara lain akan mengutus Menlu RI untuk memutuskan hubungan dengan Belanda karena Irian Barat.

C. Konfrontasi Militer

1. Abstrak



Gambar 3

Rapat Trikora, Rapat Trikora dengan isi: Gagalakanlah pembentukan negara boneka di Papua buatan Belanda, Kibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat, Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan tanah air dan bangsa, Desember 1961.

Sumber: Kementerian Penerangan Wilayah Jawa Tengah 1950-1965 (No. 637)

Konfrontasi militer adalah salah satu dari bentuk konfrontasi total yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan mengambil sikap tegas menggunakan kekuatan senjata dalam perjuangan merebut Irian Barat. Bentuk konfrontasi militer antara lain peningkatan kerjasama militer dengan Uni Soviet, pembentukan Dewan Pertahanan Nasional dan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat (KOTI Pemirbar), deklarasi Trikora dan operasi militer.

Perjuangan pembebasan Irian Barat melalui konfrontasi militer tersebut, terekam dalam setiap deskripsi arsip yang ditampilkan dalam bagian ini. Terdapat 45 nomor arsip dari 10 daftar dan inventaris arsip tekstual, 58 nomor arsip dari 3 daftar arsip foto, 22 nomor arsip dari 3 daftar arsip film yang memiliki informasi mengenai perjuangan melalui konfrontasi militer untuk merebut Irian Barat.

Informasi tersebut antara lain mengenai pembentukan, sidang-sidang Front Nasional Pembebasan Irian Barat, dana perjuangan Irian Barat banyak terdapat di Inventaris Arsip Sekretariat Negara: Kabinet Perdana Menteri 1950-1959 (arsip tekstual). Informasi mengenai permohonan menjadi pasukan sukarelawan dalam menyerbu Irian Barat terdapat di Inventaris Kabinet Presiden RI 1950-1959 dan KOTI 1963-1967 (arsip tekstual). Informasi mengenai pidato presiden dan instruksi penguasa perang tertinggi terkait operasi pembebasan Irian Barat terdapat di Daftar Arsip Pidato Presiden RI 1958-1967 dan Menko Hubra 1963-1966 (arsip tekstual).

Sementara itu, informasi mengenai Trikora, mobilisasi umum, pengiriman delegasi ke Uni Soviet dan pembentukan Dewan Pertahanan Nasional terdapat di Daftar Arsip Sekretariat Negara RI: Seri Produk Hukum 1949-2005, Inventaris Arsip Roeslan Abdul Gani 1950-1976 (arsip tekstual), Inventaris Arsip Kempen DIY 1960-1965, Daftar Arsip Kempen Jawa Tengah 1950-1965 (arsip foto) dan Inventaris Arsip PFN (arsip film). Berikut ini adalah deskripsi arsip dalam beberapa khazanah arsip statis di ANRI yang memuat informasi arsip terkait dengan perjuangan pembebasan Irian Barat melalui konfrontasi militer:

2. Arsip Tekstual

a. Inventaris Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri 1950-1959

- 280) Laporan pertanggungjawaban keuangan Front Nasional Pembebasan Irian Barat atau Menteri Negara Urusan Kerja Sama Sipil Militer mengenai pengeluaran uang dari bulan Juli s/d Desember tahun 1958 (beserta lampiran). 15 Desember 1958, asli, 1 sampul. (No. 649)
- 281) Berkas mengenai instruksi dan keputusan tentang pembentukan Front Nasional Pembebasan Irian pusat dan daerah. 5 Februari 1958, asli, 1 sampul. (No. 1953)
- 282) Berkas mengenai keputusan-keputusan sidang Dewan Nasional VI (soal penyempurnaan Front Nasional Pembebasan Irian Barat). 3-10 Juni 1958, asli, 1 sampul. (No. 1954)
- 283) Berkas mengenai laporan perkembangan dan neraca keuangan Dana Perjuangan Irian Barat (Dapib). Juni-November 1958, salinan dan tembusan, 1 sampul. (No.1955)

- 284) Surat-surat mengenai pengangkatan Presiden/Panglima Tertinggi sebagai Ketua Kehormatan Front Nasional Pembebasan Irian Barat. 30 Juli-23 Agustus 1958, tembusan, 3 lembar. (No. 1956)
- 285) Surat dari Mahkamah Agung kepada Perdana Menteri mengenai ucapan-ucapan Sekjen SEATO yang menyinggung-nyinggung Indonesia/Irian Barat ketika ia berkunjung ke Australia. 30 September 1958, asli, 1 lembar. (No.1958)

**b. Inventaris Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri 1950-1959
Jilid II**

- 286) Surat-surat mengenai Keputusan Ketua Penguasa Perang Daerah KDM Maluku dan Irian Barat tentang pengasingan orang-orang yang dianggap berbahaya keluar wilayah kekuasaan KDM-MIB. 2 September-8 Desember 1958, salinan, 1 sampul. (No.694)
- 287) Berkas mengenai tuduhan infiltrasi ke Irian Barat pada Oktober 1954 dan tahanan seorang Komandan Polisi Louis van Krieken yang ditangkap oleh Pejuang Kemerdekaan Irian. NB. bahasa Indonesia dan Belanda. 6 November 1954-30 Juni 1955, asli, tembusan, 1 sampul. (No.1152)
- 288) Surat dari Komandan Resimen Infanteri 25/W kepada Perdana Menteri mengenai "Lima Sendi" pertahanan Maluku cara untuk merebut Irian Barat. 21 Desember 1954, asli, 1 sampul. (No.1156)

c. Inventaris Arsip Kabinet Presiden RI 1950-1959

- 289) Anggota APRI tahanan/hukuman rumah penjara tentara Cimahi: surat tanggal 25 Nopember 1957 tentang permohonan menjadi sukarelawan dalam menyerbu Irian Barat. Asli, 2 lembar. (No.2108)

d. Daftar Arsip Pidato Presiden RI 1958-1967

- 290) Pidato Presiden pada perayaan peringatan Hari Ulang Tahun pertama Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB), Istana Negara. 13 Januari 1959, stensilan, 2 lembar. (No.048)

- 291) Pidato Presiden pada upacara pelantikan Kepala Staf AL Kolonel Eddy Martadinata sebagai menteri ex-officio dalam Kabinet Kerja di Istana Merdeka, Jakarta. 25 Juli 1959, stensilan, 1 sampul. (No.92 dan 93)
- 292) Pidato presiden tentang Penemuan Kembali Revolusi Kita. 17 Agustus 1959, buku, 1 sampul. (No. 100)
- 293) Pidato presiden pada hubungan baik negara dalam keadaan perang. 16 Desember 1959, stensilan, 1 sampul. (No. 131)
- 294) Pidato presiden pada upacara pelantikan perwira-perwira cadangan wajib militer darurat, di halaman Istana Merdeka. 29 Januari 1960, stensilan, konsep, 4 lembar. (No. 152)
- 295) Pidato Presiden tentang Resolusi DPR-GR mendukung perjalanan Presiden ke Sidang Umum PBB, di Istana Merdeka. 23 September 1960, stensilan, 6 lembar. (No.220)
- 296) Pidato Presiden pada upacara pemberian Bintang Jasa kepada para gerilyawan yang telah berjasa dalam membebaskan Irian Barat, di Jakarta. 19 Februari 1963, stensilan, konsep, 1 sampul. (No.465)
- 297) Perintah Harian Presiden/Komandan Tertinggi Angkatan Darat RI/ Komandan Tertinggi untuk pembebasan Irian Barat. 19 Desember 1961, stensilan, konsep, 1 sampul. (No.926)
- 298) Instruksi Penguasa Perang Tertinggi Nomor 3/Peperti Tahun 1962 tentang Operasi Ekonomi bagi Daerah-daerah Perbatasan Irian Barat. 7 April 1962, asli, 3 lembar. (No. 12402)
- 299) Instruksi Penguasa Perang Tertinggi Nomor 4/Peperti Tahun 1962 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Irian Barat. 2 Mei 1962, asli, 1 sampul. (No. 12403)
- 300) Instruksi Penguasa Perang Tertinggi Nomor 5/Peperti Tahun 1962 tentang Pedoman Saluran Kegiatan yang Berhubungan dengan Daerah Mandala dan Ketentuan Hubungan dan Pimpinan Pejabat-pejabat dan Petugas-petugas Instansi Sipil dalam rangka Operasi Pembebasan Irian Barat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Sipil di Irian Barat. 4 Juli 1962, asli, 2 lembar. (No. 12404)

e. Daftar Arsip Sekretariat Negara RI: Seri Produk Hukum 1949-2005

- 301) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1962 tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1962 tentang Penerimaan dan Penggunaan Warga Negara Asing yang dengan Sukarela Turut Serta dalam Perjuangan Pembebasan Irian Barat" (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 21) menjadi Undang-Undang. 17 November 1962, asli, 7 lembar. (No. 364)
- 302) Keputusan Presiden Nomor 263 Tahun 1962 tentang Mengirimkan Dr. Subandrio, Let. Djen. Hidajat, Suwito Kusumowidagdo, Drs. Khouw Bian Tie sebagai utusan Pemerintah Republik Indonesia untuk mengadakan perundingan dengan wakil-wakil Pemerintah Belanda di New York selama 14 hari. 15 Agustus 1962, asli, 2 lembar. (No. 7368)
- 303) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pemanggilan dan Pengerahan semua Warga Negara dalam rangka Mobilisasi Umum untuk Kepentingan Keamanan dan Pertahanan Negara. 6 Februari 1962, asli, 6 lembar. (No. 1303)
- 304) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1962 tentang Penerimaan dan Penggunaan Warga Negara Asing yang dengan Sukarela Turut Serta dalam Perjuangan Pembebasan Irian Barat. 18 Juni 1962, asli, 5 lembar. (No. 1305)
- 305) Keputusan Presiden No. 219 Tahun 1960 tentang Pengangkatan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagai anggota dalam Panitia Perdjoangan Irian Barat. 23 Agustus 1960, asli, 1 lembar. (No. 6427)
- 306) Keputusan Presiden Nomor 342 Tahun 1960 tentang Perintah kepada Dr. Subandrio, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia untuk pergi ke Uni Soviet (Moscow). 27 Desember 1960, asli, 2 lembar. (No. 6547)
- 307) Keputusan Presiden Nomor 344 Tahun 1960 tentang Perintah kepada Jenderal Abdul Haris Nasution, Menteri Keamanan Nasional Republik Indonesia untuk pergi ke Uni Soviet (Moscow), India (New Delhi), Pakistan (Karachi). 27 Desember 1960, asli, 2 lembar. (No.6549)
- 308) Keputusan Presiden Nomor 345 Tahun 1960 tentang Perintah kepada Laksamana Udara R.S. Suryadarma, Menteri/Kepala Staf Angkatan

- Udara Republik Indonesia untuk pergi ke Uni Soviet (Moscow), Amerika Serikat (Washington). 27 Desember 1960, asli, 2 lembar. (No. 6550)
- 309) Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1961 tentang Dana Perjuangan Irian Barat. 27 Maret 1961, asli, 1 lembar. (No. 6666)
- 310) Keputusan Presiden Nomor 618 Tahun 1961 tentang Membentuk Dewan Pertahanan Nasional. 11 Desember 1961, copy, 2 lembar. (No. 7133)
- 311) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1962 tentang Memerintahkan Laksamana Muda Udara Omar Dhani, Kolonel Udara Budiardjo, Let. Kol. Udara Sri Mulyono Herlambang, Major Udara Lokal Sumarso untuk mengadakan kunjungan (perjalanan dinas) ke Uni Soviet selama 3 (tiga) minggu. 7 Februari 1962, asli, 3 lembar. (No. 7215)
- 312) Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1962 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Koordinasi, Pengendalian, dan Pengawasan Pertahanan Sipil dan Perlawanan Rakyat. 4 April 1962, asli, 1 lembar. (No. 7269)
- 313) Keputusan Presiden Nomor 220 Tahun 1962 tentang Dana Perjuangan Irian Barat. 18 Juni 1962, asli, 4 lembar. (No. 7339)
- 314) Keputusan Presiden Nomor 233 Tahun 1963 tentang Galangan Perkapalan Manokwari Di Manokwari Irian Barat Dinyatakan Sebagai Milik Angkatan Laut Republik Indonesia. 14 November 1963, asli, 2 lembar. (No. 7654)

f. Inventaris Arsip Komando Operasi Tertinggi (KOTI) 1963-1967

- 315) Seruan DPD Gerwani mengenai untuk segera mendaftarkan diri memenuhi Trikora. 10 Januari 1962, asli, 1 lembar. (No. 713)
- 316) Surat dari DPP Gerwani untuk mengikuti dan mengirimkan sumbangan garam untuk keperluan dapur *training centre* kader-kader dalam rangka perjuangan Irian Barat. 30 September 1962, konsep, 2 lembar. (No. 727)
- 317) Kliping-kliping koran mengenai berbagai sambutan, tulisan, pendapat Wampa/KASAB Jendral A.H Nasution terhadap masalah pertahanan dan keamanan dalam dan luar negeri RI. Desember 1961-Juni 1965, kopi, 1 sampul. (No. 946)

g. Inventaris Arsip Angkatan Laut 1960-1964

- 318) Menteri/Kepala Staf AL: Surat Keputusan tanggal 23 Januari 1963 tentang penempatan/ penunjukan seorang perwira menengah AL sebagai wakil tetap AL dalam Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat. Asli, 1 lembar. (No. 71)

h. Inventaris Arsip Nahdlatul Ulama 1948-1979

- 319) Surat-surat mengenai pembebasan Irian Barat dan Tri Komando Rakyat. 30 September 1964-27 April 1965, salinan, 1 sampul. (No. 2976)

i. Inventaris Arsip Sekretariat Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat (Menko Hubra) 1963-1966

- 320) Komando Rakyat dari Presiden/Panglima Tinggi Angkatan Perang Republik Indonesia mengenai pembebasan Irian Barat. 19 Desember 1961, fotokopi, 1 lembar. (No. 2087)
- 321) Peta Bagian Barat Daerah Tengah Irian Barat yang disalin oleh team penyusun brosur Irian Barat. April 1962, salinan, 1 lembar. (No. 1541)
- 322) Peta: 1) Merauke & sekitarnya, 2) Fak-fak dan sekitarnya, 3) Daerah Tengah Irian Barat, dibuat oleh Team Penyusun Brosur Irian-Barat, Staf Penguasa Perang Tertinggi RI. April 1962, asli, 3 lembar. (No. 1542)

j. Inventaris Arsip Roeslan Abdul Gani 1950-1976

- 323) Presiden Soekarno: Komando rakyat tanggal 19 Desember 1961 tentang mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan. Stensilan, 1 lembar. (No. 1826)
- 324) Departemen Penerangan: *Press release* tanggal 29 Februari 1960 antara lain tentang perjanjian kerja sama ekonomi RI Uni Sovyet. Pertinggal, 1 sampul. (No.1931)

3. Arsip Foto

a. Inventaris Arsip Foto Kementerian Penerangan DI Yogyakarta 1960-1965

- 325) Pemandangan suasana persiapan upacara militer penyambutan kedatangan Presiden Soekarno di Pangkalan Udara Adisucipto, Yogyakarta, 18 Desember 1961. No. 611218 GM 12 (12313).
- 326) Pemandangan suasana persiapan upacara militer penyambutan kedatangan Presiden Soekarno di Pangkalan Udara Adisucipto, Yogyakarta, 18 Desember 1961. No. 611218 GM 11 (12314).
- 327) Rombongan Presiden Soekarno disambut oleh Sultan Hamengkubuwono Ke-IX saat menuruni tangga pesawat "*Garuda Indonesia Airways* PK-GCS" di Pangkalan Udara Adisucipto, Yogyakarta. 18 Desember 1961. No. 611218 GM 9 (12315).
- 328) Presiden Soekarno sedang disambut dan berjabat tangan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono Ke-IX saat tiba di Pangkalan Udara Adisucipto, Yogyakarta. 18 Desember 1961. No. 611218 GM 10 (12316).
- 329) Presiden Soekarno bersama Sri Sultan Hamengku Buwono Ke-IX sedang berjalan meninggalkan pesawat di Pangkalan Udara Adisucipto, Yogyakarta. 18 Desember 1961. No. 611218 GM 13 (12317).
- 330) Presiden Soekarno bersama Sri Sultan Hamengku Buwono Ke-IX dan para pejabat sedang menunggu di pinggir landasan pesawat saat tiba di Pangkalan Udara Adisucipto, Yogyakarta. 18 Desember 1961. No. 611218 GM 18 (12318).
- 331) Sri Sultan Hamengku Buwono Ke-IX sedang menyambut para pejabat saat tiba di Pangkalan Udara Adisucipto, Yogyakarta. Tampak: Sri Paku Alam Ke-VIII. 18 Desember 1961. No. 611218 GM 3 (12319).
- 332) Rombongan Presiden Soekarno sedang berjalan meninggalkan pesawat "*Garuda Indonesia Airways* PK-GCS" setelah tiba di Pangkalan Udara Adisucipto, Yogyakarta. Tampak: Sri Sultan Hamengku Buwono Ke-IX dan Sri Paku Alam Ke-VIII. 18 Desember 1961. No. 611218 GM 17 (12320).

- 333) Rombongan Presiden Soekarno sedang berjalan meninggalkan pesawat "Garuda Indonesia Airways PK-GCS" setelah tiba di Pangkalan Udara Adisucipto, Yogyakarta. 18 Desember 1961. No. 611218 GM 19 (12321).
- 334) Rombongan Presiden Soekarno sedang berjalan meninggalkan pesawat "Garuda Indonesia Airways PK-GCS" setelah tiba di Pangkalan Udara Adisucipto, Yogyakarta. Tampak: Menteri Kesehatan, Dr. Satrio. 18 Desember 1961. No. 611218 GM 1 (12322).
- 335) Rombongan Presiden Soekarno sedang menunggu intruksi lebih lanjut saat tiba di Pangkalan Udara Adisucipto, Yogyakarta. Tampak: Ali Sastra Amidjaya, Dr. J. Leimena, Dr. Subandrio, Dr. Chaerul Saleh. 18 Desember 1961. No. 611218 GM 15 (12323).
- 336) Rombongan Presiden Soekarno sedang menunggu intruksi lebih lanjut saat tiba di Pangkalan Udara Adisucipto, Yogyakarta. 18 Desember 1961. No. 611218 GM 20 (12324).
- 337) Upacara militer penyambutan kedatangan Presiden Soekarno beserta rombongan siap dilaksanakan di Pangkalan Udara Adisucipto, Yogyakarta. 18 Desember 1961. No. 611218 GM 2 (12325).
- 338) Upacara militer penyambutan kedatangan Presiden Soekarno beserta rombongan siap dilaksanakan di Pangkalan Udara Adisucipto, Yogyakarta. 18 Desember 1961. No. 611218 GM 4 (12326).
- 339) Upacara militer penyambutan kedatangan Presiden Soekarno beserta rombongan sedang dilaksanakan di Pangkalan Udara Adisucipto, Yogyakarta. 18 Desember 1961. No. 611218 GM 6 (12327).
- 340) Rombongan Presiden Soekarno yang menjadi para tamu ikut serta dalam upacara militer penyambutan kedatangan Presiden Soekarno di Pangkalan Udara Adisucipto, Yogyakarta. 18 Desember 1961. No. 611218 GM 5 (12328).
- 341) Presiden Soekarno sedang berjalan meninggalkan upacara militer penyambutan setelah upacara militer selesai di Pangkalan Udara Adisucipto, Yogyakarta. 18 Desember 1961. No. 611218 GM 7 (12329).

- 342) Presiden Soekarno sedang beramah-tamah dengan panitia penyambutan setelah upacara militer selesai dilaksanakan di Pangkalan Udara Adisucipto, Yogyakarta. 18 Desember 1961. No. 611218 GM 8 (12330).
- 343) Iringan mobil yang membawa rombongan Presiden Soekarno disaksikan sepanjang jalan oleh masyarakat menuju Alun-alun Utara, Yogyakarta. 18 Desember 1961. No. 611218 GM 21 (12331).
- 344) Para rombongan Presiden Soekarno sudah menempatkan diri di tempat yang disediakan untuk mendengarkan pidato Presiden Soekarno tentang Trikora di Alun-alun Utara, Yogyakarta. 18 Desember 1961. No. 611218 GM 25 (12332).
- 345) Para rombongan Presiden Soekarno sudah menempatkan diri di tempat yang disediakan untuk mendengarkan pidato Presiden Soekarno tentang Trikora di Alun-alun Utara, Yogyakarta. Tampak: Sri Paku Alam Ke-VIII, Dr. Satryo. 19 Desember 1961. No. 611219 GM 15 (12333).
- 346) Para rombongan Presiden Soekarno sudah menempatkan diri di tempat yang disediakan untuk mendengarkan pidato Presiden Soekarno tentang Trikora di Alun-alun Utara, Yogyakarta. Tampak: Sri Paku Alam Ke-VIII, Dr. Satryo. 19 Desember 1961. No. 611219 GM 12 (12334).
- 347) Para rombongan Presiden Soekarno sudah menempatkan diri di tempat yang disediakan untuk mendengarkan pidato Presiden Soekarno tentang Trikora di Alun-alun Utara, Yogyakarta. Tampak: Dr. Satryo. 19 Desember 1961. No. 611219 GM 13 (12335).
- 348) Presiden Soekarno dan rombongan sudah menematkan diri di tempat yang disediakan untuk membahas tentang Trikora (pembebasan Irian Barat) di Alun-alun Utara, Yogyakarta. Tampak: Dr. Cherul Saleh, Dr. J. Leiminea, Soebandrio. 19 Desember 1961. No. 611219 GM 25 (12336).
- 349) Presiden Soekarno sedang menyampaikan pidato didepan masyarakat Yogyakarta tentang Trikora (pembebasan Irian Barat) di Alun-alun Utara, Yogyakarta. 19 Desember 1961. No. 611219 GM 1 (12337).
- 350) Presiden Soekarno sedang menyampaikan pidato di depan masyarakat Yogyakarta tentang Trikora (pembebasan Irian Barat) di Alun-alun Utara, Yogyakarta. 19 Desember 1961. No. 611219 GM 7 (12338).

- 351) Presiden Soekarno sedang menyampaikan pidato di depan masyarakat Yogyakarta tentang Trikora (pembebasan Irian Barat) di Alun-alun Utara, Yogyakarta. 19 Desember 1961. No. 611219 GM 13 (12339).
- 352) Presiden Soekarno sedang menyampaikan pidato di depan masyarakat Yogyakarta tentang Trikora (pembebasan Irian Barat) di Alun-alun Utara, Yogyakarta. 19 Desember 1961. No. 611219 GM 7 (12340).
- 353) Presiden Soekarno sedang menyampaikan pidato di depan masyarakat Yogyakarta tentang Trikora (pembebasan Irian Barat) di Alun-alun Utara, Yogyakarta. 19 Desember 1961. No. 611219 GM 11 (12341).
- 354) Presiden Soekarno sedang menyampaikan pidato di depan masyarakat Yogyakarta tentang Trikora (pembebasan Irian Barat) di Alun-alun Utara, Yogyakarta. 19 Desember 1961. No. 611219 GM 22 (12342).
- 355) Presiden Soekarno sedang menyampaikan pidato di depan masyarakat Yogyakarta tentang Trikora (pembebasan Irian Barat) di Alun-alun Utara, Yogyakarta. 19 Desember 1961. No. 611219 GM 18 (12343).
- 356) Presiden Soekarno sedang menyampaikan pidato di depan masyarakat Yogyakarta tentang Trikora (pembebasan Irian Barat) di Alun-alun Utara, Yogyakarta. 19 Desember 1961. No. 611219 GM 23 (12344).
- 357) Presiden Soekarno sedang menyampaikan pidato dengan semangat di depan masyarakat Yogyakarta tentang Trikora (pembebasan Irian Barat) di Alun-alun Utara, Yogyakarta. 19 Desember 1961. No. 611219 GM 17 (12345).
- 358) Presiden Soekarno sedang menyampaikan pidato di depan masyarakat Yogyakarta tentang Trikora (pembebasan Irian Barat) di Alun-alun Utara, Yogyakarta. Tampak para tentara sedang memberi hormat kepada Presiden Soekarno. No. 611219 GM 8 (12346).
- 359) Menteri Kesehatan, Dr. Satriyo sedang menyampaikan pidato di depan masyarakat Yogyakarta tentang Trikora (pembebasan Irian Barat) di Alun-alun Utara, Yogyakarta. 19 Desember 1961. No. 611219 GM 4 (12347).

- 360) Suasana masyarakat yang mengikuti pidato Presiden Soekarno tentang Trikora (pembebasan Irian Barat) di Alun-alun Utara, Yogyakarta. 19 Desember 1961. No. 611219 GM 9 (12348).
- 361) Suasana masyarakat yang mengikuti pidato Presiden Soekarno tentang Trikora (pembebasan Irian Barat) di Alun-alun Utara, Yogyakarta. 19 Desember 1961. No. 611219 GM 9 (12349).
- 362) Menteri Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Desa, Achmadi sedang membacakan naskah Trikora tentang Pembebasan Irian Barat di Alun-alun Utara, Yogyakarta. 19 Desember 1961. No. 611219 GM 21 (12350).
- 363) Menteri Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Desa, Achmadi sedang menyampaikan pidato naskah Trikora tentang Pembebasan Irian Barat di Alun-alun Utara, Yogyakarta. 19 Desember 1961. No. 611219 GM 12 (12351).
- 364) Presiden Soekarno didampingi Achmadi sedang menandatangani naskah pelaksanaan Trikora tentang Pembebasan Irian Barat di Alun-alun Utara, Yogyakarta. 19 Desember 1961. No. 611219 GM 24 (12352).
- 365) Para barisan militer yang sedang berjaga dalam pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara, Yogyakarta. 19 Desember 1961. No. 611219 GM 5 (12353).
- 366) Para barisan militer yang sedang berjaga dalam pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara, Yogyakarta. 19 Desember 1961. No. 611219 GM 10 (12354).
- 367) Para barisan militer yang sedang berjaga dalam pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara, Yogyakarta. 19 Desember 1961. No. 611219 GM 6 (12355).
- 368) Para barisan militer yang sedang berjaga dalam pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara, Yogyakarta. 19 Desember 1961. No. 611219 GM 14 (12356).

b. Daftar Arsip Foto Kementerian Penerangan Jawa Tengah 1950-1965

- 369) Rapat Trikora, Rapat Trikora dengan isi: Gagalkan pembentukan negara boneka di Papua buatan Belanda, Kibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat, Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan tanah air dan bangsa, Desember 1961. (No. 632, 633, 635, 636, 637, 639).

c. Daftar Arsip Foto Kementerian Penerangan Irian Barat 1957-1964

- 370) Suasana upacara militer, pasukan tentara yang bersiap berperang. (No. 63-7447)
- 371) Suasana ketika pasukan tentara berada di atas kapal perang. (No. 63-7449)
- 372) Markas tentara di Irian Barat. (No. 63-7476)
- 373) Tentara sedang membaca peta pertempuran. (No. 63-7485)
- 374) Suasana pantai ketika pasukan tentara berusaha mendorong kapal ke tengah laut. (No. 63-7492)
- 375) Pasukan tentara berada di hutan ketika pertempuran berlangsung. (No. 63-7497)
- 376) Para tentara sedang mengamankan perairan. (No. 63-7500)
- 377) Suasana ketika para tentara dalam pertempuran di laut. (No. 63-7504)
- 378) Suasana ketika sedang rapat militer. (No. 63-7507)
- 379) Tentara sedang melakukan pertempuran di hutan. (No. 63-7514)
- 380) Tentara sedang sibuk membunyikan radio untuk mendengarkan berita. (No. 63-7523)
- 381) Para tentara sedang memperhatikan salah seorang anggota sedang memperagakan senjata api. (No. 63-7537)
- 382) Sebuah pesawat terbang milik AURI. (No. 63-9211)

4. Arsip Film

a. Daftar Arsip Film PPFN: Seri Siaran Khusus 1959-1978

383) Judul: Komando Rakyat Untuk Pembebasan Irian Barat (Bagian 1)

Nomor Film	SK 33 R1	
Durasi	10'42"	
Tahun Produksi	1961	
Narasi	Bahasa Indonesia	
Warna	Hitam Putih	
Produksi	PFN	
Copyright	PPFN	
Format/No. Kaset	UMATIC	0049
	DVD	0002 DVD-RK/2010 (Track 2)
Sinopsis	<p>Pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengumandangkan TRIKORA (Tri Komando Rakyat) yang pertama kali diumumkan dalam sebuah pidato di Alun-Alun Utara Yogyakarta. Hal ini sebagai bentuk respon cepat dari pemerintah Indonesia atas tindakan kolonial Belanda yang mendeklarasikan kemerdekaan Negara boneka Irian Barat. TRIKORA ini berisi hal-hal sebagai berikut: Gagalkan Pembentukan Negara boneka Papua buatan Kolonial Belanda, Kibarkan Sang merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia, Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah Air dan Bangsa. TRIKORA kala itu mendapat sambutan luar biasa dari rakyat Indonesia. Ribuan rakyat secara sukarela meminta agar dikirim ke Irian Barat.</p>	
Uraian Informasi		Time Code
<i>Opening</i> Siaran Khusus No. 33.		00.01
Judul: Komando Rakyat untuk Pembebasan Irian Barat.		00.22
Aktivitas di jalan sekitaran Tugu Yogyakarta.		00.27
Di Museum Perjuangan Yogyakarta, tampak tembok bangunan yang penuh mural mengenai Perlawanan terhadap penjajah Belanda semenjak pergerakan nasional sebagai kebangkitan dan kesadaran rakyat akan harga diri sebagai bangsa.		00.39
Memperingati Revolusi Nasional Indonesia pada tanggal 19 Desember 1948, suasana di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Semaki, Yogyakarta. Terdengar lagu "Mengheningkan		02.01

Cipta”.	
Sekilas tampak dari kejauhan suasana di Gedung Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.	02.25
Di Lapangan Terbang Adi Sucipto, tampak Sri Sultan Hamengku Buwono ke IX menyambut kedatangan pesawat Garuda membawa rombongan Menteri kabinet kerja dan kepala-kepala perwakilan negara asing yang turun satu persatu dari tangga pesawat.	02.30
Tampak kedatangan Pesawat T-401 di Lapangan Terbang Adi Sucipto, suasana penyambutan kedatangan Presiden Soekarno oleh Sri Sultan Hamengku Buwono ke IX, para Menteri kabinet kerja, para Korp Diplomatic, Pejabat Militer, Pejabat Sipil setempat, dan disambut oleh Barisan Kehormatan. Tampak spanduk bertuliskan “Siap Melaksanakan Komando” di pintu kedatangan Bandara Udara Adi Sucipto.	03.09
19 Desember 1961 di kawasan Tugu Yogyakarta, tampak ratusan orang berdiri di pinggir jalan menyaksikan kedatangan Presiden Soekarno beserta rombongan iring-iringan menuju Alun-alun Utara.	03.58
Tampak mobil yang membawa Presiden Soekarno memasuki Alun-Alun Utara Yogyakarta. Presiden Soekarno menuju panggung terbuka dan melambaikan tangan sebagai wujud salam untuk rakyat Indonesia.	04.35
Ribuan rakyat Indonesia berdiri berkumpul di Alun-Alun Utara berdesak-desakan untuk menyaksikan Komando dari Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi Nasional Indonesia.	05.07
Para Menteri Kabinet Kerja, kepala-kepala perwakilan negara asing dan pejabat militer tampak duduk di bangku tenda khusus tamu undangan.	05.40
Sri Sultan Hamengku Buwono ke IX sebagai Kepala Daerah Yogyakarta memberikan sambutan antara lain mengenai peristiwa 13 tahun yang lalu pada tanggal 19 Desember 1948 Indonesia menghadapi Penjajah Belanda di Kota Yogyakarta dan mengingatkan kemungkinan sebentar lagi Indonesia akan menghadapi penjajah di kota lain.	05.57
Presiden Soekarno memberikan amanat antara lain mengenai peristiwa 13 tahun yang lalu yaitu Agresi Militer II seperti yang telah disampaikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX bahwa Indonesia terutama Yogyakarta sebagai Ibu Kota Indonesia pada saat itu di serang oleh pihak Belanda. Presiden Soekarno mengingatkan kembali bahwa Indonesia telah melewati 2 Agresi Militer dari Belanda tepatnya pada tanggal 27 Mei 1947 Agresi	06.32

Militer I dan 19 Desember 1948 Agresi Militer II. Namun pada dasarnya Belanda beratus-ratus kali menjalankan aksi militer kepada Bangsa Indonesia. Presiden Soekarno juga menyampaikan bahwa Belanda sudah datang ke Indonesia pada tahun 1596 ditandai oleh mendaratnya Laksamana De Houtman di Banten. Selanjutnya Presiden Soekarno menyampaikan mengenai Konsekuensi logis daripada Politik Konfrontasi di segala bidang.	
<i>Closing.</i>	10.42

384) Judul: Komando Rakyat Untuk Pembebasan Irian Barat (Bagian 2)

Nomor Film	SK 33 R2	
Durasi	08'30"	
Tahun Produksi	1961	
Narasi	Bahasa Indonesia	
Warna	Hitam Putih	
Produksi	PFN	
Copyright	PPFN	
Format/No. Kaset	DVD	0002 DVD-RK/2010 (Track 0002)
Sinopsis	Presiden Soekarno Soekarno menyerukan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) Pembebasan Irian Barat di Alun-alun Utara Keraton Yogyakarta, 19 Desember 1961. Presiden di hadapan ribuan masyarakat Yogyakarta menyerukan untuk menggagalkan pembentukan Negara Papua dan kibaran Bendera Merah Putih di Irian Barat. Presiden menyampaikan rasa terima kasih kepada PBB dan Negara Sosialis atas bantuannya memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.	
Uraian Informasi		Time Code
(Lanjutan) Siaran Khusus No. 33 R2; Judul: Komando Rakyat Untuk Pembebasan Irian Barat (Bagian 2).		00.01
Pidato Presiden Soekarno menyerukan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) di hadapan ribuan masyarakat Yogyakarta, di Alun-alun Utara Yogyakarta.		00.12
Ribuan masyarakat Yogyakarta memenuhi Alun-alun Utara, Keraton Kasultanan Yogyakarta.		01.56
Presiden menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Negara-negara Sosialis atas bantuannya memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Tampak berbagai spanduk yang		02.07

berasal dari organisasi masyarakat (Ormas) dan Organisasi Keagamaan.	
Berbagai elemen masyarakat seperti pelajar, buruh, dan pedagang ikut menyaksikan pidato TRIKORA Bung Karno di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yogyakarta.	05.42
Pembacaan Tri Komando Rakyat dibacakan menteri Sekretaris Dewan Pertahanan nasional Menteri Ahmadi. Tampak barisan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.	06.01
Pembacaan Isi Tri Komando Rakyat (TRIKORA): <ol style="list-style-type: none"> 1. Gagalakan pembentukan "Negara Papua" bikinan Belanda kolonial; 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia; 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. 	07.21
Presiden Soekarno menandatangani Perintah pelaksanaan TRIKORA.	08.07
Presiden Soekarno berjalan di antara kerumunan masyarakat Yogyakarta.	08.18
Tamat.	08.24
<i>Closing.</i>	08.30

385) Judul: Semangat Tri Komando Menggelora Di Sulawesi Selatan/Tenggara

Nomor Film	SK 34	
Durasi	10'38"	
Tahun Produksi	1961	
Narasi	Bahasa Indonesia	
Warna	Hitam Putih	
Produksi	PFN	
Copyright	PPFN	
Format/No. Kaset	BETACAM	0168
	DVD	0092 DVD-RK/2010 (Track 3).
Sinopsis	Presiden berkunjung ke Sulawesi Selatan dengan tujuan kota Makasar, Pare-pare; dan Bone untuk mendengarkan semangat Trikora Pembebasan Irian Barat. Di samping itu Presiden bersama Astronaut Gherman Titov berkunjung ke UNHAS untuk mengisi seminar pengalaman 25 jam di ruang angkasa. Dalam kunjungan di Sulawesi Selatan ini, nyawa Presiden	

	Soekarno juga terancam dengan adanya Peristiwa berdarah Cenderawasih yang telah menewaskan 4 orang.
Uraian Informasi	Time Code
<i>Opening</i> Siaran Khusus No. 34.	00.01
Judul: Semangat Tri Komando Menggelora Di Sulawesi Selatan/Tenggara	00.17
Pemandangan sebuah dermaga di Kota Makasar.	00.21
Pemandangan jalanan di Kota Makasar.	00.26
Spanduk bertuliskan “BUNG KARNO WE’RE READY TO FULFILL OUR NATIONAL DUTY”.	00.43
Di nisan Robert Wolter Mongisidi, Presiden Soekarno meletakkan karangan bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Panaikang, Makasar.	00.48
Penghormatan dan mengheningkan cipta kepada para pahlawan.	00.57
Presiden Soekarno menaburkan bunga di sebuah makam pahlawan.	01.07
Presiden dan rombongan mengajak para duta luar negeri untuk meninjau tempat penggemblengan (baca: pendidikan) TNI AD di Resimen Induk Infanteri, Makasar.	01.21
Presiden menerima kenang-kenangan dan kalungan bunga.	02.12
Presiden Soekarno memperkenalkan astronaut dari Uni Soviet (Rusia) Gherman Titov kepada Rektor Universitas Hasanuddin (UNHAS) Prof. Arnold Mononutu.	02.26
Presiden Soekarno memasuki aula Universitas Hasanuddin, Makasar.	02.41
Rektor UNHAS, Prof. Arnold Mononutu menyampaikan sambutannya.	02.46
Gherman Titov menyampaikan pengalamannya 25 jam di ruang angkasa.	03.01
Gherman Titov memberikan sebuah buku tentang “Perjalanan ke Ruang Angkasa” kepada Prof. Arnold Mononutu.	03.10
Presiden Soekarno menyampaikan sambutannya tentang kepahlawanan luar angkasa Gherman Titov demi kepentingan ilmu pengetahuan dsb.	03.17
Barisan berkuda ikut menyemarakkan suasana.	03.31
Masyarakat Makasar berjejal di sepanjang jalan menunggu kedatangan Presiden Soekarno dan rombongan.	03.38
Sambil melambaikan tangan, terdengar teriakan kata “Merdeka”	04.08

Presiden Soekarno di depan jutaan masyarakat Makasar.	
Presiden memperkenalkan Gherman Titov kepada masyarakat Makasar.	04.21
Menteri Keamanan KSAD Jenderal A.H. Nasution menyampaikan pidato pembebasan Irian Barat.	04.35
Presiden Soekarno duduk di kursi kehormatan.	04.43
Presiden Soekarno menyampaikan amanatnya tentang pembebasan Irian Barat di depan jutaan masyarakat Makasar.	04.49
Presiden Soekarno dengan sebuah helikopter tiba di Kota Pare-pare.	05.11
Terbentang spanduk “SELAMAT DATANG PRESIDEN SOEKARNO PANGLIMA BESAR PEMBEBASAN IRIAN BARAT”.	05.20
Presiden turun dari helikopter dan disambut para gadis Pare-pare.	05.26
Presiden secara simbolis membuka pintu gerbang Pare-pare.	05.38
Presiden dan rombongan menuju kota Pare-pare.	05.57
Presiden dan rombongan tiba di Lapangan Andi Makkasau Pare-pare dan memperkenalkan Duta Besar Amerika Serikat, Howard P. Jones.	06.11
Spanduk bertuliskan “BARISAN SUKARELA WANITA SIAP LAKSANAKAN TRI KOMANDO RAKYAT”.	06.21
Presiden bersama Howard P. Jones menyerukan kata “merdeka” di depan jutaan masyarakat Pare-pare.	06.27
Presiden Soekarno berpidato tentang pembebasan Irian Barat.	06.50
Presiden Soekarno dengan sebuah helikopter tiba di Kota Sinjai.	07.13
Presiden melambaikan tangan di depan masyarakat Kota Sinjai.	07.41
Masyarakat Sinjai dengan pakaian adat setempat.	07.54
Presiden Soekarno memperkenalkan putra-putra Irian Barat.	07.57
Presiden Soekarno berpidato tentang semangat kemerdekaan.	08.18
Tampak beberapa polisi militer sedang berjaga.	08.50
Polisi militer menuju lokasi ledakan granat Peristiwa Cenderawasih terkait adanya usaha pembunuhan terhadap Presiden Soekarno.	09.01
Di Rumah Sakit Angkatan Darat Pelamonia, dari total 33 korban ledakan granat, 4 orang meninggal dunia dan 14 orang di antaranya perlu dirawat.	09.30
Presiden Soekarno bersama rombongan berpamitan dengan Pangdam XIV Kolonel M. Jusuf.	09.58
Presiden Soekarno menaiki tangga pesawat dan melambaikan tangan.	10.21
Masyarakat dengan membawa Bendera Merah Putih	10.26
Tamat.	10.31

<i>Closing.</i>	10.38
-----------------	-------

386) Judul: Pelaksanaan Tri Komando Rakjat: Pelantikan K.S.A.U Laksamana Muda Udara Omar Dani

Nomor Film	SK 37	
Durasi	09'07"	
Tahun Produksi	1962	
Narasi	Bahasa Indonesia	
Warna	Hitam Putih	
Produksi	PFN	
Copyright	PPFN	
Format/No. Kaset	UMATIC	0049.
	DVD	0040 DVD-SK/2010 (Track 6); 0125 DVD-FILM/2012 (Track 2).
Sinopsis	Presiden Soekarno menyampaikan perintah harian pembebasan Irian Barat disela-sela pelantikan Laksamana Muda Udara Omar Dani sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (K.S.A.U) menggantikan Laksamana Udara R. Suryadharma. Presiden juga menyampaikan kepada angkatan perang (TNI) dan pemerintah RI agar bekerja keras untuk memperkuat daya tempur pasukannya.	
Uraian Informasi		Time Code
<i>Opening</i> Siaran Khusus No. 37.		00.01
Judul: Pelaksanaan Tri Komando Rakjat: Pelantikan K.S.A.U Laksamana Muda Udara Omar Dani.		00.19
Barisan tentara dalam upacara militer di Istana merdeka, Jakarta.		00.24
Tampak dari kejauhan, Presiden Soekarno menuruni tangga Istana Merdeka menuju mimbar.		00.30
Komandan upacara menyiapkan pasukannya dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan.		00.37
Tampak barisan Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) dengan Panji-panji "Swa Bhuwana Paksa".		01.16
Para tamu undangan yang hadir dalam Pelantikan Pelantikan Laksamana Muda Udara Omar Dani sebagai K.S.A.U.		01.31
Presiden Soekarno menyampaikan amanatnya dalam Pelantikan Laksamana Muda Udara Omar Dani sebagai K.S.A.U.		01.38
Pesan Presiden Soekarno terkait pembebasan Irian Barat.		04.41

Presiden Soekarno membacakan perintah harian pembebasan Irian Barat dan serah terima jabatan KSAU dari Laksamana Udara R. Suryadharma kepada Laksamana Muda Udara Omar Dani.	05.41
Presiden Soekarno meminta angkatan perang dan pemerintah RI bekerja keras untuk memperkuat daya tempur.	07.17
Dentuman meriam tank.	07.48
latihan militer TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Kepolisian Negara dalam melaksanakan Trikora pembebasan Irian Barat.	07.51
<i>Closing.</i>	09.07

387) Judul: Kunjungan P.J.M. Presiden Soekarno di Palembang dan Djambi

Nomor Film	SK 38	
Durasi	10'16"	
Tahun Produksi	1962	
Narasi	Bahasa Indonesia	
Warna	Hitam Putih	
Produksi	PFN	
Copyright	PPFN	
Format/No. Kaset	DVD	0431 DVD-RK/2010 (Track 3).
Sinopsis	Pada 10 April 1962 Presiden Soekarno berkunjung ke Palembang dalam rangka kampanye bertajuk "revolusi pancamuka" pembebasan Irian Barat. Presiden berkenan meninjau pembangunan Proyek Jembatan Sungai Musi, Pabrik Pupuk Sriwijaya, Gedung Wanita, dan Pembangunan RRI di Palembang. Di Jambi Presiden juga berbicara tentang Tri Komando Pembebasan Irian Barat.	
Uraian Informasi		Time Code
<i>Opening</i> Siaran Khusus No. 38.		00.01
Judul: Kunjungan P.J.M. Presiden Soekarno Di Palembang dan Djambi.		00.21
Pemandangan udara Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan.		00.26
Aktivitas masyarakat di Sungai Musi. Tampak kegiatan di perahu sampan.		00.35
Pemandangan rumah-rumah warga di bantaran Sungai Musi.		00.57
Potret jual beli dengan perahu sampan.		01.00
Di tepi Sungai Musi, tampak pabrik penyaringan minyak, Stanvac.		01.12
Para gadis berpakaian adat Palembang.		01.21
Pada 10 April 1962, Presiden Panglima Tertinggi Soekarno tiba di Palembang. Tampak sedang menuruni tangga pesawat.		01.26

Panglima Kodam (Pangdam) IV Kolonel Harun Sohar dan Gubernur Ahmad Bastari menyambut kedatangan Presiden Soekarno.	01.32
Presiden Soekarno mendapat Kalungan bunga ucapan selamat datang.	01.42
Presiden Soekarno memberikan hormat kepada pasukan.	01.52
Rapat raksasa pembebasan Irian Barat oleh Presiden Soekarno.	02.01
Presiden Soekarno tampak melambaikan tangan ke ribuan massa yang hadir dalam rapat raksasa.	02.11
Pangdam IV Kolonel Harun Sohar menyampaikan sambutannya.	02.31
Menteri Penerangan, Mayjen Ahmadi selaku Bapak Sukarelawan Pembebasan Irian Barat menyampaikan pidato sambutannya.	02.41
Presiden Soekarno menyampaikan pidatonya tentang “revolusi pancamuka”	02.51
Kepala Perwakilan asing diperkenalkan antara lain: Duta Besar (Dubes) Jepang Takio Oda dan Dubes Uni Sovyet Mikhailov.	03.07
Gapura “Selamat Datang”, Bendera Merah Putih, Burung Garuda Pancasila.	03.20
Iring-iringan kendaraan Presiden Soekarno.	03.28
Maket pembangunan jembatan Sungai Musi, Palembang.	03.37
Presiden Soekarno tampak memasuki kapal dan segera berlayar.	03.46
Presiden Soekarno turun dari kapal.	03.59
Sambutan masyarakat dengan membawa bendera merah putih mengiringi kedatangan Presiden Soekarno.	04.04
Tampak tiang pancang pembangunan Jembatan Sungai Musi.	04.09
Pemancangan tiang pertama oleh Presiden Soekarno dengan membuka keran. Tampak Para fotografer tengah mengabadikan gambar.	04.13
Presiden Soekarno tampak kembali masuk ke kapal.	04.49
Potret proyek pembangunan Jembatan Sungai Musi sepanjang 1200 Meter.	04.57
Kapal rombongan Presiden Soekarno melewati Proyek Pupuk Sriwijaya.	05.23
Presiden Soekarno tiba di Pabrik Pupuk Sriwijaya. Tampak sambutan meriah dari para pegawai Pupuk Sriwijaya.	05.31
Presiden Soekarno meresmikan Pembukaan Gedung Wanita Palembang.	05.57
Presiden Soekarno meresmikan Gedung Radio Republik Indonesia (RRI) Palembang.	06.41
Pemandangan sebuah sungai dan kota Jambi.	07.13
Potret Pembangunan Gedung DPRD/Gubernur Jambi.	07.19
Poster Presiden Soekarno dan tulisan “Irian-Barat Menunggu” dan “Mari Kita Laksanakan Tri Komando”.	07.29
Gadis-gadis berpakaian adat di bersiap Bandara.	07.37
Presiden Soekarno menuruni tangga pesawat disambut dengan kalungan bunga dan barisan kehormatan militer.	07.47

Beribu masyarakat Jambi berkumpul di Lapangan Garuda.	08.14
Menteri Penerangan Mr. Mohammad Yamin menyampaikan pidatonya.	08.21
Pekik kemerdekaan dipimpin oleh Presiden Soekarno.	08.37
Dubes Amerika Howard P. Jones, Dubes Uni Soviet Mikhailov Dubes RRT, dan Dubes Jepang Takio Oda bergantian mengucapkan pekik merdeka.	08.55
Presiden Soekarno ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Satia Bhakti.	09.12
Kedatangan Presiden Soekarno dan rombongan di kantor Gubernur disambut secara adat.	09.26
Gubernur Jambi, Kolonel Yusuf Sengidikani menyerahkan gong sebagai tanda pembebasan Irian Barat, kepada Presiden Soekarno	09.36
Presiden Soekarno naik tangga pesawat.	09.56
<i>Closing.</i>	10.16

388) Judul: Kundjungan P.J.M. Soekarno di Medan dan Kutaradja.

Nomor Film	SK 39	
Durasi	10'25"	
Tahun Produksi	1962	
Narasi	Bahasa Indonesia	
Warna	Hitam Putih	
Produksi	PFN	
Copyright	PPFN	
Format/No. Kaset	BETACAM	0051
	DVD	0073 DVD-RK/2010 (Track 8).
Sinopsis	Kunjungan Presiden Soekarno ke Medan Sumatera Utara dan Kutaradja, Aceh untuk menyampaikan konsepsi Tri Komando Rakyat (Trihora) dan Pembebasan Irian Barat. Presiden juga berkenan meninjau berbagai pembangunan di dua kota tersebut.	
Uraian Informasi		Time Code
<i>Opening</i> Siaran Khusus No. 39.		00.01
Judul: Kundjungan P.J.M. Soekarno di Medan dan Kutaradja.		00.21
Pemandangan perbukitan di Sumatera Utara.		00.27
Pemuda pemuda Medan dengan mengenakan pakaian adat Batak bersiap menyambut kedatangan Presiden Soekarno di Bandara Polonia, Medan.		00.31
26 April 1962, Presiden Soekarno tiba di Bandara Polonia Medan disambut Deputi KSAD wilayah Sumatera Brigjen Suprpto. Tampak Presiden menuruni tangga pesawat.		00.44
Presiden Soekarno memeriksa barisan kehormatan militer.		01.04

Presiden Soekarno mendapat kalungan bunga.	01.20
Iring-iringan kendaraan Presiden Soekarno dan rombongan menuju Lapangan Merdeka Medan. Tampak spanduk bertuliskan “Selamat Datang P.J.M Presiden dan Rombongan”.	01.27
Sekitar 1,5 juta masyarakat Medan berkumpul di Lapangan Merdeka.	01.38
Presiden Soekarno melambaikan tangan kepada masyarakat Medan.	01.42
Pangdam II A. Lubis menyampaikan sambutannya.	02.01
Menteri Luar Negeri Subandrio menyampaikan sambutannya.	02.07
Presiden Soekarno bersiap menyampaikan amanatnya.	02.14
Tampak beberapa orang berada di bawah gedung bertuliskan PFN (baca: Perusahaan Film Negara).	02.28
Para fotografer dan kameramen sedang mendokumentasikan pidato Trikora Presiden Soekarno.	02.48
Tepuk tangan meriah dari masyarakat Kota Medan.	03.01
Plang bertuliskan “Pembangunan Gedung Manipol-Medan”	03.05
Presiden Soekarno berdiri di atas mimbar dalam rangka upacara peletakan batu pertama Pembangunan Gedung Manipol-Medan.	03.10
Secara seremonial, Presiden mengambil adonan semen dan batu bata.	03.17
Sebuah maket Gedung Manipol-Medan.	03.22
Tampak Presiden Soekarno mengamati maket Gedung Manipol-Medan.	03.25
Menteri Perindustrian Chaerul Saleh berpidato untuk mengajak rakyat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.	03.33
Presiden Soekarno dalam pidato penutupannya berharap agar masyarakat paham tentang konsepsi Manipol.	03.55
Dua gadis kecil tampak sedang bermain di tepi pantai.	04.13
Presiden Soekarno dan rombongan tiba di Kutaradja.	04.21
Presiden Soekarno menuruni tangga pesawat.	04.24
Presiden Soekarno diterima oleh Pangdam I Kolonel Jasin dan Gubernur Aceh Ali Hasjmy.	04.26
Presiden Soekarno memeriksa barisan kehormatan.	04.38
Presiden Soekarno mendapatkan kalungan bunga	04.47
Iring-iringan kendaraan Presiden Soekarno dan rombongan menuju Lapangan Gajah, Kutaradja.	04.54
Presiden Soekarno tiba di lokasi dan melambaikan tangan ke ribuan masyarakat Kutaradja.	04.58
Pangdam I Kolonel Jasin menyampaikan sambutannya.	05.14
Menteri Achmadi menyampaikan sambutannya.	05.18
Pidato Presiden Soekarno tentang Trikora dan Pembebasan Irian Barat.	05.31
Perkenalan dengan Duta Besar dari Amerika Serikat; Duta Besar Uni Soviet (Rusia); dan Duta Besar RRT (China).	06.14
Presiden Soekarno berkunjung ke gedung Universitas Syiah Kuala.	06.33
Presiden Soekarno berkenan menandatangani sebuah piagam.	06.58
Presiden Soekarno melantik Kolonel Jasin menjadi Presiden	07.25

Universitas Syiah Kuala.	
Presiden Soekarno sembahyang Sholat Jum'at di Masjid Agung, Kutaradja.	07.33
Maket Masjid Agung, Kutaradja.	07.54
Presiden Soekarno meninjau area pembangunan Masjid Agung, Kutaradja.	07.57
Presiden Soekarno dan rombongan meninggalkan Masjid Agung, Kutaradja.	08.10
Presiden Soekarno berkenan meletakkan batu pertama pembangunan Universitas Islam Aceh.	08.19
Plang nama bertulisan "Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Istimewa Atjeh".	08.41
Di depan Sidang Dewan DPRD-GR Aceh, Presiden Soekarno menyampaikan bahwa Revolusi Indonesia belum berakhir.	08.45
Seorang pria berusia 120 tahun dari Sabang menyerahkan sebuah bendera merah putih kepada Presiden Soekarno untuk ditancapkan di Irian Barat.	09.13
Sumbangan lain berupa tugu dari emas dan lukisan pahlawan wanita Cut Meutia kepada Presiden Soekarno.	09.34
Kolonel Jasin menyerahkan cek Rp. 30 juta untuk dana perjuangan Irian Barat.	10.00
Tampak Pesawat Presiden Soekarno bersiap meninggalkan Kutaradja, Aceh.	10.10
<i>Closing.</i>	10.25

389) Judul: 17 Agustus 1962 dengan Semangat Trikora dan Asian Games

Nomor Film	SK 43	
Durasi	08'35"	
Tahun Produksi	1962	
Narasi	Bahasa Indonesia	
Warna	Hitam Putih	
Produksi	PFN	
Copyright	PPFN	
Format/No. Kaset	BETACAM	0031
	DVD	0286 DVD-RK/2010 (Track 4); 0031 DVD-RK/2015 (Track 2).
Sinopsis	Presiden Soekarno berpidato tentang hasil pelaksanaan Tri Komando Rakyat (TriKora) di Irian Barat dalam HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1962. Presiden mengucapkan terima kasih kepada para pejuang dan gerilyawan yang gugur dalam pelaksanaan Trikora. Pada 1 Januari 1963 Bendera	

	Merah Putih akan secara resmi dikibarkan berdampingan dengan bendera PBB di Irian Barat.
Keterangan	<i>Suara kurang jelas.</i>
Uraian Informasi	
	Time Code
<i>Opening</i> Siaran Khusus No. 43.	00.01
Judul: 17 Agustus 1962 Dengan Semangat TRIKORA dan Asian Games.	00.29
Pemandangan jalan, spanduk bertuliskan “Rebut Irian Barat dalam Tahun ini djuga”.	00.36
Berbagai hiasan dan gapura sebagai persiapan Asian Games IV.	00.42
Kerumunan masyarakat di kota Jakarta.	01.00
Tampak seorang kameramen mengoperasikan kamera bertuliskan NHK dan Televisi RI.	01.04
Barisan TNI Angkatan Darat mengawal Presiden Soekarno menuju mimbar. Tampak KSAD Jenderal A.H. Nasution.	01.11
Pasukan pengamanan tampak berjaga di sekitar Istana Merdeka, Jakarta.	01.34
Ribuan masyarakat umum dan para pelajar berkumpul di Istana Merdeka untuk mendengarkan pidato Presiden Soekarno.	01.44
Tampak barisan TNI Angkatan Laut.	02.08
Presiden Soekarno berpidato tentang Semangat Tri Komando Rakyat (TriKora) dan pembebasan Irian Barat di atas mimbar. Tampak para tamu undangan hadir dalam pidato Presiden Soekarno.	02.14
Papan nama bertuliskan “Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia”.	03.16
Presiden Soekarno berbicara tentang hasil Trikora di Irian Barat.	03.43
Presiden Soekarno mengakhiri pidatonya. Tampak Presiden melihat jam tangannya dan segera turun mimbar.	06.00
Pembacaan kembali naskah proklamasi oleh Menteri Perindustrian Dasar Indonesia, Chaerul Saleh di Istana Merdeka, Jakarta.	06.31
Pembacaan doa oleh Menteri Agama, KH. Saifuddin Zuhri. Tampak Presiden Soekarno menundukkan kepala.	06.45
Para kameramen dan fotografer tampak sedang mengabadikan gambar.	07.03
Presiden Soekarno tampak menyerahkan Bendera Pusaka Merah	07.10

Putih kepada pasukan pengibar bendera.	
Pasukan pengibar bendera bersiap menjalankan tugasnya.	07.15
Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.	07.37
Tampak parade pesawat tempur terbang di udara.	08.02
<i>Closing.</i>	08.35

390) Judul: Tahun Kemenangan (1962)

Nomor Film	SK 50	
Durasi	10'50"	
Tahun Produksi	1962	
Narasi	Bahasa Indonesia	
Warna	Hitam Putih	
Produksi	PFN	
Copyright	PPFN	
Format/No. Kaset	DVD	0132 DVD-RK/2010 (Track 5).
Sinopsis	Presiden Soekarno pada pidatonya menyatakan bahwa Tahun 1962 sebagai Tahun Kemenangan atau <i>A Year of Triumph</i> . Indonesia berhasil melakukan pencapaian di segala bidang seperti keamanan, olahraga, sandang, pangan dan juga pembebasan Irian Barat.	
Uraian Informasi		Time Code
<i>Opening</i> : Siaran Khusus No. 50.		00.03
Judul: Tahun Kemenangan.		00.17
Suasana upacara bendera di Istana Merdeka pada tahun 1962. Presiden Soekarno berdiri di podium dan menyampaikan pidatonya. Presiden Soekarno menyampaikan dengan penuh rasa haru tetapi dengan pula penuh rasa keyakinan disampaikan dalam pidato ini tahun 1962 sebagai Tahun Kemenangan. <i>A Year of Triumph</i> . Dengan pendek kata jika perjuangan Bangsa Indonesia didasarkan atas Resopim maka niscaya Triprograme dapat dilaksanakan bahkan tidak ada satu tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh Bangsa Indonesia yang kini hampir 100 juta dan berkekayaan alam yang tiada taranya dimuka bumi, gemah ripah loh jinawi.		00.23
Tampak lautan masyarakat yang berkumpul di halaman Istana Merdeka untuk menyaksikan pidato Presiden Soekarno.		00.36
Masyarakat bertepuk tangan mendengarkan pidato Presiden Soekarno.		00.38
Para pejabat dan pembesar Republik Indonesia yang hadir dan		01.04

mendengarkan pidato Presiden Soekarno dengan khidmat.	
Keamanan.	01.06
Tampak para tentara yang tengah berkoordinasi untuk menjaga keamanan wilayah NKRI dari gerakan separatis. Penyelesaian keamanan berkat Angkatan Bersenjata dengan bantuan rakyat telah berhasil menumpas kaum pemberontak.	01.10
Angkatan Bersenjata terlibat baku tembak dengan anggota gerakan separatis. Tampak Angkatan Bersenjata mengepung daerah yang digunakan sebagai tempat persembunyian tokoh-tokoh gerakan separatis.	01.14
Tentara Angkatan Bersenjata berhasil menangkap Kartosoewirjo yang merupakan pemimpin gerakan pemberontakan DI/TII wilayah Jawa Barat. Masalah keamanan dapat teratasi.	01.22
Asian Games ke IV.	01.31
Atlet Bulu tangkis tunggal Puteri, Minarni, menerima medali di Asian Games ke IV.	01.35
Atlet Bulu tangkis tunggal Putera, Tan Joe Hock, menerima medali di Asian Games ke IV.	01.43
Atlet Lanny Gumulja merupakan bintang baru yang muncul dari cabang renang lompat indah.	01.47
Atlet Lanny Gumulja menerima medali di Asian Games ke IV. Tahun Kemenangan dalam bidang olahraga yang kita saksikan juga kemenangan atas keberhasilan membangun Gelora Bung Karno dan membuka Asian Games ke IV.	01.54
Para atlet lari gawang putra tengah bertanding di Asian Games ke IV.	01.59
Atlet lari gawang putra, Muhammad Sarengat mendapatkan medali di Asian Games ke IV. Sarengat, atlet muda dari Indonesia telah menggemparkan dunia olahraga se-Asia.	02.12
Tim Kesebelasan Indonesia tiba di Lapangan Terbang Internasional Kemayoran disambut meriah dan penuh antusias dengan kalung bunga. Selama dua tahun tim kesebelasan Indonesia berhasil mempertahankan gelar di Merdeka Games di Malaya.	02.24
Regu Bridge Indonesia berhasil menggondol juara dalam kejuaraan Bridge Timur Jauh ke-6 di Manila.	02.40
Sensus Pembangunan.	02.48
Para petugas sensus turun dari kapal untuk melaksanakan tugas sensus penduduk. Dalam tahun 1962 kita boleh bangga karena Pemerintah Republik Indonesia telah berhasil menyelenggarakan sensus penduduk yang pertama yang besar artinya untuk pembangunan nasional semesta berencana.	02.52

Tampak dekat dua orang petugas sensus yang tengah berkonsentrasi dalam melaksanakan tugasnya.	02.59
Petugas sensus membangunkan masyarakat untuk proses pendataan penduduk yang akurat. Masyarakat terlihat tertib selama proses pendataan.	03.05
Proses pencatatan hasil sensus oleh para petugas sensus.	03.14
Trikora.	03.25
Tampak dekat papan bertuliskan Komando Daerah Militer V Djajakarta, Komando Distrik Militer 0501 Djaja Utara pada sebuah bangunan.	03.29
Puncak dari Tahun Kemenangan seperti yang diamanatkan oleh Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Tahun 1962 adalah tahun pelaksanaan Trikora, mengalirnya putera-puteri Indonesia yang berduyun-duyun mendaftarkan diri sebagai sukarelawan pembebasan Irian Barat.	03.33
Tampak kesibukan para petugas melakukan pendataan kepada para pendaftar sukarelawan.	03.40
Masyarakat sangat antusias mendaftarkan diri sebagai sukarelawan.	03.47
Barisan para pejuang pembebasan Irian Barat. Trikora dilaksanakan oleh segenap lapisan masyarakat, mahasiswa, pelajar, para karyawan dan segenap potensi rakyat dikerahkan guna pembebasan Irian Barat.	03.57
Sukarelawan pembebasan Irian Barat berlatih menggunakan senjata.	04.05
Tampak spanduk bertuliskan “Selamat Datang Sukarelawan Pembebasan IB dari Malaya/Singapura” di Lapangan Terbang Internasional Kemayoran.	04.18
Sukarelawan Pembebasan Irian Barat yang berasal dari Malaya ataupun Singapura turun dari pesawat. Pembebasan Irian Barat didukung pula oleh setiap rakyat yang cinta kemerdekaan dan yang anti Imperialisme dan Kolonialisme.	04.21
Sukarelawan Pembebasan Irian Barat yang berasal dari Malaya ataupun Singapura setibanya di Lapangan Terbang Internasional Kemayoran. Putera-Puteri dari Singapura dan Malaya ini siap sedia untuk membebaskan Irian Barat dari cengkeraman kaum penjajah.	04.24
Penyerahan bantuan dari luar negeri berupa obat-obatan dan alat transfusi darah yang sangat penting bagi para gerilyawan pembebasan Irian Barat.	04.34

Barisan sukarelawan Irian Barat yang pertama bersiap memasuki kapal untuk menuju Irian Barat. Keberangkatan sukarelawan yang pertama ini sebanyak 10.000 orang menunjukkan bahwa pembebasan Irian Barat dengan jalan kekerasan siap dilaksanakan.	04.50
Pasukan angkatan bersenjata dengan berpakaian seragam lengkap dengan senjata juga telah bersiap untuk menuju Irian Barat dalam gerakan pembebasan Irian Barat. Keberangkatan Brimob ke garis depan mengenangkan saat gawat sudah dekat.	05.01
Menteri Panglima Angkatan Udara Laksamana Muda Udara Omar Dhani kembali dari Uni Soviet alam rangka memperkuat angkatan bersenjata dan segera turun dari pesawat untuk bertemu dengan para pembesar dan korps diplomatik setibanya di lapangan terbang.	05.27
Tampak dekat Menteri Panglima Angkatan Udara Laksamana Muda Udara Omar Dhani tengah diwawancarai oleh para jurnalis.	05.40
Alat Utama Sistem Pertahanan dari berbagai korps komando yang dimiliki oleh Republik Indonesia dipertunjukkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menunjukkan kesiapan kekuatan militer Indonesia.	05.43
Tampak dekat kapal militer milik Republik Indonesia. Hari Angkatan Perang 1962 merupakan bukti bahwa Pemerintah Republik Indonesia betul-betul sanggup menjaga kemerdekaan dan kesatuan Bangsa dari Sabang sampai Merauke serta membebaskan Irian Barat.	05.55
Menteri Panglima Angkatan Udara Laksamana Muda Udara Omar Dhani bersama para petinggi militer lainnya tampak khidmat menyaksikan penampilan Alat Utama Sistem Pertahanan pada perayaan Hari Angkatan Perang 1962.	06.01
Tampak Angkatan Udara Republik Indonesia melakukan pertunjukkan udara dengan pesawat militer.	06.16
Para pemuda dan mahasiswa dari Irian Barat yang baru datang dari Belanda turun dari pesawat dan disambut dengan hangat dan penuh antusias. Pelaksanaan Trikora dapat dukungan pula dari putera-putera dari Irian Barat baik yang datang dari Belanda maupun dari daratan Irian Barat.	06.22
Rombongan mahasiswa ini selanjutnya diterima oleh Presiden Soekarno yang didampingi oleh Nyonya Hartini Soekarno di Istana Bogor. Presiden menjelaskan bahwa Trikora tidak dapat dihentikan oleh siapa pun juga.	06.36

Kedatangan Menteri Luar Negeri Soebandrio disambut hangat oleh masyarakat. Menteri Luar Negeri Soebandrio telah berhasil mencapai perjanjian New York dengan jalan diplomasi Irian Barat bisa dibebaskan dari tangan Belanda. Para jurnalis berlomba-lomba mendapatkan wawancara dengan beliau.	06.52
Soejarwo, SH., memimpin rombongan ke Irian Barat untuk menjabat Perwakilan Republik Indonesia di Kotabaru.	07.15
Tampak para gerilyawan yang terluka dalam pertempuran selama membebaskan Irian Barat dirawat di rumah sakit. Para gerilyawan yang tengah dirawat di rumah sakit merasa tersanjung saat menerima kunjungan.	07.26
Tampak para sukarelawati guru-guru untuk memajukan masyarakat Irian Barat mengenakan seragam duduk dengan rapi dan tengah khidmat mendengarkan pidato Bapak Prijono selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.	07.52
Sandang Pangan.	08.21
Para petani mengangkut padi untuk dikumpulkan guna mendukung kelancaran distribusi beras. Swasembada beras dipergiat.	08.24
Bendera yang bertuliskan “ <i>Komando Operasi Gerakan Makmur</i> ” untuk diberikan kepada daerah lahan padi guna mendorong semangat melipatgandakan produksi beras.	08.35
Pelaksanaan <i>landreform</i> dilakukan pada tanggal 29 September 1962 di Kerawang.	08.42
Proses pembagian tanah untuk para petani penggarap di Kerawang. Pelaksanaan <i>landreform</i> berarti mempertinggi taraf hidup rakyat tani dalam masyarakat sosialis Indonesia.	08.49
Kesibukan di pabrik pencetak kertas di Pematang Siantar yang baru saja dibuka oleh kaum veteran guna mendukung kemajuan dibidang industri. Setelah program keamanan di Irian Barat dapat diselesaikan, program pemerintah selanjutnya dititik beratkan kepada pelaksanaan program dibidang ekonomi yaitu program sandang pangan.	08.58
Tampak pekerja pabrik begitu semangat mengangkut gulungan kertas yang baru saja dicetak dari mesin pencetak.	09.14
Tumpukan kertas dipabrik kertas yang siap untuk diedarkan kepada para distributor.	09.22
Kesibukan di pabrik pemintal benang ulat sutera. Gabungan koperasi batik di Indonesia telah berhasil mendirikan pabrik <i>Cambridge Medari</i> di Yogyakarta yang merupakan salah satu usaha untuk mencukupi sandang.	09.25

Tampak benang-benang dari ulat sutera tengah melalui proses pemintalan pada alat pemintal canggih yang dimiliki oleh pabrik.	09.37
Kesibukan para pekerja dalam mengoperasikan alat pemintal.	09.47
Sebuah poster bergambar peta wilayah Sulawesi Selatan dan pada bagian atasnya bertuliskan “ <i>Koperasi I.S.R.I SULSERA</i> ” .	09.52
Tampak dekat jenis-jenis daun murbei yang menjadi pakan ulat sutera.	09.55
Proses memisahkan kepompong ulat sutera untuk dijadikan benang sutera.	10.05
Gadis-gadis di Sulawesi Selatan sangat mahir dalam memintal benang sutera yang dihasilkan oleh ulat sutera.	10.10
Berbagai jenis kain sutera dipamerkan dan diberi penjelasan.	10.25
Tampak bendera merah putih yang dijahit menggunakan kain sutera. Bendera Merah Putih dari kain sutera tersebut akan dikibarkan di Irian Barat.	10.30
Selamat Hari Natal 25-12-1962 dan Selamat Tahun Baru 1-1-19631.	10.40
<i>Closing.</i>	10.46

b. Daftar Arsip PPFN: Kelompok Film Newsreels Gelora Indonesia

- 391) Judul : Gelora Indonesia
 Nomor : 362
 Format : Roll Film 35 mm
 Durasi : 09.55 menit
 Warna : Hitam Putih
 Narasi : Bahasa Indonesia
 Produksi : PFN
 No. Peminjaman : DVD 479-2010
 Sinopsis :

Peringatan HUT ke I Front Nasional Pembebasan Irian Barat, di Istana Merdeka Sambutan Presiden Soekarno. Sambutan Menteri Negara Wahid Wahab dan KSAD. Dihadiri oleh komandan Operasi Tujuh Belas Agustus, Operasi Merdeka, Operasi Tegas, dan Operasi Mandala.

- 392) Judul : Gelora Indonesia
 Nomor : 472
 Format : Roll Film 35 mm

Durasi : 10.30 menit
Warna : Hitam Putih
Narasi : Bahasa Indonesia
Produksi : PFN
Tahun Produksi : 1961
No. Peminjaman : 272-2005 (Betacam)
Sinopsis :

20 Agustus 1961 Kapal Rovina yang membawa pengungsi dari Irian Barat tiba di Tanjung Priok dengan diketuai oleh Mr.Palengkahu.

393) Judul : Gelora Indonesia
Nomor : 481
Format : Roll Film 35 mm
Durasi : 10.55 menit
Warna : Hitam Putih
Narasi : Bahasa Indonesia
Produksi : PFN
Tahun Produksi : 1961
No. Peminjaman : DVD 415-2010, 326-2008 (Betacam)
Sinopsis :

Sidang Pleno DPR-GR yang mendukung Trikora

394) Judul : Gelora Indonesia
Nomor : 482
Format : Roll Film 35 mm
Durasi : 10.55 menit
Warna : Hitam Putih
Narasi : Bahasa Indonesia
Produksi : PFN
Tahun Produksi : 1961
No. Peminjaman : 284-2010
Sinopsis :

Melaksanakan Tri Komando Rakyat

- Bogor. Sidang Istimewa membahas masalah Irian Barat yang belum masuk ke Indonesia berlangsung 5 jam dipimpin oleh Presiden Soekarno di Istana Bogor.
- 19 Desember 1961 Pembentukan Komando Penerangan untuk pembebasan Irian Barat dipimpin oleh Menteri Maladi.
- Jakarta. Komando Distrik Militer 0501 Jakarta Raya Utara, Kodam V Jakarta. Mendaftarkan diri menjadi sukarelawan Trikora.
- Jakarta. Sumbangan obat-obatan dari PMI Jakarta diterima oleh Gubernur DKI, Dr. Soemarno.
- Jakarta. Apel besar Tenaga Pertahanan yang diikuti oleh pegawai swasta, sipil, anggota DPR dan barisan Pepera. Hadir Soekowati, Kol. Umar Wirahadikusuma, Gubernur DKI, Rantung Defile barisan.

395) Judul : Gelora Indonesia
Nomor : 483
Format : Roll Film 35 mm
Durasi : 10.42 menit
Warna : Hitam Putih
Narasi : Bahasa Indonesia
Produksi : PFN
Tahun Produksi : 1961
No. Peminjaman : 272-2005 (Betacam)
Sinopsis :

Umat Islam berhijrah untuk melaksanakan Trikora. Jakarta. Pembukaan Kongres Partai Indonesia ke-1 dilakukan Presiden Sukarno di Gedung Olahraga. Ketua Umum Partindo, Asmara Hadi mendukung Komando Rakyat untuk menyerbu Irian Barat.

396) Judul : Gelora Indonesia
Nomor : 485
Format : Roll Film 35 mm

Durasi : 10.59 menit
Warna : Hitam Putih
Narasi : Bahasa Indonesia
Produksi : PFN
Tahun Produksi : 1961
No. Peminjaman : 272-2005 (Betacam)
Sinopsis :

Melaksanakan Trikora. Serah terima Deputy Staff Indonesia Timur dari Mayjen Ahmad Yani kepada Mayjen Soeharto yang juga menjadi Panglima Mandala. Kesatuan Tempau 14 terdiri dari beberapa Batalyon Infanteri yang siap menuju Irian Barat.

397) Judul : Gelora Indonesia
Nomor : 486
Format : Roll Film 35 mm
Durasi : 10.55 menit
Warna : Hitam Putih
Narasi : Bahasa Indonesia
Produksi : PFN
Tahun Produksi : 1961
No. Peminjaman : DVD 59-2010(2015) 272-2005 (Betacam)
Sinopsis :

Melaksanakan Tri Komando Rakyat. Lelang amal perhiasan diselenggarakan di Hotel Duta Indonesia. Dihadiri oleh Presiden Sukarno dan Menteri Sosial Muljadi Djojomartono. Pending Emas yang dilelang itu akan dihadiahkan kepada penerjun pertama di Irian Barat, Herlina. Cincin berharga 1 juta rupiah diberikan kepada Ibu Jos Soedarso. Rapat Trikora dihadiri oleh para pamong mendengarkan pengarahannya Menteri Sudibyo, di Lapangan Front Pembebasan Irian Barat.

398) Judul : Gelora Indonesia
Nomor : 487

Format : Roll Film 35 mm
Durasi : 11.02 menit
Warna : Hitam Putih
Narasi : Bahasa Indonesia
Produksi : PFN
Tahun Produksi : 1962
No. Peminjaman : DVD 317-2010
Sinopsis :

Lokantara 25 Januari 1962, gerak cepat inti Irian Barat, antara Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah. 5 Februari 1962 Pembacaan kebulatan tekad eks Brigade 17 untuk melaksanakan Komando Rakyat di depan menteri Achmadi.

399) Judul : Gelora Indonesia
Nomor : 488
Format : Roll Film 35 mm
Durasi : 10.55 menit
Warna : Hitam Putih
Narasi : Bahasa Indonesia
Produksi : PFN
Tahun Produksi : 1962
No. Peminjaman : 56-2010(2015)
Sinopsis :

Trikora Mahasiswa mempelajari seluk beluk militer, Latihan kemiliteran bagi sukarelawan mahasiswa. Panglima Kodam Diponegoro Brigjen Sarbini meninjau mahasiswa yang sedang berlatih

400) Judul : Gelora Indonesia
Nomor : 489
Format : Roll Film 35 mm
Durasi : 09.51 menit
Warna : Hitam Putih

Narasi : Bahasa Indonesia

Produksi : PFN

Tahun Produksi : 1962

No. Peminjaman : DVD 114-2010

Sinopsis :

19 April 1962, kedatangan sukarelawan pembebasan Irian Barat dari Singapura, dipimpin Nurdin. Disambut oleh Menteri Achmadi dan Kol. Soekowati. Mereka akan diasuh Badan Pembina Potensi Karya. Penyerahan 1000 selimut untuk Batalyon Irian Barat oleh ketua DKA, Ms. Tresna Suyadilaga di panti DKA.

401) Judul : Gelora Indonesia

Nomor : 490

Format : Roll Film 35 mm

Durasi : 08.13 menit

Warna : Hitam Putih

Narasi : Bahasa Indonesia

Produksi : PFN

Tahun Produksi : 1962

No. Peminjaman : DVD 114-2010, 245-2005 (Betacam), DVD 415-2010

Sinopsis :

Apel besar sukarelawan Irian Barat di lapangan MPMG Kebayoran Baru dihadiri oleh Menteri Prof. Priyono.

402) Judul : Gelora Indonesia

Nomor : 491

Format : Roll Film 35 mm

Durasi : 08.13 menit

Warna : Hitam Putih

Narasi : Bahasa Indonesia

Produksi : PFN

Tahun Produksi : 1962

No. Peminjaman : DVD 52-2010, DVD 79-2010, 272-2005 (betacam)

Sinopsis :

Melaksanakan Trikora, Batalyon I Sukarelawan Jawa Timur di bawah naungan Tugu Surabaya dan Sukarelawan Surabaya melakukan pawai setelah di lantik intik berangkat ke garis depan. Pembukaan briefing pejabat inti dari 22 departemen di Cibogo, Bogor dilakukan oleh Kepala Staf Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat. Deputy KSAD Kol. Soemarwan dan pejabat PPPK, Sohartono menyambut kedatangan enam orang Irian Barat dan Belanda di bandara Kemayoran Jakarta turut menyambut putra-putra Irian Barat.

c. Daftar Arsip PPFN: Kelompok Film Dokumenter Politik

403) Judul : Zamrud Khatiulistiwa

Nomor Reel : 1

Format : Roll Film 35 mm

Durasi : 09.48 menit

Warna : Hitam Putih

Narasi : Bahasa Indonesia

Produksi : PPFN

Tahun Produksi : 1968

No. Peminjaman : DVD 418-2010

Sinopsis :

Komandan Mandala Mayor Jenderal Soeharto meninjau garis depan Operasi Trikora dengan anak buahnya. Wakil Panglima Besar Pembebasan Irian Barat Jenderal A.H. Nasution, dan Mayor Jenderal memberikan sambutan di garis depan. Rakyat menyambut gembira. 1 Mei 1963, upacara pengibaran bendera Merah Putih, di halaman gedung Perwakilan RI. Dihadiri Letnan Jenderal Ahmad Yani. Kepala Perwakilan RI di Irian Barat Sadjarwo Tjondronegoro, SE memberikan sambutan.

404) Judul : Api Nan Tak Kunjung Padam
Format : Roll Film 35 mm
Durasi : 09.48 menit
Warna : Hitam Putih
Narasi : Bahasa Indonesia
Produksi : PFN
No. Peminjaman : DVD 13-2010, DVD 14-2010, DVD 127-2011, DVD
301-2012
Sinopsis :
Berjuang untuk Pembebasan Irian Barat Tanggal 28 Oktober.

D. Konsolidasi dan Penentuan Pendapat Rakyat

1. Abstrak



Gambar 4

Pidato pejabat pemerintah saat penyerahan pemerintah UNTEA kepada RI. Tampak bendera PBB dan merah putih berkibar di Kotabaru.

Sumber: Kempen Wilayah Irian Barat 1957-1964 (No. 63-5134)

Konsolidasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai perbuatan untuk memperteguh atau memperkuat perhubungan, persatuan dan sebagainya. Dalam konteks perjuangan pembebasan Irian Barat, konsolidasi dapat diartikan sebagai upaya memperkuat kedudukan Indonesia di Irian Barat baik dalam bidang pemerintahan, sosial dan ekonomi. Proses konsolidasi dilakukan setelah penandatanganan Persetujuan New York pada 15 Agustus 1962. Konsolidasi semakin ditingkatkan menjelang dan setelah pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Beberapa bentuk konsolidasi antara lain penyusunan anggaran pembangunan, pelaksanaan proyek industri, transmigrasi, dan penguatan unsur pemerintahan di propinsi Irian Barat.

Perjuangan pembebasan Irian Barat pada tahap konsolidasi dan Pepera tersebut, terekam dalam setiap deskripsi arsip yang ditampilkan dalam bagian ini. Terdapat 133 nomor arsip dari 16 daftar dan inventaris arsip tekstual, 25 nomor arsip

dari 1 daftar arsip foto, 18 nomor arsip dari 1 daftar arsip film yang memiliki informasi mengenai tahapan konsolidasi dan Pepera untuk merebut Irian Barat.

Informasi tersebut antara lain mengenai pidato-pidato Presiden Sukarno terkait program di Kotabaru, masuknya Irian Barat, dan pembubaran Komando Mandala terdapat di Daftar Arsip Pidato Presiden RI 1958-1967 (arsip tekstual). Informasi mengenai pembentukan provinsi, mata uang, kebijakan pembangunan, anggaran pendapatan dan belanja, kedudukan aparatur pemerintah, pengangkatan Gubernur dan anggota DPRD-GR di Provinsi Irian Barat banyak terdapat di Daftar Arsip Sekretariat Negara RI: Seri Produk Hukum 1949-2005, Inventaris Arsip Menteri Negara Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri 1967-1973, Inventaris Departemen AL 1964-1967, Departemen Perindustrian dan Perdagangan 1963-1997, Inventaris Arsip Menko Hubra 1963-1966 dan Inventaris Arsip Roeslan Abdul Gani 1950-1976 (arsip tekstual).

Sementara itu, informasi mengenai Pepera dan proses di sekitar penyerahan Irian Barat kepada Indonesia banyak terdapat di Inventaris Arsip Marzuki Arifin 1945-1984, Nahdlatul Ulama 1948-1979 (arsip tekstual), Daftar Arsip Kempen Wilayah Jawa Barat 1957-1964 (arsip foto) dan Daftar Arsip PFN (arsip film). Berikut ini adalah deskripsi arsip dalam beberapa khazanah arsip statis di ANRI yang memuat informasi arsip terkait dengan perjuangan pembebasan Irian Barat pada tahap konsolidasi dan Pepera:

2. Arsip Tekstual

a. Daftar Arsip Pidato Presiden RI 1958-1967

- 405) Pidato Presiden pada upacara pernyataan-pernyataan dan Program Kotabaru dari putra-putra Irian Barat, di Istana Negara Jakarta. 22 Maret 1963, stensilan, 1 sampul. (No.471)
- 406) Pidato Presiden pada rapat raksasa untuk menyambut masuknya Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan RI, di Lapangan Merdeka Ambon. 1 Mei 1963, stensilan, 1 sampul. (No.487)
- 407) Pidato Presiden pada rapat raksasa dan upacara pemberian gelar “Mahaputra Irian Barat” kepada Presiden Soekarno di Kotabaru. 4 Mei 1963, stensilan, 1 sampul. (No.488)

- 408) Pidato Presiden pada rapat raksasa di Biak. 5 Mei 1963, stensilan, 1 sampul. (No.490)
- 409) Pidato Presiden pada rapat raksasa di Merauke. 5 Mei 1963, stensilan, 1 sampul. (No.491)
- 410) Pidato Presiden pada upacara pembubaran “Komando Mandala” di Makassar. 6 Mei 1963, stensilan, 1 sampul. (No.492)
- 411) Pidato Presiden pada malam tasyakur Irian Barat di Senayan Gelora Bung Karno. 2 Juni 1963, stensilan, 10 lembar. (No. 498)
- 412) Pidato Presiden pada peresmian Monumen Irian Barat di Lapangan Banteng Jakarta. 18 Agustus 1963, stensilan,konsep, 1 sampul. (No. 515)

b. Daftar Arsip Sekretariat Negara RI: Seri Produk Hukum 1949-2005

- 413) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. 10 September 1969, asli, 1 sampul. (No. 502)
- 414) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1964 tentang Pembayaran Penghasilan Beberapa Pejabat Negara tertentu dalam Mata Uang Rupiah Irian Barat. 12 Agustus 1964, asli, 4 lembar. (No. 2241)
- 415) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1969 tentang Penghasilan bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Daerah Provinsi Irian Barat. 12 Mei 1969, asli, 8 lembar. (No. 2383)
- 416) Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1963 tentang Pemerintahan di Wilayah Irian Barat Segera Setelah Diserahkan kepada Republik Indonesia. 21 Februari 1963, asli, 1 sampul. (No. 4361)
- 417) Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1963 tentang Satuan Uang Rupiah yang Khusus Berlaku untuk Daerah Provinsi Irian Barat. 21 Februari 1963, asli, 2 lembar. (No. 4362)
- 418) Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1963 tentang Peraturan-peraturan Devisen Khusus untuk Daerah Provinsi Irian Barat. 21 Februari 1963, asli, 2 lembar. (No. 4363)
- 419) Penetapan Presiden Nomor 8 Tahun 1963 tentang Kegiatan Politik di Irian Barat. 15 Juli 1963, asli, 2 lembar. (No. 4368)

- 420) Penetapan Presiden Nomor 14 Tahun 1963 tentang Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Irian Barat. 15 November 1963, asli, 4 lembar. (No. 4374)
- 421) Penetapan Presiden Nomor 14 Tahun 1965 tentang Kegiatan Politik dan Kepartaian di Daerah Provinsi Irian Barat. 23 Juni 1965, asli, 1 sampul. (No. 4396)
- 422) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1963 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Irian Barat untuk Masa 1 Mei-31 Desember 1963. 11 April 1963, asli, 4 lembar. (No. 4488)
- 423) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1963 tentang Peraturan mengenai Status dan Kedudukan Keuangan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Kepolisian di Provinsi Irian Barat. 25 April 1963, asli, 4 lembar. (No. 4489)
- 424) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1963 tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, Acara dan Tugas Pengadilan-pengadilan Sipil dan Kejaksaan di Provinsi Irian Barat. 22 Mei 1963, asli, 4 lembar. (No. 4498)
- 425) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 1963 tentang Peraturan Penyesuaian Gaji dan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Kepolisian Negara di Provinsi Irian Barat ke dalam PGPN-1961/PG.Pol-1961. 4 November 1963, asli, 1 sampul. (No. 4509)
- 426) Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 1964 tentang Peraturan Penghasilan Anggota Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara di Provinsi Irian Barat. 23 September 1964, asli, 3 lembar. (No. 4547)
- 427) Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1963 tentang Pemberian Tanda-tanda Kehormatan Satyalancana Satya Dharma Kepada Sukarelawati Herlina atas Jasa Baktinya dalam Perjuangan Pembebasan Irian Barat. 11 Februari 1963, asli, 1 lembar. (No. 7463)
- 428) Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1963 tentang Pelaksanaan Sidang Pleno Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Ke-II Diselenggarakan Sesudah Hari Penyerahan Pemerintahan atas Wilayah

- Irian Barat dari Tangan UNTEA ke Republik Indonesia. 6 Maret 1963, asli, 2 lembar. (No. 7476)
- 429) Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1963 tentang Hubungan Kerja Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi Irian Barat Sebagaimana Dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 8). 11 April 1963, asli, 3 lembar. (No. 7493)
- 430) Keputusan Presiden No. 71 Tahun 1963 tentang Pengangkatan Sdr. Eliezer Jan Bonay Sebagai Gubernur Kepala Daerah Provinsi Irian Barat Terhitung 1 Mei 1963. 24 April 1963, asli, 2 lembar. (No. 7507)
- 431) Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1963 tentang Pengangkatan Alex Onim, Hadji Ibrahim Bauw, Jean Torey, Prof. Dr. J. Ismail, dan M. Noor Atmadibrata sebagai Anggota Badan Pemerintah Harian Provinsi Irian Barat. 24 April 1963, asli, 1 lembar. (No. 7508)
- 432) Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1963 tentang Pengangkatan Kepada Nama-nama yang Terlampir dalam Lampiran Keputusan ini Masing-masing Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong (DPRD-GR) Provinsi Irian barat. 24 April 1963, asli, 3 lembar. (No. 7509)
- 433) Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1963 tentang Pengangkatan Sdr. Lukas Rumkorem dan Johanes Abraham Dimara Sebagai Anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung Wilayah Daerah Irian Barat. 28 Mei 1963, copy, 3 lembar. (No. 7538)
- 434) Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1963 tentang Pengangkatan Sdr. Adrianus Leonard Marani, Lukas Jouwe, Manase Bernabas Ramandey, Clement Kiriwaeb, dan J. Tarumaselly Sebagai Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Wakil Daerah Irian Barat. 28 Mei 1963, asli, 1 lembar. (No. 7539)
- 435) Keputusan Presiden Nomor 160 Tahun 1963 tentang Susunan, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat. 8 Agustus 1963, asli, 4 lembar. (No. 7587)

- 436) Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1963 tentang Penugasan Kepada Pengurus Harian Dana Perjuangan/ Pembangunan Irian Barat Pusat. 13 September 1963, asli, 2 lembar. (No. 7616)
- 437) Keputusan Presiden Nomor 234 Tahun 1963 tentang Susunan Pimpinan Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Pusat Atas Daerah Provinsi Irian Barat. 14 November 1963, asli, 1 lembar. (No. 7655)
- 438) Keputusan Presiden No 3 Tahun 1964 tentang Penambahan Tugas Badan Koordinasi Pembangunan Daerah Provinsi Irian Barat dalam rangka Pelaksanaan Penggunaan Dana Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pembangunan Irian Barat. 4 Januari 1964, asli, 2 lembar. (No. 7705)
- 439) Berkas Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1967 tentang Nilai Perbandingan Rupiah Irian Barat (IB Rp) terhadap Valuta Asing 1 Dollar Amerika Serikat sama dengan IB Rp10 (Sepuluh Rupiah Irian Barat). 7 Maret-3 April 1967, asli, 1 sampul. (No. 8432 A dan B)
- 440) Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1967 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten di Provinsi Irian Barat. 13 Oktober 1967, asli, 5 lembar. (No. 8558)
- 441) Keputusan Presiden Nomor 256 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Republik Indonesia di Provinsi Irian Barat dengan Menggunakan Dana PBB untuk Pembangunan Irian Barat (Fundwi). 20 Desember 1967, asli, 7 lembar. (No. 8635)
- 442) Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 1968 tentang Keikutsertaan Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga dalam Proyek Irian Barat. 16 Mei 1968, asli, 2 lembar. (No. 8822)
- 443) Berkas Keputusan Presiden Nomor 282 Tahun 1968 tentang Penetapan Anggota yang Turut Bertanggung Jawab atas Proyek Irian Barat dan Proyek Transmigrasi Ditambah dengan Wakil dari Departemen Kesehatan. 18 September 1968, asli, 1 sampul. (No. 8931 A dan B)
- 444) Berkas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1969 tentang Pembentukan *Task Force* Pembangunan Masyarakat Pedalaman di Provinsi Irian Barat. 9 September 1969, asli, 1 sampul. (No. 9039 A dan B)

- 445) Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1969 tentang Dana Pengasuhan Putera-Puteri Pedalaman Irian Barat. 11 November-14 Desember 1969, asli, tembusan, 1 sampul. (No. 9056 A dan B)
- 446) Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1969 tentang Sumbangan Dana Pengasuh Putra-Putri Pedalaman Irian Barat. 21-28 November 1969, asli, tembusan, 1 sampul. (No. 9060 A dan B)
- 447) Instruksi Presiden Nomor 02/Instr. Tahun 1963 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Irian Barat. 22 April 1963, asli, 1 sampul. (No. 12417)
- 448) Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1969 tentang Sumbangan Dana Pengasuh Putra-Putri Pedalaman Irian Barat. 21-28 November 1969, asli, tembusan, 1 sampul. (No. 9060 A dan B)

c. Inventaris Arsip Sekretariat Negara: Seri Pidato Presiden Soeharto 1966-1998

- 449) Naskah-naskah pesan/pidato Presiden kepada Kepala-Kepala Suku adat dari Provinsi Irian Barat tahun 1968. 18 Agustus-20 November 1968, asli, 10 lembar. (No. 447)

d. Inventaris Arsip Departemen Keuangan 1950-1969

- 450) Surat-surat mengenai masalah-masalah perekonomian Irian Barat. 26 Agustus 1963-30 Mei 1969, pertinggal, 1 sampul. (No. 327)

e. Inventaris Arsip Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan 27 Maret-25 Juli 1966

- 451) Menteri Perhubungan: Surat Keputusan No. U.14/1/18 Phb Tahun 1966 tentang pembentukan Biro Irian Barat untuk menampung segala kegiatan pengurusan ataa kepentingan rakyat daerah Irian Barat. 1966, tembusan, 1 lembar. (No. 453)

f. Inventaris Arsip Menteri Negara Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri 1967-1973

- 452) Surat Perintah dari KOTI No. SPH-154/KOTI/10/1966 kepada Menteri/Panglima Angkatan Laut RI untuk menyelenggarakan ekspedisi

- laut di daerah Paparan Sahul (Irian Barat). 13 Oktober 1966, tembusan, 1 lembar. (NO. 287)
- 453) Risalah singkat Komisi C mengenai laporan Tim Peninjauan Komisi C ke Irian Barat, 8 November 1966. NB: arsip rusak. Konsep, 8 lembar. (No. 541)
- 454) Berkas mengenai kunjungan tugas ke Irian Barat. 22 Agustus-4 Oktober 1967, asli, 1 sampul. (No. 602)
- 455) Surat dari Menutama Bidang Ekonomi Keuangan kepada Mendagri, Menlu, Menteri Keuangan mengenai bahan-bahan bagi kunjungan Menutama Bidang Ekonomi Keuangan ke Irian Barat. 15 September 1967, pertinggal, 1 sampul. (No. 604)
- 456) Surat-surat mengenai pelaksanaan persetujuan New York 1962 untuk Irian Barat dan surat pengaduan "*The Freedom Committee of West papua/West New Guinea*" kepada Sekjen PBB. November 1966-20 Juli 1967, salinan, 1 sampul. (No. 1554)
- 457) Surat-surat mengenai masalah-masalah yang harus diperhatikan dalam bidang ekonomi/keuangan Irian Barat. 15 Desember 1966-11 Oktober 1967, asli, fotokopi, 1 sampul. (No. 1564)
- 458) Surat-surat mengenai anggaran khusus untuk Irian Barat. 24 Juni 1966-4 September 1967, asli, 1 sampul. (No. 1623)
- 459) Surat dari Sekretaris u.b. Menutama EKKU kepada Sdr. Kas Kolognas mengenai kebutuhan barang-barang pokok di Irian Barat. Agustus 1966, pertinggal, 2 lembar. (No. 1624)
- 460) Surat Dari Menutama Bidang EKKU kepada Menutama Bidang Politik/Menlu mengenai Karantina Moneter di Irian Barat. Agustus 1966, pertinggal, 1 lembar. (No. 1625)
- 461) Surat-surat mengenai pembangunan jaring telekomunikasi di Irian Barat. 30 Agustus-11 November 1966, asli, tembusan, 5 lembar. (No. 1626)
- 462) Surat-surat mengenai pembiayaan ABRI dan KOGAM di Irian Barat. 12 September 1966-3 Februari 1968, asli, 1 sampul. (No. 1627)
- 463) Surat dari Pangdak Rom 21 Irian Barat kepada Presiden RI, Ketua Presidium Kabinet Ampera, para Menutama mengenai kedudukan

- Gubernur Kepala Daerah dan pencalonan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Irian Barat. 30 September 1966, asli, 3 lembar. (No. 1629)
- 464) Surat dari Sekretaris Urusan Khusus Irian Barat kepada Ketua Presidium Kabinet Ampera mengenai laporan pelaksanaan instruksi Presidium Kabinet Ampera tentang serah terima tugas dan tanggung jawab dari bidang-bidang perurusan daerah Provinsi Irian Barat dalam hal pemerintahan dan pembangunan di tingkat pusat kepada Mendagri. 31 Oktober 1966, tembusan, 3 lembar. (No. 1631)
- 465) Berkas mengenai keadaan ekonomi moneter Irian Barat. 24 Desember 1966-19 September 1969, asli, konsep, fotokopi, 1 sampul. (No. 1632)
- 466) Berkas mengenai pembahasan mengenai Irian Barat. 22 April 1967-9 Mei 1969, asli, konsep, pertinggal, 1 sampul. (No. 1633)
- 467) Laporan mengenai *Progress Report* Ekonomi/ Moneter dan Logistik di Irian Barat. 5 Februari 1967, tindasan, 1 sampul. (No. 1637)
- 468) Surat dari Komando Mandala Siaga Komstradaga Operasi Khusus kepada Bapak Mendagri mengenai Operasi Khusus Proyek Irbar/NTT. 1 Maret 1967, pertinggal, 6 lembar. (No. 1639)
- 469) Kumpulan notulen rapat mengenai ekonomi keuangan Irian Barat. 23 Maret-30 September 1967, salinan, konsep, 6 lembar. (No. 1640)
- 470) Surat dari Menteri Pertanian kepada Menutama Bidang EKKU mengenai berbagai masalah di sekitar pembangunan Irian Barat bidang pertanian, beserta lampiran. 5 September 1967, asli, 1 sampul. (No. 1648)
- 471) Surat-surat mengenai penyelesaian hutang Irian Barat kepada Singapura. 20 Oktober 1967-2 Februari 1968, tembusan, 1 sampul. (No. 1650)
- 472) Berkas mengenai pengadaan barang untuk daerah Irian Barat. November 1967-4 April 1969, asli, tembusan, konsep, 1 sampul. (No. 1651)
- 473) Surat-surat mengenai proyek *Fund of the United Nation for the Development* untuk Irian Barat. 3 November 1967-15 Februari 1971, asli, tembusan, salinan, 1 sampul. (No. 1652)
- 474) Surat-surat mengenai bantuan dari PBB dan Belanda untuk Irian Barat. 17 November 1967, asli, 1 sampul. (No. 1653)

- 475) Surat-surat mengenai permasalahan di bidang perhubungan dan tenaga kerja di Irian Barat. 20 Desember 1967-Agustus 1968, konsep, salinan, 1 sampul. (No. 1654)
- 476) Berkas mengenai perjuangan Irian Barat untuk masuk dalam negara kesatuan RI. 1968-1969, salinan, 1 sampul. (No. 1656)
- 477) Naskah-naskah mengenai plebesit di Irian Barat. 1968, tembusan, salinan, 1 sampul. (No. 1657)
- 478) Surat Edaran dari Presiden RI kepada Menteri-menteri Kabinet Ampera mengenai instruksi Presidium Kabinet Ampera No.05/POL/IN/8/1966 tentang pengurusan atas daerah Irian Barat. 31 Januari 1968, salinan, 2 lembar. (No. 1658)
- 479) Berkas mengenai pengelolaan anggaran untuk Pemerintah Daerah Irian Barat untuk keperluan belanja pegawai AKRI, PLTD. NB: peta terlampir. 1 April-24 Agustus 1968, asli, 1 sampul. (No. 1661)
- 480) Naskah pidato Meneg EKUIN di hadapan pejabat pusat dan daerah di Irian Barat. 3 Mei 1968, salinan, 3 lembar. (No. 1664)
- 481) Laporan *Fact-Finding* mengenai Irian Barat tanggal 3-4 Mei 1968. 5 Mei 1968, konsep, salinan, 1 sampul. (No. 1667)
- 482) Surat-surat mengenai kebijakan pemerintah di Irian Barat dalam kaitannya dengan internasional dan distribusi barang-barang impor di Irian Barat. 10 Mei-27 November 1968, tembusan, 1 sampul. (No. 1668)
- 483) Surat Sekretaris a.n. Direktorat Irian Barat Depdagri kepada Meneg EKUIN di Jakarta melalui Drs. Abdurachman mengenai laporan kwartal II/1968 dan rencana kerja projek Irian Barat tahun 1968, beserta lampiran. 28 Mei 1968, asli, 1 sampul. (No. 1669)
- 484) Memo dari Abdurachman kepada Sekretaris mengenai penyampaian konsep surat Meneg EKUIN kepada Mendagri sehubungan dengan situasi politik dan keamanan di Irian Barat. NB: dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Juni 1968-7 Mei 1969, asli, konsep, 3 lembar. (No. 1670)
- 485) Berkas mengenai pelaksanaan dan pemerintahan pembangunan di Irian Barat. 19 Mei 1962-18 April 1967, fotokopi, 1 berkas. (No. 1672)

- 486) Laporan pemerintah pusat kepada DPRD Provinsi Irian Barat mengenai hasil musyawarah dari Tim Konsultasi Pemerintah Pusat dengan DPRD-DPRD Kabupaten di Irian Barat dalam rangka penjelasan persetujuan New York tahun 1969. 18 April 1969, salinan, 7 lembar. (No. 1673)
- 487) Nota dinas dari Direktur Irian Barat/ Sekretaris Proyek kepada Mendagri/ Ketua Proyek Irian Barat mengenai Rencana Operasi Irian Barat 1969/1970. 28 Mei 1969, tembusan, 1 sampul. (No. 1675)
- 488) Surat dari Direktur Direktorat Penerangan Luar Negeri kepada Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri u.p. Kepala Bagpen Pembangunan Irian Barat dalam rangka pembangunan lima tahun mengenai pembangunan lima tahun di Irian Barat. NB: dalam bahasa Indonesia dan bahasa Belanda. 2 Juni 1969, fotokopi, 1 sampul. (No. 1676)
- 489) Surat dari warga sarasehan Sloslo Kliwonan kepada Jend. Soeharto dan Brigjen Sarwo Edhi W (Pangdam XVII/ Tjendrawasih (Irian Barat) mengenai ucapan selamat dan syukuran atas kemenangan Pepera di Irian Barat. 7 September 1969, tindasan, 6 lembar. (No. 1678)
- 490) Naskah mengenai kesan dan pesan Presiden RI, Soeharto mengenai Irian Barat dalam rangka kunjungan kerjanya di Irian Barat. 24 September 1969, salinan, 1 sampul. (No. 1679)
- 491) Surat dari Sekretaris Negara RI kepada Menteri Penerangan RI mengenai kelanjutan proyek perikemanusiaan Irian Barat. 14 November 1969, tembusan, 1 lembar. (No. 1680)

g. Suplemen Inventaris Arsip Menteri Negara Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri 1967-1973

- 492) Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera Tahun 1966-1967. (No. 70)
- SK Presidium Kabinet No. 05/U/Kep/8/1966 tentang pembentukan komando rehabilitasi daerah Irian Barat.
 - SK Presidium Kabinet Ampera RI No. 31/EK/KEP/9/1966 tentang Penundaan Berlakunya Uang Rupiah Baru yang Berlaku sebagai Alat Pembayaran yang Sah Bagi Daerah Provinsi Irian Barat Menurut

Penetapan Presiden No. 27 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 102).

- 493) Keputusan Presiden Tahun 1968-1969. (No. 74b)
- Keppres RI No. 173 Tahun 1968 tentang penunjukkan Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga untuk turut serta bertanggung jawab dalam Proyek Irian Barat “Rehabilitasi Industri Nasional”.
- 494) Surat Keputusan Menutama Bidang Politik Tahun 1966-1967. (No. 83)
- Surat Keputusan Perdana Menteri RI No. 003/KPTS/M.U./Pol/1966 tentang Menghapuskan Organisasi Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Irian Barat “BAPERPIB” sebagai Suatu Badan Staff di lingkungan Bekas Organisasi Sekretariat Koordinator Urusan Irian Barat.
- 495) SK Menteri Keuangan Tahun 1966-1969. (No. 92a)
- SK Menkeu No. 73/Menkeu/1967 tentang Team Ekonomi/ Moneter yang dibentuk oleh Direktorat Irian Barat.
- 496) Instruksi Presidium Kabinet RI Tahun 1965-1967. (No. 166)
- Instruksi Presidium Kabinet No. 05/POL/IN/8/1966 tentang pengurusan masalah-masalah Irian Barat.
 - Instruksi Presidium Kabinet No. 24/U/IN/11/1966 tentang instruksi kepada semua menteri dan instansi-instansi tingkat pusat dalam rangka komando rehabilitasi daerah Irian Barat.
 - Instruksi Presidium Kabinet No. 20/EK/IN/4/1967 kepada Bank Negara Indonesia Unit I/Bank Sentral untuk memberikan bantuan kredit jangka pendek kepada Perusahaan Negara/Perusahaan swasta yang bonafit yang menyelenggarakan pengiriman barang esensial kebutuhan Irian Barat.
- 497) Surat Perintah dari Komando Operasi Tertinggi No. SPH-154/KOTI/10/1966 kepada Menteri/Panglima Angkatan Laut RI untuk menyelenggarakan ekspedisi laut di daerah paparan Sahul (Irian Barat. (No. 287)

h. Inventaris Arsip PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (1931) 1942-2008.

- 498) INMEN Perindustrian Dasar/Pertambangan Nomor 4725/M/Perdatam tentang instruksi kepada para Direksi BPU atau PN dalam lingkungan

Departemen Perindustrian Dasar atau Pertambangan untuk memerintahkan kepada pembuat daftar gaji unitnya memotong 1% dari gaji pokok tiap pegawai setiap bulan selama Desember 1962 sampai Mei 1963 untuk pembangunan Irian Barat. 19 Desember 1962, salinan, 2 lembar. (No. 982)

i. Inventaris Departemen Angkatan Laut 1964-1967

- 499) PP No. 6/ 1966 tentang penghapusan pengadilan adat/swapraja dan pembentukan pengadilan-pengadilan negeri di Irian Barat. Salinan, 12 April 1966, 7 lembar. (No. 5)
- 500) SK Sekretaris Koordinator Urusan Irian Barat No. K/035/Sek.KIB/1965 tentang pembentukan panitia Team Operasi Pembangunan Masyarakat Gotong Royong. Salinan, 20 Juli 1965, 1 lembar. (No. 175)
- 501) SK Kepala Daerah Provinsi Irian Jaya No.35/GIB/1966 tentang penertiban pelabuhan dan perhubungan laut di Irian Barat. Salinan, 1 April 1966, 6 lembar. (No. 182)

j. Inventaris Arsip Departemen Perindustrian dan Perdagangan 1963-1997

- 502) Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 300/M/SK/1963 tentang perdagangan Irian Barat dengan Luar Negeri. 13 April 1963, asli, 1 lembar. (No.759)

k. Inventaris Arsip Nahdlatul Ulama 1948-1979

- 503) Surat terbuka Pimpinan Nasional Missi Islam mengenai pembangunan Irian Barat, aktifitas kader, pentingnya pendidikan, dll. NB: arsip rapuh. 15 Februari-April 1964, salinan, 1 sampul. (No. 459)
- 504) Pernyataan dan surat terbuka DPP Gerakan Tjendrawasi Repolusioner Irian Barat tentang saran kepada pemerintah mengenai jabatan Gubernur Irian Barat. 9 Juli 1956, asli, 3 lembar. (No. 2366)
- 505) Surat dari PWNU Irian Barat kepada Wakil Sekretaris Daerah Provinsi Irian Barat mengenai sumbangan pendapat Pola Pembangunan lima tahun. 27 September 1965, tembusan, 1 lembar. (No. 2412)

- 506) Surat-surat mengenai pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dan pembentukan Provinsi Irian Barat. 17 Agustus 1954-21 Agustus 1969, asli, pertinggal, tembusan, salinan, 1 sampul. (No. 2455)

I. Inventaris Arsip Sekretariat Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat (Menko Hubra) 1963-1966

- 507) Rancangan-rancangan Instruksi Presiden RI tentang pembentukan dan penyelenggaraan pemerintah Irian Barat. 1 Januari 1963, fotokopi, 1 sampul. (No.330)
- 508) Berkas mengenai hasil seminar hukum, bagian Irian Barat pada tiap departemen, daftar nama peninjau sidang umum MPRS III, Hasil Keputusan Panitia Intern DPA. 1 Januari 1963-10 Februari 1966, asli, salinan, tembusan, 1 sampul. (No. 553)
- 509) Surat dari Sekretariat Koordinator Urusan Irian Barat/Waperdam kepada Menko mengenai intisari laporan kegiatan Sekretariat Koordinator Urusan Irian Barat dalam memberikan bantuan pada Pemerintah Daerah Irian Barat. 28 Desember 1964, asli, 1 lembar. (No.658)
- 510) Surat Keputusan Presidium Kabinet Dwikora No. Aa/B/49/1966 tentang menghapuskan Jabatan Koordinator dan Organisasi Sekretariat Koordinator Urusan Irian Barat. 12 April 1966, salinan, 1 lembar. (No. 791)
- 511) Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 1963 tentang anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Irian Barat untuk masa 1 Mei-31 Desember 1963. 11 April 1963, salinan, 4 lembar. (No. 862)
- 512) Laporan Tahunan Pemerintahan Provinsi Irian Barat tahun 1963. 16 Mei 1963, salinan, 1 jilid. (No. 1063)
- 513) Berkas mengenai Siaran Irian Barat. 19 Maret 1964, fotokopi, 1 sampul. (No. 1574)
- 514) Keterangan pers dari Kantor Informasi Kedutaan Besar Australia di Jakarta mengenai batas internasional antara Irian Barat dan wilayah-wilayah Papua dan New Guinea. Nb: berbahasa Indonesia dan Inggris. 4 Agustus 1964, asli, fotokopi, 2 lembar. (No. 1594)

- 515) Materi konferensi pers oleh Sekretariat Koordinator Urusan Irian Barat. 21 Desember 1964, fotokopi, 9 lembar. (No. 1617)
- 516) Keterangan resmi Kedutaan Besar Australia mengenai kabar bahwa Indonesia telah merobah tuntutananya mengenai Irian Barat dengan maksud membuka kesempatan bagi penduduk Papua untuk menentukan nasib hari depan mereka. TT, fotokopi, 4 lembar. (No.1731)
- 517) Surat dari Departemen Luar Negeri RI kepada semua perwakilan RI mengenai '*Comment and Analysis*' atas *draft resolution* Belanda untuk diketahui dan dipergunakan dalam perjuangan Irian Barat. 4 November 1961, tembusan, 1 sampul. (No. 1792)
- 518) Laporan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengenai keadaan di Irian Barat. 28 Februari 1963, salinan, 1 sampul. (No.1796)
- 519) Surat dari Menteri Penghubung Alim Ulama kepada Sodikin Soeriaatmadja mengenai surat permohonan para kiyai di Jawa Barat atas usaha mengembalikan Irian Barat dan menumpas pemberontakan. 29 Agustus 1963, tembusan, 4 lembar. (No. 1797)
- 520) Surat dari Sekretaris Koordinator Urusan Irian Barat kepada Menko Hubra mengenai prasaran pada Musyawarah Rakyat Irian Barat ke I di Kota Baru. 17 Maret 1964, asli, 2 lembar. (No. 1820)
- 521) Surat dari Sekretaris Koordinator Urusan Irian Barat kepada Menteri/ Sekretaris Presidium Kabinet Dwikora mengenai karantina politik dan APBN di Irian Barat. 5 Desember 1964, tembusan, 5 lembar. (No. 1847)
- 522) Nota kepada Presiden mengenai perlu diadakannya perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Provinsi Irian Barat dan reorganisasi struktur pemerintahan pusat khusus daerah Provinsi Tingkat I Irian Barat. 23 Mei 1966, asli, 1 sampul. (No. 1938)

m. Inventaris Arsip Lambertus Nicodemus Palar 1928-1981

- 523) Kepala Direktorat PBB, Deparlu kepada Dubes RI New York: Telegram, 21 Juni 1963 tentang dana bantuan untuk membantu Indonesia dalam pembangunan Irian Barat. asli, 5 lembar. (No. 187)

n. Inventaris Arsip Marzuki Arifin 1945-1984

- 524) Deppen RI: Instruksi Menteri Penerangan No.08/ISTR/MENPEN/1969 tentang prosedur pemberian izin kunjungan wartawan ke daerah Irian Barat. 17 Mei 1969, salinan, 2 lembar. (No. 6B)
- 525) Departemen Penerangan RI: Lampiran pidato WMP/ Menteri Penerangan RI Prof. Mr. H. Muhammad Yamin di depan pegawai yang akan dikirim ke Irian Barat tanggal 10 Mei 1962 tentang karyawan Penerangan dalam pembangunan Irian Barat. 1962, copy, 1 jilid. (No.382)
- 526) Departemen Penerangan RI: Catatan Frans Kaisepo mengenai kejadian-kejadian di sekitar Irian Barat tahun 1945-1962 disertai pengantar. 1 Oktober 1962, salinan, 1 sampul. (No.383)
- 527) Laporan singkat oleh Sudjarwo Tjondronegoro SH tentang perjalanan/peninjauan ke Irian Barat selama 1 minggu (4-11 April 1968). NB: rahasia. 17 April 1968, salinan, 8 lembar. (No.384)
- 528) Berkas tentang hasil sidang penentuan pendapat masyarakat Irian. 14-31 Juli 1969, copy, 1 sampul. (No.386)

o. Inventaris Arsip Abdul Wahab Soerdjoadingrat 1946-1973

- 529) SK. Presiden RI No. 142/1963 disertai lampiran tentang pembubaran Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat. 19 Juli 1963, konsep, 1 sampul. (No.174)

p. Inventaris Arsip Roeslan Abdul Gani 1950-1976

- 530) Wakil Ketua DPA: Surat Keputusan No. 01/Kpts/sd/1962 tanggal 5 April 1962 tentang pembebasan Irian Barat. Stensilan, 5 lembar. (No.221)
- 531) Tim Indoktrinasi Provinsi Irian Barat kepada Paran Pusat: Surat tanggal 24 Februari 1964 tentang keanggotaan tim indoktrinasi daerah Irian Barat, disertai lampiran. Asli, 1 sampul. (No. 703)
- 532) Staf KOTI Pembebasan Irian Barat Gabungan V kepada Ketua Seksi Penerangan KOTI Pembebasan Irian Barat: Surat tanggal 23 Februari 1963 tentang penggantian tenaga-tenaga UNTEA, disertai lampiran. Asli, 1 sampul. (No. 870)

- 533) Staf KOTI Pembebasan Irian Barat Gabungan V: Surat bukti penyerahan tanggal 13 Maret 1963 tentang penyerahterimaan 20 buah radio transistor kepada Ketua Seksi Penerangan KOTI Pembebasan Irian Barat. asli, 1 lembar. (No. 871)
- 534) Soeryasoemirat kepada Presiden RI: Surat tanggal 29 Januari 1963 tentang lamaran untuk mengisi jabatan walikota di Kota Baru atau kota lain di Irian Barat. tembusan, 1 lembar. (No. 1048)
- 535) Panitia Gerakan mendalami Tavip Daswati I Irian Jaya kepada Gubernur Irian Jaya: Surat tanggal 1 Maret 1965 tentang laporan hasil rapat pembentukan PGMAT Daswati I Irian Jaya dengan lampiran. Tembusan, 2 lembar. (No. 1442)
- 536) Perdana Menteri RI: Instruksi No. 32/B/1964 tanggal 9 November 1964 tentang pelaksanaan Penetapan Presiden No. 14/1963 mengenai kebijaksanaan pembangunan bidang industri di Provinsi Irian Barat. Stensilan, 2 lembar. (No. 1881)
- 537) Menteri Kehakiman: Surat Keputusan tanggal 18 Agustus 1966 tentang pembentukan pengadilan-pengadilan negeri di Irian Barat (Biak, Sorong, Fak-Fak, Wamena). Tembusan, 1 lembar. (No. 1893)

3. Arsip Foto

a. Daftar Arsip Kementerian Penerangan Wilayah Irian Barat 1957-1964

- 538) Suatu pertemuan untuk membahas kelanjutan masa depan Irian Barat setelah dikembalikan ke Indonesia. (No. II/D-1 s.d II/D-3 dan II/E-1 s.d II/E-4)
- 539) Para wanita dan tentara saling membaur dengan latar belakang bendera PBB. (No. 63-9440)
- 540) Karnaval dengan spanduk “Negara kita adalah RI yang meliputi Sabang sampai Merauke”. (No. 63-9441)
- 541) Unjuk rasa para pemuda dengan spanduk “Perpendek Masa UNTEA”. (No. 63-9448 s.d. 63-9452)
- 542) Seorang penduduk asli Papua mengibarkan bendera merah putih. (No. 63-10322 dan 63-10323)

- 543) Salah seorang wakil pemerintah memberikan pengarahan bagi rakyat di Irian Barat tentang hasil Perjanjian New York yang berisikan agar Irian Barat kembali ke Indonesia. (No. I A-2 s.d I A-7)
- 544) Penurunan bendera Belanda di halaman Karesidenan Manokwari. (No. 63-5284, 63-5286, 63-5288)
- 545) Pidato penguasa Dr. Djalal Abdoh ketika penyerahan wilayah Irian Barat dari UNTEA ke RI di Kotabaru. (No. 63-4441)
- 546) Menlu Soebandrio dan Djalal Abdoh, Sudjarwo Tjondronegoro SH pada penyerahan dari UNTEA ke RI atas Irian Barat di Kotabaru. (No. 63-4451 s.d 63-4485)
- 547) Penaikan bendera penyerahan pemerintahan dari UNTEA kepada RI di Kotabaru. (No. 63-5132)
- 548) Pidato pejabat pemerintah saat penyerahan pemerintah UNTEA kepada RI. Tampak bendera PBB dan merah putih berkibar di Kotabaru. (No. 63-5133 s.d. 63-5136)
- 549) Djalal Abdoh pidato saat penyerahan pemerintah atas wilayah Irian Barat dari UNTEA kepada RI di Kotabaru. (No. 63-5137 s.d. 63-5141)
- 550) Tentara UNTEA saat penyerahan pemerintah UNTEA kepada RI di Kotabaru. (No. 63-5148)
- 551) Pejabat UNTEA yang hadir untuk penyerahan pemerintah UNTEA kepada RI. (No. 63-5154)
- 552) Bendera merah putih telah berkibar pada penyerahan pemerintahan UNTEA kepada RI di Kotabaru. (No. 63-5163 dan 63-5164)
- 553) Suasana penyerahan pemerintahan UNTEA kepada RI di Kotabaru. (No. 63-5169)
- 554) Menlu Soebandrio di podium saat penyerahan dari UNTEA kepada RI di Kotabaru. (No. 63-5171 dan 63-5172)
- 555) Tamu undangan pejabat militer dan sipil/UNTEA saat penyerahan dari UNTEA kepada RI di Kotabaru. (No. 63-5173 s.d. 63-5175)
- 556) *Airshow the force* (Formasi B25 dan Hercules) saat penyerahan wilayah Irian Barat dari UNTEA kepada RI di Kotabaru. (No. 63-5186)

- 557) Suasana upacara menaikkan bendera merah putih dan bendera PBB. (No. 1 s.d. 10)
- 558) Suasana dalam acara pengarahan pemerintah kepada rakyat Irian Barat tentang berkumpulnya kembali wilayah Irian Barat ke Indonesia. Tampak rakyat juga membawa anak-anak mereka. (No. I A-8)
- 559) Senyum kegembiraan dalam diri unsur-unsur pemerintahan RI dan anggota TNI karena berhasil menyatukan kembali wilayah RI. (No. IA-9)
- 560) Suasana pada saat penyerahan Irian Barat dari UNTEA (Pemerintah Sementara PBB) ke Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Tampak dalam foto terlihat para pejabat pemerintah RI mengadakan pertemuan di ruang tertutup. (No. II A-1 s.d. II A-4)
- 561) Terlihat para pejabat pemerintahan RI dan utusan dari UNTEA PBB (pengawas sementara PBB) yang sedang memperbincangkan situasi di pelabuhan kapal laut di Irian Barat. (No. II/B 1 s.d. II/B 5)
- 562) Setelah penyerahan Irian Barat ke Republik Indonesia, anggota TNI dan pemerintah RI berkunjung ke beberapa tempat di Irian Barat. (No. II/C-1 s.d. II/C-3)

4. Arsip Film

a. Daftar Arsip Film PPFN: Seri Siaran Khusus 1959-1978

563) Judul: Sang Saka Berkibar Di Irian Barat

Nomor Film	SK 54	
Durasi	07'35"	
Tahun Produksi	Tanpa Tahun	
Narasi	Tanpa Suara	
Warna	Hitam Putih	
Produksi	PFN	
Copyright	PPFN	
Format/No. Kaset	DVCAM	0240
	DVD	0127 DVD-RK/2010 (Track 2).
Sinopsis	Perjuangan Bangsa Indonesia dalam membebaskan Irian Barat membuahkan hasil, Bendera Merah Putih dapat dikibarkan di tanah Irian Barat. Elias Jan Bonai dilantik menjadi Gubernur pertama Irian Barat.	
Keterangan	<i>Tidak ada suara.</i>	

Uraian Informasi	Time Code
<i>Opening</i> : Siaran Khusus No. 54.	00.10
Judul: Sang Saka Berkibar di Irian Barat berlatar kan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia di mana secara perlahan-lahan wilayah Irian Barat menjadi bagian dari NKRI.	00.28
Tampak pemandangan wilayah dari Irian Barat yang masih berupa hutan-hutan rimba yang lebat.	00.45
Pesawat-pesawat milik Angkatan Udara Republik Indonesia melakukan patroli udara.	00.50
Barisan pasukan Siliwangi dari angkatan bersenjata melakukan pawai marching band dan barisan angkatan bersenjata lainnya melakukan gerak jalan serta parade baris-berbaris.	01.04
Masyarakat Irian Barat berkumpul untuk menyaksikan pawai dan parade militer.	01.26
Barisan pasukan dari keempat angkatan bersenjata melakukan pemeriksaan kesiapan pasukan.	01.32
Para petinggi militer Republik Indonesia berdiri untuk menyambut kedatangan seorang petinggi militer lainnya.	01.39
Tampak para jurnalis yang siap meliput dan mengabadikan acara pawai dan parade militer di Irian Barat.	01.55
Kedatangan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Dr. Soebandrio.	01.57
Barisan pasukan melakukan pengawalan diabadikan oleh juru foto.	02.06
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Dr. Soebandrio berjabat tangan dan duduk bersama dengan perwakilan-perwakilan lainnya.	02.16
Antusias rakyat Irian Barat yang berkumpul untuk menyaksikan jalannya acara.	02.25
Salah seorang dari perwakilan maju untuk memberikan kata sambutan.	02.33
Selanjutnya adalah kata sambutan dari perwakilan lainnya.	03.04
Tampak dekat wajah salah seorang perwakilan yang tengah memberikan kata sambutannya.	03.14
Kata sambutan dari perwakilan yang terakhir.	03.12
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Dr. Soebandrio memberikan kata sambutannya di podium.	03.38
Penurunan bendera PBB di tanah Irian Barat.	04.02
Pengibaran Bendera Merah Putih di tanah Irian Barat.	04.21
Tampak dekat Bendera Merah Putih berkibar di langit Irian Barat.	04.26
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Dr. Soebandrio dan rombongan memasuki ruangan.	04.33
Proses pelantikan Elias Jan Bonai menjadi Gubernur Irian Barat.	04.42
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Dr. Soebandrio melantik Elias Jan Bonai menjadi Gubernur Irian Barat.	04.46

Suasana pelantikan Elias Jan Bonai menjadi Gubernur Irian Barat.	04.50
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Dr. Soebandrio menyematkan pangkat Gubernuran di pundak Elias Jan Bonai.	04.54
Gubernur Elias Jan Bonai membacakan kata sambutannya di hadapan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Dr. Soebandrio beserta rombongan.	05.09
Hadirin tamu undangan acara pelantikan Gubernur Irian Barat tampak bersuka cita dengan dilantikannya Elias Jan Bonai menjadi Gubernur.	05.15
Elias Jan Bonai beserta Nyonya bersalaman dengan para petinggi dan pejabat dari pusat.	05.20
Rakyat Irian Barat dan para tamu undangan berkumpul untuk menyaksikan malam kesenian.	05.31
Tari tradisional khas Bali dipertunjukkan pada malam kesenian di Irian Barat.	05.36
Para hadirin tamu undangan bertepuk tangan melihat pertunjukan tari tradisional khas Bali.	05.47
Tampak para diplomat dari negara sahabat turut hadir dan menyaksikan malam kesenian.	05.53
Pertunjukkan selanjutnya adalah tari tradisional khas Jawa.	05.55
Para hadirin tamu undangan bertepuk tangan melihat pertunjukan tari tradisional khas Jawa.	06.22
Selanjutnya adalah pertunjukkan Tari Kupu-Kupu yang dibawakan oleh tiga orang gadis muda.	06.25
Acara kemudian dilanjutkan dengan berdansa. Beberapa tamu undangan berdansa bersama pasangan masing-masing.	06.52
Kemeriahan dan semarak pesta kembang api.	07.13
SANG SAKA MERAH PUTIH BERKIBAR DARI SABANG SAMPAI MERAUKE UNTUK SELAMA-LAMANJA.	07.23
Sekian.	07.31
<i>Closing.</i>	07.34

564) Judul: Hari Ulang Tahun RI Ke-24

Nomor Film	SK 107	
Durasi	08'50"	
Tahun Produksi	1969	
Narasi	Bahasa Indonesia	
Warna	Hitam Putih	
Produksi	PFN	
Copyright	PPFN	
Format/No. Kaset	DVD	0349 DVD-RK/2010 (Track 1); 0417 DVD-RK/2010 (Track 2).
Sinopsis	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-24 diawali dengan pelaksanaan Sidang	

Umum DPR-GR pada 16 Agustus 1969. Presiden Soeharto menyampaikan pidato kenegaraannya terkait peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-24, hasil pelaksanaan PEPERA di Irian Barat. Di samping itu presiden juga mengajak para anggota DPR-GR untuk mendukung program 5 tahunan.	
Uraian Informasi	Time Code
<i>Opening</i> Siaran Khusus No. 107.	00.01
Judul: Hari Ulang Tahun RI ke-24.	00.33
Pemandangan Bendera Merah Putih berkibar.	00.39
Bertempat di gedung DPR/MPR RI. Tampak Jenderal Abdul Haris Nasution tiba di gedung DPR/MPR RI.	00.42
Iring-iringan kendaraan Presiden memasuki gedung DPR/MPR RI.	00.51
Tampak bendera merah putih berkibar di gedung DPR/MPR RI.	01.02
Presiden Soeharto tiba di gedung DPR/MPR RI.	01.07
Para anggota dan Pimpinan DPR-GR berdiri seketika Presiden Soeharto tiba di ruang sidang.	01.14
Presiden Soeharto naik ke atas mimbar.	01.27
Presiden Soeharto menyampaikan pidato kenegaraannya dalam Sidang Umum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) Tahun Anggaran 1969/1970, pada 16 Agustus 1969.	01.47
Presiden menyampaikan pentingnya persatuan umat Islam dan pelaksanaan hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Irian Barat.	04.44
Suasana Sidang Umum DPR-GR.	05.45
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, KH. Dr. Idham Chalid.	07.05
Menteri Sosial, A.M. Tambunan.	07.10
Pemandangan Sidang Umum DPR-GR.	07.14
Di akhir pidatonya, Presiden mengingatkan akan bahaya kegagalan pembangunan 5 tahun dan ancaman kembalinya PKI & hancurnya Pancasila.	07.45
Presiden Soeharto meninggalkan mimbar dan kembali duduk.	08.15
Presiden Soeharto meninggalkan Sidang Umum DPR GR.	08.32
<i>Closing.</i>	08.50

b. Daftar Arsip PPFN: Kelompok Film Newsreels Gelora Indonesia

565) Judul : Gelora Indonesia
 Nomor : 462
 Format : Roll Film 35 mm
 Durasi : 10.30 menit

Warna : Hitam Putih
Narasi : Bahasa Indonesia
Produksi : PFN
Tahun Produksi : 1961
No. Peminjaman : DVD 349-2010, DVD 414-2010
Sinopsis :

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi, Ipiik Gandamana melantik Letkol. Laut Pamudji menjadi Gubernur Irian Barat.

566) Judul : Gelora Indonesia
Nomor : 493
Format : Roll Film 35 mm
Durasi : 10.27 menit
Warna : Hitam Putih
Narasi : Bahasa Indonesia
Produksi : PFN
Tahun Produksi : 1962
No. Peminjaman : DVD 317-2010
Sinopsis :

Pelantikan Brigade Pembangunan Irian Barat. Terdiri dari Departemen Koperasi dan Biro pembukaan Tanah. Dilakukan Menteri Achmadi. Peresmian Brigade Pemerintah dan Pemerintahan Irian Barat yang terdiri dari Front Nasional dilakukan A.H Nasution di Asrama Brimob Kelapa Dua. Hadir Kol. Soekowati. Wakil Indonesia di UNTEA, Mr. Soejarwo Tjondronegoro dan 17 stafnya berangkat ke Irian Barat untuk mewakili pemerintah dalam penyerahan wilayah Irian Barat ke Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1962.

567) Judul : Gelora Indonesia
Nomor : 494
Format : Roll Film 35 mm
Durasi : 10.19menit

Warna : Hitam Putih
Narasi : Bahasa Indonesia
Produksi : PFN
Tahun Produksi : 1963
No. Peminjaman : DVD 412-2010
Sinopsis :

Kongres Nasional Putra-putra Irian Jang diketuai oleh Herman Wajoi. Meninjau latihan pekan pendidikan di Sukabumi.

568) Judul : Gelora Indonesia
Nomor : 495
Format : Roll Film 35 mm
Durasi : 10.10 menit
Warna : Hitam Putih
Narasi : Bahasa Indonesia
Produksi : PFN
Tahun Produksi : 1963
No. Peminjaman : DVD 82-2010
Sinopsis :

Apel guru-guru sukarelawan dari Jawa Timur di Irian Barat

569) Judul : Gelora Indonesia
Nomor : 497
Format : Roll Film 35 mm
Durasi : 09.51 menit
Warna : Hitam Putih
Narasi : Bahasa Indonesia
Produksi : PFN
Tahun Produksi : 1963
No. Peminjaman : DVD 286-2010
Sinopsis :

Demonstrasi rakyat di Irian Barat. Moh. Maramus menerima para demonstran di depan gedung perwakilan RI di Irian Barat. Menuntut masa UNTEA diperpendek dan penggabungan. Wilayah Irian Barat ke RI secara Mutlak.

- 570) Judul : Gelora Indonesia
Nomor : 517
Format : Roll Film 35 mm
Durasi : 10.15 menit
Warna : Hitam Putih
Narasi : Bahasa Indonesia
Produksi : PFN
Tahun Produksi : 1963
No. Peminjaman : DVD 17-2010
Sinopsis :

Aneka Tri Komando Rakyat. Beasiswa Trikora, Penyetempatan bintang Satya Lencana Dharma untuk petugas Deppen. Mahasiswa Irian Barat diterima Presiden Sukarno di Istana Bogor.

- 571) Judul : Gelora Indonesia
Nomor : 509
Format : Roll Film 35 mm
Durasi : 09.51 menit
Warna : Hitam Putih
Narasi : Bahasa Indonesia
Produksi : PFN
Tahun Produksi : 1963
No. Peminjaman : DVD 413-2010
Sinopsis :

Demonstrasi Rakyat di Irian Barat. Moh. Maramus menerima para demonstran di depan gedung perwakilan RI di Irian Barat. Menuntut

masa UNTEA diperpendek dan penggabungan. Wilayah Irian Barat ke RI secara Mutlak.

572) Judul : Gelora Indonesia
Nomor : 517
Format : Roll Film 35 mm
Durasi : 09.51 menit
Warna : Hitam Putih
Narasi : Bahasa Indonesia
Produksi : PFN
Tahun Produksi : 1964
No. Peminjaman : DVD 17-2010
Sinopsis :
Kedatangan Ekspedisi Tjendrawasih Irian Barat.

573) Judul : Gelora Indonesia
Nomor : 519
Format : Roll Film 35 mm
Durasi : 09.20 menit
Warna : Hitam Putih
Narasi : Bahasa Indonesia
Produksi : PFN
Tahun Produksi : 1964
No. Peminjaman : DVD 53-2010, DVD 356-2010
Sinopsis :
Hari natal di Kota Baru Irian Barat. Rapat di Irian Barat.
Pembukaan Universitas Cendrawasih, guru-guru dikirim ke Irian Barat.

574) Judul : Gelora Indonesia
Nomor : 522
Format : Roll Film 35 mm
Durasi : 09.20 menit

Warna : Hitam Putih
Narasi : Bahasa Indonesia
Produksi : PFN
Tahun Produksi : 1964
No. Peminjaman : DVD 340-2010, DVD 401-2010
Sinopsis :
Musyawarah rakyat Irian Barat.

575) Judul : Gelora Indonesia
Nomor : 523
Format : Roll Film 35 mm
Durasi : 09.48 menit
Warna : Hitam Putih
Narasi : Bahasa Indonesia
Produksi : PFN
Tahun Produksi : 1964
No. Peminjaman : DVD 131-2010
Sinopsis :
Hari Ulang Tahun kembali Irian Barat. Kolonel Soetjipto SH.
Ziarah ke makam Pahlawan di Merauke, Boven, tarian Irian Barat.

576) Judul : Gelora Indonesia
Nomor : 554
Format : Roll Film 35 mm
Durasi : 11.00 menit
Warna : Hitam Putih
Narasi : Bahasa Indonesia
Produksi : PFN
Tahun Produksi : 1964
No. Peminjaman : DVD 236-2010
Sinopsis :

Mengenang pahlawan. Upacara peringatan Hari Pahlawan ke-20 dengan Inspektur Upacara, Soetjipto SH. Dalam upacara tersebut, Sekjen Koordinasi Irian Barat telah memberikan bingkisan berupa batu nisan kepada Ibu Pessa Margi yang membantu merawat para korban Trikora.

c. Daftar Arsip PPFN: Kelompok Film Dokumenter Politik

577) Judul : Kegiatan-Kegiatan Jendral Achmad Yani

Format : Roll Film 35 mm

Durasi : 10.15 menit

Warna : Hitam Putih

Narasi : Bahasa Indonesia

Produksi : PFN

No. Peminjaman : DVD 433-2012

Sinopsis :

Tanggal 12 Desember 1962 pukul 09.00 Pangad Mayjen. Ahmad Yani, Panglima Mandala Mayjen Soeharto, Kastaf Peperti Sutjipto SH, menyaksikan pengibaran bendera Merah Putih di Biak di kediaman Kepala Perwakilan RI semasa UNTEA. Sudjarwo Tjondronegoro SH, Mayjen A. Yani dalam sambutannya mengajak rakyat bekerja keras. Mayjen A. Yani menginspeksi pasukan Kontingen Indonesia yang dipimpin Kolonel Sudarto. Berkunjung ke Merauke dan bertemu dengan pembebas Irian Barat.

578) Judul : Irian Barat Satu Kesatuan

Nomor Reel : 1

Format : Roll Film 35 mm

Durasi : 11.02 menit

Warna : Hitam Putih

Narasi : Bahasa Indonesia

Produksi : PFN

Tahun Produksi : 1968

No. Peminjaman : DVD 216-2010, 646-2013, 666-2013

Sinopsis :

Hutan di Irian Barat belum terjamah orang luar. Sejak kedaulatan Indonesia diakui Belanda, 1949, Irian Barat masih di bawah Belanda. Penduduknya masih hidup dalam alam primitif. 1963/05/01, bendera Merah Putih berkibar di Irian Barat. Pemerintah RI mengirim wakilnya, Letnan Jenderal Ahmad Yani dan Mayor Jenderal, menghadiri upacara. Ibukota Irian Barat diganti menjadi Sukarnopura dan akhirnya. Sadjarwo Tjondronegoro SH berkunjung ke sana untuk membina kesatuan jiwa dan bangsa. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat pelaksanaannya dilakukan oleh sendiri. Utusan PBB Roose Bennet berkunjung ke Irian Barat dan melihat kehidupan penduduk disana. Anak-anak mendapat pendidikan sejak Taman Kanak-kanak. Sekolah guru didirikan di Irian Barat. SKP agar wanita Irian Barat menjadi terampil.

579) Judul : Pepera Irian Barat

Nomor Reel : 1

Format : Roll Film 35 mm

Durasi : 09.22 menit

Warna : Hitam Putih

Narasi : Bahasa Indonesia

Produksi : PFN

Tahun Produksi : 1969

No. Peminjaman : DVD 642-2012, DVD720-2013, DVD 782-2013

Sinopsis :

Penduduk Irian Barat yang tinggal di pedalaman masih primitif. Penduduk yang sudah tersentuh kebudayaan dari luar sedang beribadah di gereja. Menteri Dalam Negeri Amir Machmud dan Menteri Penerangan Budiardjo beserta rombongan mengunjungi Irian Barat dalam rangka penelitian untuk Pepera yang akan diadakan pada bulan Juni. Setiap kabupaten di Irian Barat telah memilih wakilnya untuk Sidang Dewan. Wakil utusan dari PBB menyaksikan jalannya sidang dan

musyawarah. Menjelang Sidang Dewan Pepera, wakil kabupaten ke kota untuk melaksanakan Sidang Pepera yang diikuti oleh daerah, orpol, ormas dan tradisional. Mereka disambut oleh wakil-wakil di kota. Pada 1969 diadakan Sidang Dewan Pepera Irian Barat. Berturut-turut, 1969/07/14 di Merauke, 1969/07/16 di Wamena, 1969/07/19 di Nabire, 1969/07/23 di Fakfak, 1969/07/26 di Sorong, 1969/07/29 di Manokwari, 1969/07/31 di Biak, dan 1969/08/02 di Jayapura. Sidang dipimpin oleh Gubernur Irian Barat Frans Kaisiepo, dihadiri wakil utusan PBB, Sadjarwo Tjondronegoro, duta besar RI untuk Amerika Serikat. Sambutan Menteri Dalam Negeri Amir Machmud. Wakil wanita Irian Barat menyampaikan pendapat-pendapatnya. Pada umumnya, penduduk Irian Barat telah bertekad untuk masuk mejadi rakyat Indonesia. Menteri Amir Machmud diarak oleh penduduk Irian Barat.

III. PENUTUP

Salah satu poin perjanjian KMB menjelaskan bahwa masalah Irian Barat harus diselesaikan dalam satu tahun setelah penyerahan kekuasaan pada 27 Desember 1949. Akan tetapi sejak tahun 1950-an, pemerintah Belanda menunjukkan sikap tidak ingin melepaskan Irian Barat. Usaha-usaha diplomasi politik secara bilateral yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia ternyata tidak mendatangkan hasil. Alhasil, pemerintah melancarkan konfrontasi politik, ekonomi dan militer. Hal itu menyebabkan ketegangan kedua negara hingga mencapai puncaknya pada 17 Agustus 1960 ketika Indonesia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Pemerintah Kerajaan Belanda.

Setelah dilakukan serangkaian upaya melalui diplomasi dan konfrontasi akhirnya dilakukan persetujuan New York yang memerintahkan Belanda untuk menyerahkan Irian Barat kepada penguasa sementara PBB-UNTEA pada 1 Oktober 1962, dan selanjutnya UNTEA menyerahkan kepada Indonesia pada 1 Mei 1963 dengan ketentuan Indonesia harus mengadakan Pepera. Hasil Pepera menunjukkan bahwa rakyat Irian Barat ingin tetap bersatu dengan Indonesia. Hasil tersebut disampaikan dan disetujui dalam Sidang Umum PBB pada 19 November 1969.

Peristiwa perjuangan pembebasan Irian Barat dari pendudukan Belanda merupakan sebuah peristiwa yang penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ANRI merasa bangga dapat menerbitkan *Guide Arsip Perjuangan Pembebasan Irian Barat 1949-1969* yang tentunya dapat membantu para peneliti. *Guide* arsip ini telah disusun secara sistematis, sehingga informasinya dapat diakses dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik secara tepat, cepat dan akurat. Data dan informasi dari *guide* arsip ini bersumber dari daftar arsip dan inventaris arsip yang telah dibuat oleh ANRI dan dapat diakses di ruang layanan arsip.

Tim penyusun berharap semoga *guide* arsip ini dapat membantu pengguna arsip dalam menemukan arsip statis terkait perjuangan pembebasan Irian Barat yang dicari di ANRI. Penyusun menyadari bahwa *guide* arsip ini masih banyak kekurangan. Saran dan kritik kami harapkan untuk perbaikan mutu *guide* arsip lainnya dikemudian hari. Untuk itu semua kami ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, et.al. *Indonesia dalam Arus Sejarah*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012.
- Bone, Robert C. *The Dynamics of the Western New Guinea (Irian Barat) Problem*. Itahaca, New York, 1952.
- Cholil, M. *Sejarah Operasi-operasi Pembebasan Irian Barat*. Jakarta: Departemen Pertahanan-Kemamanan Pusat Sejarah ABRI, 1971.
- Departemen Penerangan RI. *Irian Barat: Keluarga Kesatuan*. Jakarta: Deppen RI, 1967
- Djamhari, Saleh A., et.al. *Tri Komando Rakyat: Pembebasan Irian Barat*. Jakarta: Markas Besar ABRI, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1995.
- Diamond, Louise. *Multi-Track Diplomacy: A System Approach to Peace, Third Edition*. Connecticut: Kumarian Press, 1996
- Hardiman, Sri. *Kembali ke UUD 1945 Mengantar Perjuangan Pembebasan Irian Barat ke Wilayah Republik Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 1995.
- Kanumoyoso, Bondan. *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*. Jakarta: Pusataka Sinar Harapan, 2001.
- Ridhani, R. *Mayor Jenderal Soeharto: Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009.
- Soegondo, R.M.G., *Kebenaran tentang Irian Barat*, Jakarta: Pembimbing, 1955.
- Subandrio. *Meluruskan Sejarah Perjuangan Irian Barat*. Jakarta: Yayasan Kepada Bangsaaku, 2001.

Indeks Nama

A

Abdoh, Djalal, 545, 546, 549
Abdurachman, 483, 484
Achmadi, 362, 363, 364, 388, 398, 400, 566
Adiwidjaja, A., 273
Ahjar, Moh., 240
Ahmadi (Mayjen), 387
Aidit, D.N., 239, 243
Angkatan Darat, 297, 385, 389, 426
Angkatan Kepolisian, 423
Angkatan Laut, 314, 389, 426, 452, 497
Angkatan Udara, 308, 386, 390, 426, 563
Antara (Kantor Berita), 32
Associated Press, 243
Atmadibrata, M. Noor, 431

B

Badan Koordinasi Pembangunan Daerah, 438
Badan Pembina Potensi Karya, 400
Badan Pemerintah Harian, 431
Badan Pengurus Biro Irian, 161
Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Irian Barat, 494
Badan Perjuangan Irian, 136, 157, 159, 163, 169, 171
Bank Negara Indonesia, 496
Bastari, Achmad, 387
Bataviasche Verkeers Maatschaappij, N.V, 176, 181, 187, 213
Bauw, Ibrahim, 431
Bennet, Roose, 578
Biro Irian Barat, 451
Bisay, Ch., 278
Bonai, Elias Jan , 563
Bonay, Eliezer Jan, 430
Brigade Pembangunan Irian Barat, 566
Budiardjo (Kolonel Udara), 311
Bung Djoni alias Banteng Gemuk, 261

C

Chusin, Mohd., 86

D

Dana Pengasuh Putra-Putri Pedalaman Irian Barat, 446, 448
Dana Perjuangan Irian Barat, 170, 266, 283, 309, 313, 388
Delson, Levin & Gordon, Counsellors at La, 245
Departemen Kesehatan, 443
Departemen Koperasi dan Biro Pembukaan Tanah, 566
Departemen Penerangan, 324, 525, 526
Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga, 442, 493
Dewan Menteri, 29, 64, 68, 108, 109, 113, 116, 147, 152
Dewan Nasional, 152, 167, 282
Dewan Nasional Kongres Rakyat Seluruh Indonesia, 192
Dewan Permasalahan Dunia, 90
Dewan Pertahanan Nasional, 310, 384
Dewan Pertimbangan Agung (DPA), 95, 389, 433, 508, 530
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 136, 142, 190, 384, 440
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong DPRD-GR), 388, 432
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR), 295, 393, 434, 564
Dhani, Omar, 311, 386, 390
Dimara, Johannes Abraham, 433
Direktorat Irian Barat, 495
Djojomartono, Muljadi, 397

E

Ekspedisi Tjendrawasi, 572

F

Fonds Pembebasan Irian Barat, 205
Front Buruh-Tani-Pemuda & Militer, 168
Front Marhaenis, 250
Front Nasional, 203, 204, 232, 566
Front Nasional Pembebasan Irian Barat, 267, 280, 281, 282, 284, 290, 391

G

Gandamana, Ipik, 565
Garuda Indonesia Airways, 327, 332, 333, 334
Gerakan Tjendrawasi Repolusioner Irian Barat, 504
Gerwani, 315, 316

H

Hadi, Asmara, 394
Harahap, Burhanuddin, 43, 71

Hasjmy, Ali, 388
Hatta, Moh., 1, 2, 121, 122, 124
Herlambang, Sri Mulyono (Letkol Udara), 311
Herlina, 397, 427
Hidajat (Letjen), 302
Hoge Commissariaat Belanda, 47

I

Ismail, J., 431

J

Jahja, Moh., 13
Jahya, Mohammad, 78
Jones, Howard P., 385, 387
Jouwe, Lukas, 434
Juanda, 26, 72, 115, 117, 166
Jusuf, M., 385

K

Kabinet Ampera, 463, 464, 478, 492
Kabinet Kerja, 40, 118, 291, 383
Kaisepo, Frans, 526
Kantor Urusan Pegawai, 66
Kapal *Rovina*, 392
Kedutaan Besar Australia, 514
Kementerian Luar Negeri, 28, 33, 52, 60, 171
Kementerian Perhubungan, 147
Kepolisian Indonesia, 158
Kepolisian Negara, 47, 165, 386, 425
Khouw Bian Tie, 302
Kiriwaeb, Clement, 434
Kodam Diponegoro, 399
Kodam V Jakarta, 394
Kolognas, Kas, 459
Komando Mandala, 410, 468
Komando Operasi Tertinggi, 497
Komando Pemuda Perbatasan Irian Barat, 275
Komando Penerangan, 394
Komando Rehabilitasi Daerah Irian Barat, 492
Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat, 318, 402, 518, 529
Komisi Irian, 11

Konstituante, 188
Koordinator Urusan Irian Barat, 435, 494, 500, 509, 510, 515, 520, 521
Kusumowidagdo, Suwito, 302

L

Leimena, J., 335

M

Machmud, Amir, 579
Mahkamah Agung, 285
Maladi, 394
Maramus, Moh., 569, 571
Marani, Adrianus Leonard, 434
Margi, Pessa (Ibu), 576
Martadinata, Eddy, 291
Masjumi, 137
Meutia, Cut, 388
Mikhailov, 387
Mononutu, Arnold, 385

N

Nasution, Abdul Haris (A.H.), 264, 267, 307, 317, 385, 389, 403, 564, 566
Natsir, 21, 68
Nehru, Jawaharlal, 74, 75
Nurdin, 400

O

Onim, Alex, 431

P

Pabrik Gula Kunir, 194
Palengkahu, 392
Pamudji, 565
Panitia Gerakan Mendalami Tavip Daswati, 535
Panitia Irian, 79
Panitia Irian Barat, 126, 127, 159
Panitia Negara Penasehat Penyelesaian Pembatalan KMB, 150
Panitia Pembebasan Irian Barat, 275
Panitia Pembela Irian Barat, 138
Panitia Rakyat Balangan, 138
Panitya Perdjoangan Irian Barat, 305

Partai Murba, 134
Partai Pantja Sila, 133
Partai Rakyat Tjendrawasih, 278
Pegawai Negeri Sipil, 423, 425
Pejuang Kemerdekaan Irian, 287
Pemerintah Daerah Irian Barat, 479, 509
Perbum, 149
Persatuan Rakyat Cendrawasih Ternate Maluku Utara, 198
Perserikatan Bangsa-Bangsa, 81, 82, 83, 85, 438
Perusahaan Kereta Api Partikelir, 146, 178
Perusahaan Listrik dan Gas, 132, 173
Perusahaan Minyak, 149
Perusahaan Perkebunan Kemuning, 175
Perusahaan Philips, 179
Perwakilan Objek Ramusja, 169
Pimpinan Nasional Missi Islam, 503
Pioneer Aviation Corporation, 148
Pontas, St. Kumala, 265
Pringgogido, A.K., 78
Priyono, Prof, 401

R

Radio Republik Indonesia (RRI), 387
Ramandey, Manase Bernabas, 434
Reokomy, R., 274
Roem, Moh., 4
Royal Interocean Line, 227
Rumkorem, Lukas, 433
Rupiah Irian Barat, 414, 439

S

Salawati, C.H, 8
Saleh, Chaerul, 240, 335, 388, 389
Sarhini (Brigjen), 399
Sarekat Buruh Fortho Pusat Surabaya, 179
Sarekat Buruh Kereta Api, 178
Sastroamidjojo, Ali, 25, 30, 38, 56, 84, 112, 113, 114, 335
Sastrowidjojo, Samanhadi, 186
Satrio (Dr.), 334, 345, 346, 347, 359
Satyalancana Satya Dharma, 427
Semarang Veer, NV, 223

Semarangsche Stoomboot En Prauwen Veer, NV, 223
Serikat Buruh Listrik dan Gas Indonesia, 132
Serikat Buruh Percetakan Indonesia, 139
Soebandrio, 348
Soedarso, Jos (Ibu), 397
Soeharto, 396, 403, 489, 490, 564, 577
Soekarno, 40, 92 - 94, 126, 127, 246, 279, 323, 325 - 361, 383, 384, 385, 386, 387,
388, 389, 390, 391, 394, 407
Soekarno, Hartini, 390
Soekowati (Kolonel), 394, 400, 566
Soemarno (Dr.), 394
Soemarwan (Kolonel), 402
Soenjoto, R., 240
Soepomo (Prof. Dr.), 12, 13
Soeprapto, 240
Soeriaatmadja, Sodikin, 519
Soeryasoemirat, 534
Soetjipto (Kolonel), 575
Sohar, Harun, 387
Sohartono, 402
Sosial Demokrat Internasional, 200
Sri Paku Alam VIII, 331, 332, 345, 346
Stoomvaart Maatschappij Nederland, 231
Subandrio (Dr.), 86, 302, 306, 335, 388
Subroto, Gatot, 279
Sudarto (Kolobel), 577
Sudiby, 397
Sudjarwo, 31
Sukarno, 395, 397, 570
Sukiman, 24, 41, 69, 109, 110
Sultan Hamengkubuwono Ke-IX, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 383
Sumarso (Mayor Udara Lokal), 311
Sunario, 189
Suprpto (Brigjen), 388
Suryadarma, R.S., 308
Sutjipto (SH), 577
Suyadilaga, Tresna, 400

T

Takio Oda, 387
Tang Pei, Komodor, 279

Tarumaselly, J., 434
Task Force Pembangunan Masyarakat Pedalaman, 444
Team Ekonomi/Moneter, 495
Team Operasi Pembangunan Masyarakat Gotong Royong, 500
The Atlanti, 103
The Freedom Committee of West papua/West New Guinea, 456
Tim Indoktrinasi Propinsi Irian Barat, 531
Tinjauan (Surat Kabar), 165
Titov, Gherman, 385
Tjondronegoro, Sudjarwo, 403, 527, 546, 566, 577, 578, 579
Torey, Jean, 431

U

Uni Indonesia-Belanda, 12, 29, 78, 131, 143, 153, 199, 245, 255, 263
United Nations, 96, 104, 105, 473
United Press, 32
Universitas Cendrawasih, 573
Universitas Islam Aceh, 388
Universitas Syiah Kuala, 388
UNTEA, 428, 532, 541, 545 - 556, 560, 561, 566, 569, 571, 577
van Krieken, Louis, 287

W

Wahab, Wahid, 391
Wajoi, Herman, 567
Warimin, 197
Wibowo, Sarwo Edhie, 489
Wilopo, 24, 42, 55, 70, 111
Wirahadikusuma, Umar, 394

Y

Yamin, Muhammad, 49, 387, 525
Yani, Ahmad, 396, 403, 577, 578

Z

Zuhri, Saifuddin, 389

Indeks Tempat

A

Ambon, 406
Amerika Serikat, 308, 385, 388, 439, 579
Australia, 46, 63, 285, 514, 516

B

Bandara Kemayoran, 128, 402
Bandara Polonia, 388
Banyumas, 130
Belanda, 2, 7, 8, 12, 23, 27, 29, 30, 33, 35, 44, 47, 52, 59, 61, 62, 74, 78, 80, 101, 104,
109, 124, 131, 140, 142, 144, 153, 156, 157, 160, 163, 165, 174, 179, 182, 184,
186, 194, 198, 199, 209, 212, 214 - 221, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 233, 234,
235, 241, 244, 245, 248, 255, 263, 287, 302, 369, 383, 384, 402, 474, 488, 517,
544, 578
Biak, 408, 537, 577, 579
Bogor, 7, 118, 390, 394, 402, 570
Boven, 575
Burma, 279

C

China, 105, 388
Ciamis, 274
Cianjur, 271
Cibogo, 402
Cimahi, 289
Cirebon, 179

D

Den Haag, 17, 27, 28, 45, 123, 124, 125, 143, 189

E

Eropa Timur, 36

F

Fak-Fak, 322, 537, 579

G

Gedung Dewan Menteri, 14
Gelora Bung Karno, 390, 411

Gowa, 8
Gresik, 132

H

Hongaria, 36
Hotel Duta Indonesia, 397

I

India, 75, 107, 307
Indonesia Timur, 396
Istana Bogor, 390, 394, 570
Istana Merdeka, 126, 127, 204, 205, 291, 294, 295, 386, 389, 390, 391
Istana Negara, 203, 279, 290, 405

J

Jambi, 387
Jawa Barat, 136, 179, 242, 274, 390, 519
Jawa Timur, 250, 402, 568
Jepang, 169, 387

K

Kalimantan Timur (Kaltim), 197
Karachi, 307
Kebayoran Baru, 401
Kediri, 179
Kepulauan Eniwetok, 194
Kotabaru, 390, 405, 407, 520, 534, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 552, 553, 554, 555,
556, 573
Kutaradja, 388

L

Lapangan Banteng, 412
Lapangan Merdeka, 262, 263, 264, 265, 388
Lapangan MPGM, 401
Los Angeles, 90

M

Madiun, 130
Makassar, 163, 410
Malaysia, 105, 243
Maluku, 198, 288

Manokwari, 314, 544, 579
Medan, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 388
Merauke, 322, 390, 409, 540, 563, 575, 577, 579
Monumen Irian Barat, 412
Moscow, 306, 307, 308
Musi (sungai), 387

N

Nederland, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 60, 79, 80, 97, 129, 189, 202, 206, 231, 233, 234

New Delhi, 307

New Guinea, 98, 103, 456, 514

New York, 54, 64, 73, 81, 82, 83, 85, 93, 246, 302, 390, 456, 486, 523, 543

Nieuw Guinea, 18, 76, 79

P

Pakistan, 307

Palembang, 387

Pangkalan Udara Adisucipto, 325 - 342

Papua, 198, 369, 383, 384, 456, 514, 516, 542

Pare-pare, 385

Pasirwaringin, 178

Pati, 190

Prabumulih, 149

Pulau Gebe/Joi, 160

Purwakarta, 272

R

Raringin, 138

Ridderzaal, 123

S

S'Gravenhage, 5, 6

Sabang, 388, 390, 540, 563

Singapura, 197, 390, 400, 471

Sinjai, 385

Soa Sio, 275, 276, 277, 278

Sorong, 537, 579

Sukabumi, 567

Sukarnopura, 578

Sulawesi Selatan, 8, 385, 390

Sumatera Timur, 178
Sumatera Utara, 142, 145, 171, 249, 265, 267, 268, 388
Sumedang, 270, 273
Sungai Gerong, 179
Surabaya, 135, 139, 179, 402

T

Tanjung Priok, 392
Tebing Tinggi, 253, 255, 256, 257, 259, 260
Timur Tengah, 36, 63
Tionghoa, 249
Treveszaal's-Gooveuhage, 18
Tugu Surabaya, 402
Tunisia, 171

U

Uni Sovyet, 324

W

Wamena, 537, 579
Washington, 308
West Irian, 100, 102
West New Guinea, 98, 103, 456

Y

Yogyakarta, 325 - 368, 383, 384, 390

Indeks Istilah dan Peristiwa

A

Agresi Militer II, 383
Aksi Militer, 383
Asian Games, 389, 390

D

Demosioner, 110

G

General Assembly, 105, 246

I

Infiltrasi, 287

K

Karantina Moneter, 460
Konferensi Dewan Solidaritas Asia Afrika, 89
Konferensi Genewa, 36
Konferensi Irian, 18
Konferensi Meja Bundar (KMB), 1, 2, 4, 5, 8, 9, 22, 23, 29, 80, 87, 88 120, 122, 123, 124, 125, 130, 131, 143, 150, 155, 172, 196, 199, 200, 206, 263, 270, 271, 272, 273, 274
Konvensi Jenewa, 210
KTT Non Blok, 91, 94

M

Mahaputra Irian Barat, 407
Misi Militer Belanda, 233
Missi Goodwill Indonesia, 63
Missi-Supomo, 49

N

Nasionalisasi, 132, 144, 145, 146, 147, 148, 173, 175, 176, 177, 178, 181, 184, 186, 187, 193, 209, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 235

O

Operasi Ekonomi, 298

Operasi Irian Barat, 487
Operasi Khusus Proyek Irbar/NTT, 468
Operasi Mandala, 391
Operasi Merdeka, 391
Operasi Pembebasan Irian Barat, 300
Operasi Tegas, 391
Operasi Tujuh Belas Agustus, 391

P

Pemogokan, 179, 180
Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), 394, 489, 506, 528, 564, 579
Persetujuan/Perjanjian New York, 390, 456, 486, 543
Piagam Kebulatan Tekad Buruh, 244
Projek Irian Barat, 443, 483, 487, 493

R

Rapat Samudera Pembebasan Irian Barat, 262, 263, 264, 265
Rehabilitasi Industri Nasional, 493
Resolusi Irian Barat, 129
Round Table Conferenc, 3, 10

S

Sukarelawan, 289, 387, 394, 399, 400, 401, 402, 568

T

Tri Komando Rakyat (Trihora), 242, 315, 344-369, 383, 384, 385, 386, 388, 389, 390, 393, 394, 395, 396, 397, 399, 402

U

Upacara HUT Kemerdekaan, 279, 389, 564

Daftar Singkatan

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AKRI	: Angkatan Kepolisian Republik Indonesia
AL	: Angkatan Laut
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APRI	: Angkatan Perang Republik Indonesia
AURI	: Angkatan Udara Republik Indonesia
Bandara	: Bandar Udara
BAPERPIB	: Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Irian Barat
BFO	: <i>Bijeenkomst voor Federal Overlag</i>
BKS-PM	: Badan Kerdja Sama-Pemuda Militer
BPU	: Badan Pimpinan Umum
BVM	: <i>Bataviasche Verkeers Maatschaappij N.V</i>
Dapib	: Dana Perjuangan Irian Barat
Deparlu	: Departemen Luar Negeri
Deppen	: Departemen Penerangan
DPA	: Dewan Pertimbangan Agung
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRDS	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara
DPR-GR	: Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
EKKU	: Ekonomi dan Keuangan
EKUIIN	: Ekonomi Keuangan dan Industri
FN	: Front Nasional
FNPIB	: Front Nasional Pembebasan Irian Barat
Gerwani	: Gerakan Wanita Indonesia
GIA	: <i>Garuda Indonesia Airways</i>
GPII	: Gerakan Pemuda Islam Indonesia
HUT	: Hari Ulang Tahun
INMEN	: Instruksi Menteri
Irbar	: Irian Barat
ISI	: <i>Information Service Indonesia</i>
Japenkab	: Jawatan Penerangan Kabupaten
Japenpro	: Jawatan Penerangan Provinsi
Kab.	: Kabupaten
Kaltim	: Kalimantan Timur

KASAB	: Kepala Staf Angkatan Bersenjata
KDM-MIB	: Komando Daerah Militer-Maluku dan Irian Barat
Keppres	: Keputusan Presiden
KMB	: Konferensi Meja Bundar
Kogam	: Komando Ganyang Malaysia
Komstradaga	: Komando Strategis Darat Siaga
KOTI	: Komando Operasi Tertinggi
KPM	: <i>Koninklijke Paketvaart Maatschappij</i>
KSAD	: Kepala Staf Angkatan Darat
KSAU	: Kepala Staf Angkatan Laut
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
Masyumi	: Majelis Syuro Muslimin Indonesia
Mendagri	: Menteri Dalam Negeri
Meneg	: Menteri Negara
Menkeu	: Menteri Keuangan
Menko Hubra	: Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat
Menlu	: Menteri Luar Negeri
Menutama	: Menteri Utama
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Murba	: Musyawarah Rakyat Banyak
NV	: <i>Naamloze Vennootschap</i>
Ormas	: Organisasi Masyarakat
Orpol	: Organisasi Politik
PABIB	: Panitia Pembebasan Irian Barat
Pangdak	: Panglima Daerah Kepolisian
Pangdam	: Panglima Daerah Militer
Partindo	: Partai Indonesia
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBFN	: Pengurus Besar Front Nasional
Pepera	: Penentuan Pendapat Rakyat
Pepterti	: Penguasa Perang Tertinggi
Perbum	: Perserikatan Buruh Minyak
Perbupri	: Persatuan Buruh Perkebunan Republik Indonesia
PGMT	: Panitia Gerakan Mendalami Tavip
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PLTD	: Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
PM	: Perdana Menteri
PMI	: Palang Merah Indonesia
PN	: Perusahaan Negara
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah

PRT	: Partai Rakyat Tjendrawasih
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
PWNU	: Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama
Resopim	: Revolusi, Sosialisme, Pimpinan Nasional
RI	: Republik Indonesia
RIL	: <i>Royal Interocean Lines</i>
RIS	: Republik Indonesia Serikat
RPP	: Rancangan Peraturan Pemerintah
RTC	: <i>Round Table Conference</i>
RUU	: Rancangan Undang-Undang
S.M.N.	: <i>Stoomvaart Maatschappij Nederland</i>
S.V.P.M.	: <i>Standard-Vacuum Petroleum Maatschappij</i>
Sarbupri	: Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia
SBKA	: Sarekat Buruh Kereta Api
SEATO	: <i>Southeast Asia Treaty Organization</i>
Sekjen	: Sekretaris Jenderal
SH	: Sarjana Hukum
SK	: Surat Keputusan
SSPV	: <i>Semarangsche Stoomboot En Prauwen Veer</i>
Sulsera	: Sulawesi Selatan-Tenggara
Tavip Daswati I	: Tahun <i>Vivere Pericoloso</i> Daerah Swatantra Tingkat I
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
Trikora	: Tri Komando Rakyat
TT	: Tanpa Tanggal
UNCI	: <i>United Nations Commissions for Indonesia</i>
UNHAS	: Universitas Hasanuddin
UNTEA	: <i>United Nations Temporary Executive Authority</i>
UU	: Undang-Undang
Wampa	: Wakil Menteri Pertama
Waperdam	: Wakil Perdana Menteri
WMP	: Wakil Menteri Penerangan